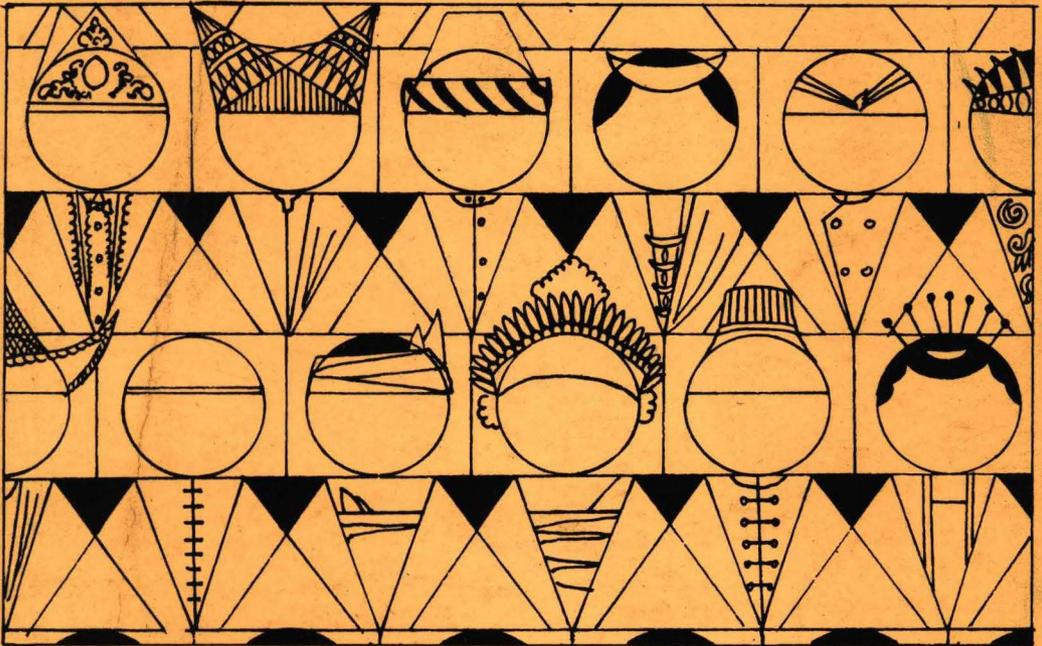




**INTEGRASI NASIONAL
DALAM HUBUNGAN ANTAR SUKU BANGSA
DAN SISTEM NILAI BUDAYA NASIONAL**

**Studi kasus pada masyarakat
Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler
Kotamadya Bandung**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
1996 / 1997**

MILIK DEPDIKBUD
TIDAK DIPERDAGANGKAN

**INTEGRASI NASIONAL
DALAM HUBUNGAN ANTAR SUKU BANGSA
DAN SISTEM NILAI BUDAYA NASIONAL**

**Studi kasus pada masyarakat
Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler
Kotamadya Bandung**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
1996 / 1997**

INTEGRASI NASIONAL DALAM HUBUNGAN ANTAR SUKU BANGSA DAN SISTEM NILAI BUDAYA NASIONAL

**Studi kasus pada masyarakat
Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler
Kotamadya Bandung**

Tim Peneliti : Drs. Toto Sucipto
Drs. Bambang Moh. Wahyu
Drs. Hermana
Drs. Heru Erwantoro
Dra. Lasmiyati
Dra. Ria Andayani Somantri

Editor : Drs. Rosyadi

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh : Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Jawa Barat, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Edisi Pertama 1996

Bandung 1996

Gambar Sampul : Dra. Lina Herlinawati

Dicetak oleh : CV. PELITA

Pengantar

Masalah pembangunan yang dihadapi oleh negara-negara yang multi etnik seperti Indonesia adalah masalah keanekaragaman suku bangsa serta kiat-kiat untuk mempersatukannya. Hal ini dapat dimengerti mengingat setiap suku bangsa memiliki dan mengembangkan kebudayaan serta ciri-ciri etnisitasnya masing-masing.

Masalah lain yang juga dihadapi oleh semua negara berkembang adalah masalah pertumbuhan kawasan-kawasan usaha dan peranan wanita dalam kehidupan sosial ekonomi. Masalah ini perlu diangkat mengingat tumbuhnya kawasan-kawasan usaha/industri di lingkungan pemukiman membawa dampak bagi kehidupan sosial ekonomi maupun budaya masyarakat di lingkungannya. Dalam pada itu pertumbuhan kawasan-kawasan usaha/industri telah mendorong kaum perempuan untuk turut berkiprah dalam kehidupan ekonomi keluarga dengan menjadi tenaga kerja di sektor industri.

Mengacu kepada permasalahan di atas, dalam tahun anggaran 1995/1996, Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Bandung bekerja sama dengan Bagian Proyek P2NB melalui surat Perintah Kerja No. 07/PBP2NB/VI/1995 tanggal 5 Juni 1995 telah mengadakan penelitian dengan judul:

1. Integrasi Nasional dalam Hubungan antar-Suku Bangsa dan Sistem Nilai Budaya Nasional.
2. Cihampelas, Suatu Sosok Kawasan Tinggal dan Usaha.
3. Kehidupan Sosial Ekonomi Buruh Pabrik Perempuan; Studi tentang Peningkatan Peranan Wanita.

Harapan kami semoga hasil penelitian ini menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa.



Bandung, Desember 1995.

Balai Kajian Jarahnitra

[Handwritten Signature]
Drs. Dloyana Kusumah

NIP. 130 927 042

**SAMBUTAN KEPALA KANWIL
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT**

Sebagaimana kita ketahui, bahwa kebudayaan yang ada di Indonesia sangat banyak corak dan ragamnya. Keanekaragaman itu merupakan suatu kesatuan yang utuh dalam wadah kebudayaan nasional, sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia yang menjelma dalam nilai-nilai luhur Pancasila (Bhineka Tunggal Ika).

Untuk melestarikan warisan nilai-nilai budaya luhur bangsa kita, perlu adanya usaha pemeliharaan kemurnian atau keaslian budaya jangan sampai terbawa oleh arus kebudayaan asing.

Adanya usaha yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Ditjen Kebudayaan melalui Bagian Poyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Jawa Barat dengan cara melakukan penelitian dan pencetakan naskah hasil penelitian kebudayaan daerah, merupakan langkah yang tepat dalam rangka menggali, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya luhur bangsa Indonesia.

Saya menyambut dengan gembira atas kepercayaan yang diberikan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Ditjen kebudayaan kepada Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Jawa Barat, dalam tahun anggaran 1996/1997 untuk menerbitkan 3 buah buku yang berjudul :

1. CIHAMPELAS SUATU SOSOK KAWASAN TINGGAL DAN USAHA
2. INTEGRASI NASIONAL DALAM HUBUNGAN ANTARSUKU BANGSA DAN SISTEM NILAI BUDAYA NASIONAL
Studi kasus pada masyarakat Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler Kotamadya Bandung
3. KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI BURUH PEREMPUAN
Studi tentang Peningkatan Peranan Wanita

Naskah ini merupakan suatu permulaan dan masih dalam tahap pencatatan, yang mungkin perlu disempurnakan pada waktu yang akan datang. Namun demikian, saya mengharapakan dengan terbitnya buku

ini akan dapat melengkapi kepustakaan juga bermanfaat bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian proyek ini.

Bandung, Desember 1996
Kakanwil Depdikbud Provinsi
Jawa Barat,



H. Thamrin Gunardi, MA
NIP. 130 364 778

SEKAPUR SIRIH

Dalam rangka pembangunan bangsa (nation-building), bangsa Indonesia sedang menstrukturisasi pola kehidupan. Disatu pihak, beradaptasi dengan proses globalisasi dan di pihak lain, menggalang nasionalisme. Dalam hal ini, nasionalisme menjarang dan menyeleksi pengaruh globalisasi yang mengancam eksistensi bangsa serta lembaga-lembaga yang ada, di samping itu, etnisitas, sikap eksklusif, dan paham kedaerahan sebagai realitas sosial, perlu fungsi untuk memperkaya kebudayaan nasional serta perkembangannya yang cenderung menyempit dan negatif perlu dicegah agar tidak menghambat atau menghalangi integrasi nasional.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, penelitian mengenai "Integrasi Nasional dalam Hubungan Antar Suku Bangsa dan Sistem Nilai Budaya Nasional" ini, mencoba mendeskripsikan dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan pembauran dan kesatuan bangsa. Kajian akan bertumpu pada pranata-pranata serta arena-arena, yang secara langsung maupun tidak dapat menunjang pembauran dan kesatuan bangsa. Hasil kajiannya diharapkan dapat digunakan sebagai dasar membuat kebijakan karena dengan demikian, berbagai kebijakan dapat diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Di samping itu, semoga laporan penelitian ini dapat mempertajam apresiasi masyarakat untuk mengamati dan memilih faktor-faktor integratif yang relevan dengan situasi dan kondisi negara saat ini serta berusaha meninggalkan faktor-faktor disintegratif yang cenderung menggejala di dalam masyarakat.

Walaupun penelitian semacam ini telah banyak dilakukan, namun masih sukar untuk menarik generalisasi yang mantap karena masalah hubungan sosial etnik tetap berkembang seiring perjalanan jaman.

Bandung, Desember 1995

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	i
SEKAPUR SIRIH	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Masalah	3
C. Tujuan	4
D. Ruang Lingkup	5
E. Prosedur dan Metodologi	8
BAB II LANDASAN TEORITIS	13
A. Suku Bangsa	13
B. Sistem Nilai Budaya Nasional	17
C. Kebudayaan Daerah	22
D. Integrasi Nasional	23
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Suku Bangsa "Asal"	27
B. Suku Bangsa "Pendatang"	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	59
A. Hasil Penelitian	59
1. Identitas Responden	59
2. Kelompok Sosial	62
3. Nilai Budaya	68
4. Integrasi	73
5. Pandangan tentang Hubungan dengan Kolompok Lain	76
6. Pengetahuan tentang Sistem Nilai Budaya Nasional	80
B. Analisis	83
1. Hubungan Sistem Nilai Budaya Suku Bangsa dengan Sistem Nilai Budaya Nasional	83
2. Potensi Penunjang Persatuan dan Kesatuan	97
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
 DAFTAR PUSTAKA	 106
LAMPIRAN	110

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Peta Propinsi DT I Jawa Barat	110
2. Peta Kotamadya DT II Bandung	111
3. Peta Kecamatan Bojongloa Kaler	112
4. Peta Kelurahan Sukaasih	113
5. Peta RW 05 Kelurahan Sukaasih	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu aspek dari Trilogi Pembangunan, menurut GBHN 1993, adalah stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, dan untuk mewujudkan kondisi tersebut diperlukan persatuan dan kesatuan bangsa yang kukuh berdasarkan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kebersamaan. Oleh karena itu, dalam proses pembangunan perlu dicegah sikap feodal, sikap eksklusif, dan faham ke-daerahan yang sempit serta pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan nilai budaya bangsa, melalui pengembangan kebudayaan nasional yang tetap berpijak pada akar budaya bangsa dan pembauran yang terarah. Secara jelas, GBHN mengungkapkan bahwa pembauran merupakan bagian dari proses pembudayaan bangsa yang harus dipacu ke arah yang positif dan harus dijiwai sikap mawas diri, tahu diri, tenggang rasa, solidaritas sosial-ekonomi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kebersamaan dan kesetiakawanan dalam upaya menunjukkan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, bangsa serta negara Indonesia. Penyelenggaraannya harus dapat mencegah dan menghilangkan melebar-

nya kesenjangan sosial-ekonomi dan sikap eksklusif serta harus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional (GBHN 1993).

Sementara itu, kenyataan sosial memperlihatkan situasi yang belum menggembirakan bagi pengukuhan persatuan dan kesatuan bangsa; masih terasa adanya pengkotakan golongan sosial atau terdapatnya hubungan sosial antargolongan yang dipengaruhi secara kental oleh semangat eksklusifisme kesukubangsaan, keagamaan, dan rasial. Salah satu contoh menurut Koentjaraningrat (1984 : 347) adalah masih terdapatnya gejala pembubuhan sejumlah ciri subjektif yang diberikan oleh warga satu suku bangsa kepada warga suku bangsa yang lain. Gambaran subjektif dari golongan manusia yang lain itu dalam ilmu-ilmu sosial disebut "Stereotipe" dan gambaran subjektif terhadap ciri-ciri suku bangsa lain secara khusus disebut "stereotipe etnik."

Koentjaraningrat, pada bagian buku yang sama mengungkapkan lebih lanjut bahwa walaupun di antara ciri-ciri penggambaran stereotipe etnik itu terdapat ciri-ciri positif (misalnya, orang Sunda itu ramah dan taat beragama), namun umumnya menggambarkan stereotipe yang negatif (misalnya, orang Batak itu kasar, orang Jawa itu lamban; dan orang Madura suka berkelahi). Hal tersebut menyebabkan gejala stereotipe etnik dapat dianggap sebagai penghambat dalam interaksi antarsukubangsa dan integrasi nasional karena sangat sulit untuk diubah secara rasional.

Perihal integrasi nasional di Indonesia telah sering ditelaah dalam berbagai forum ilmiah. Penelaah itu umumnya tidak lepas dari latar belakang ciri kemajemukan masyarakat Indonesia, yang harus tetap dalam persatuan dan kesatuan melalui sesanti atau prinsip ideal "Bhineka Tunggal Ika" sebagai pengikatnya. Walaupun di satu sisi kita bangga dengan "kemajemukan budaya" dari ratusan suku bangsa itu, tetapi di sisi yang lain kita juga prihatin mengingat berbagai masalah yang mungkin muncul. "Kemajemukan budaya" akan menyebabkan munculnya berbagai kemauan, harapan, dan cita-cita. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang ulet dan kerja keras untuk mempersatukan potensinya guna mencapai hasil optimal dalam pembangunan.

Pengalaman sejarah telah memberi makna tersendiri yang berharga dalam hal integrasi, antara lain : Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit telah mempersatukan negara-negara kecil di Nusantara yang sebelumnya saling bersaing; dan selama periode pergerakan (1920-an dan 1930-an), pemuda Indonesia telah menolak penonjolan isu kesukubangsaan dan memilih bahasa persatuan serta merintis pendidikan nasional. Selain pengalaman/sejarah bermakna positif tersebut, terdapat pula yang bermakna negatif dan patut menjadi bahan renungan seperti konflik-konflik berlatar belakang kedaerahan atau suku bangsa yang terjadi pada periode awal kemerdekaan. Bahan renungan lain adalah pengalaman negara-negara di dunia, baik negara sedang berkembang maupun negara tergolong maju, yang akhir-akhir ini mengalami disintegrasi karena konflik antarsuku bangsa di dalam negaranya.

Mengingat situasi dan kondisi yang tidak menggembirakan seperti terurai di atas, yaitu hubungan sosial antargolongan etnik/suku bangsa yang relatif belum harmonis dan adakalanya disertai kesenjangan tingkat ekonomi yang makin melebar akibat kurang ratanya penikmatan hasil pembangunan, maka kecemburuan sosial antarsuku bangsa akan makin meruncing. Pada akhirnya kondisi tersebut mungkin akan mencetuskan gerakan-gerakan yang akan mengacaukan stabilitas nasional.

Yang masih perlu dipertanyakan, sejauh mana masyarakat telah memahami hakikat dan unsur-unsur Bhineka Tunggal Ika. Kita pun harus berani mengakui bahwa kemajuan masyarakat Indonesia itu adalah bagaikan "belantara" yang mungkin tidak pernah selesai dan tuntas untuk dipahami. Namun bagaimana pun setiap upaya yang sungguh-sungguh untuk memperoleh pemahaman itu akan sangat berharga, dalam rangka tetap melanggengkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

B. Masalah

Masalah integrasi yang dihadapi dalam upaya membina persatuan dan kesatuan bangsa adalah masalah mengubah prasangka stereotipe etnik antarwarga suku bangsa yang berlainan, yang

dalam beberapa hal ada kalanya menimbulkan sikap tegang dan bermusuhan. Sikap seperti itu umumnya timbul apabila sejumlah warga dari suku bangsa berlainan tadi tinggal bersama di satu lokasi dan terpaksa bergaul secara intensif. Mengingat hal tersebut, diperlukan usaha untuk mengumpulkan dan menjangkau informasi yang akurat mengenai hubungan sosial antarsuku bangsa.

Meskipun penelitian mengenai integrasi, pembauran, ataupun hubungan antarsuku bangsa telah banyak dilakukan, namun masih sukar untuk menarik generalisasi yang mantap, apalagi untuk menerbitkan usulan-usulan jalan keluar yang bijaksana. Kondisi tersebut diakibatkan antara lain karena seiring dengan perjalanan waktu, masalah hubungan antarsuku bangsa juga berkembang dalam bentuk dan sifatnya, sehingga diperlukan pengumpulan data dan informasi yang lebih aktual melalui penelitian lapangan (*field work*). Dalam penelitian ini, pengetahuan (berupa data dan informasi) yang ingin diperoleh adalah berupa jawaban atas suatu pertanyaan pokok:

Bagaimana pengaruh kontak budaya dalam hubungan antar suku bangsa di suatu daerah terhadap pemahaman masyarakatnya mengenai sistem nilai budaya nasional?

Berdasarkan pokok masalah tersebut di atas, akan dikaji pola hubungan antarsuku bangsa dan pengaruhnya terhadap integrasi nasional dalam rangka menciptakan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Dengan demikian, perlu diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi kontak-kontak budaya yang terjadi melalui hubungan antarsuku bangsa daerah.
2. Bagaimana pengaruh bentuk hubungan antarsuku bangsa terhadap rasa persatuan dan kesatuan.
3. Faktor apa saja yang menunjang dan menghambat integrasi nasional.

C. Tujuan

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam mengenai hubungan sosial antarsuku

bangsa. Setelah dikaji, akan dicoba untuk merumuskan beberapa usulan kebijakan yang berguna bagi pengembangan kebudayaan nasional dan mendukung proses integrasi nasional dalam rangka pencapaian tujuan nasional untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan semangat gotong royong, kekeluargaan, dan kebersamaan.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui kondisi kontak-kontak budaya yang terjadi melalui hubungan antarsuku bangsa di daerah, khususnya daerah tempat pertemuan dan percampuran banyak suku bangsa dan budayanya;
2. Mengkaji pengaruh bentuk-bentuk hubungan antarsuku bangsa terhadap rasa persatuan dan kesatuan;
3. Menemukan faktor-faktor penunjang dan penghambat integrasi nasional, baik berupa kesadaran akan persatuan dan kesatuan, pembauran, maupun kesetiakawanan sosial nasional; dan
4. Memberi masukan mengenai langkah-langkah peningkatan jati diri dan kualitas kebangsaan di daerah-daerah.

D. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul penelitian, maka ruang lingkungannya adalah kondisi hubungan antarsuku bangsa dan pengaruhnya terhadap rasa persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa. Fokus telaah akan mencakup aspek-aspek : terdapatnya intensitas hubungan "keluar" yang terwujud pada satu suku bangsa; besar-kecilnya pandangan etnosentrisme; kesadaran sebagai bagian dari kesatuan sosial yang lebih besar; pemahaman tentang Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman pokok sistem nilai budaya nasional; dan pemahaman tentang pembangunan nasional terencana.

Adapun ruang lingkup wilayahnya meliputi Kelurahan Sukasih, Kecamatan Bojonglora Kaler, Kotamadya Bandung. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan terdapatnya beberapa golongan

etnik antara lain Jawa, Batak, Cina, dan Padang dengan kuantitas yang relatif banyak, serta Menado, Bugis-Makasar, dan Arab dalam jumlah yang relatif sedikit dengan Sunda yang merupakan suku bangsa (dan budaya) dominan. Sampel daerah penelitian dilakukan di RW 05 karena variasi etnik/suku bangsa dengan suku bangsa dominan tersebut, dianggap sesuai dengan tujuan dan sasaran penelitian yang ingin mengetahui kontak budaya antarsuku bangsa dan pengaruhnya terhadap sistem nilai budaya nasional.

Kelurahan Sukaasih meliputi areal seluas 92 Ha yang terdiri atas 68 RT (Rukun Tetangga), 10 RW (Rukun Warga), dan 3 dusun atau lingkungan. Letaknya di bagian barat kawasan Kota Bandung dengan jarak 5,5 km dari pusat pemerintahan Propinsi DT I Jawa Barat. Sedangkan jarak dari pusat pemerintahan Kotamadya DT II Bandung sekitar 5 km, dan jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan Bojongloa Kaler sekitar 1 km. Hubungan dengan tempat lain dapat dicapai dengan mudah karena didukung sarana jalan yang sudah membaik dan beroperasinya kendaraan umum. Selain itu hubungan sosial melalui pos dan telekomunikasi juga mudah dilakukan karena sarana dan prasarananya tersedia relatif lengkap.

Kondisi geografis Kelurahan Sukaasih berupa dataran yang sebagian besar wilayahnya digunakan untuk perumahan dan pekarangan (84 Ha). Lahan pertanian berupa sawah sederhana hanya terdapat seluas 1 Ha. Selain untuk dua bagian di atas, wilayah kelurahan digunakan juga untuk makam umum seluas 0,5 Ha, dan lapangan seluas 6,5 Ha. Dengan ketinggian antara 600 - 700 meter di atas permukaan air laut, kelurahan ini beriklim tropis dan dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 1.300 sampai dengan 3.500 mm/tahun. Suhu rata-rata berkisar antara 19°C sampai 24°C dengan penyimpangan harian dapat mencapai 5°C, serta kelembaban udara bervariasi antara 78% pada musim hujan dan 70% pada musim kemarau.

Pola pemukiman masyarakat cenderung menunjukkan pola berderet berlapis, berkelompok mengikuti alur jalan desa atau jalan raya. Walaupun pola kampung itu tampak sudah tidak begitu teratur, masih tampak bahwa bentuk tersebut merupakan perkembangan

dari pola linier. Bentuk-bentuk yang berubah tidak teratur tersebut, disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang kian membengkak. Di RW 05, yang merupakan sampel penelitian, jarak antarrumah sangat sempit dan beberapa rumah tidak memiliki halaman, bahkan ada dinding rumah yang berbatasan langsung dengan jalan. Jalan kampung berupa gang dengan lebar antara 1 sampai 2 meter, terbuat dari batu atau plesteran semen.

Etnik Cina umumnya menempati perumahan di sepanjang jalan, dengan rumah yang berpagar tinggi dan sebagian besar bermatapencaharian sebagai pedagang. Etnik Jawa, Batak, dan Padang/Minang, hidup berkelompok dan setiap kelompok umumnya melakukan usaha sejenis, seperti tukang jamu, tukang bakso, sopir, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya. Sedangkan etnik Manado, Bugis-Makasar, dan Arab yang jumlahnya relatif sedikit, menyebar dan berbaur dengan warga lainnya.

Jumlah penduduk pada tahun 1995 menurut data yang ada di kantor Kelurahan Sukaasih berjumlah 15.160 jiwa, terdiri atas 7.575 laki-laki dan 7585 perempuan dengan kepala keluarga sebanyak 3.133. Kepadatan penduduknya sekitar 1.640 jiwa/km persegi. Penduduk yang berusia antara 15 - 55 tahun (produktif) merupakan kelompok usia terbanyak dan perbandingannya dengan kelompok usia nonproduktif adalah 2:1, berarti 2 orang penduduk berusia produktif menanggung 1 orang penduduk nonproduktif.

Mobilitas sosialnya relatif tinggi, tercatat misalnya penduduk yang pindah sebanyak 587 orang dan datang 493 orang selama semester pertama (antara bulan Januari sampai Juni 1995). Pada jangka waktu yang sama, bayi yang lahir sebanyak 104 orang dan mati 36 orang. Menurut kewarganegaraan, tercatat 15.118 Warga Negara Indonesia dan 42 Warga Negara Asing.

Berdasarkan mata pencaharian, penduduk Kelurahan Sukaasih berusaha di bidang perdagangan (34,6%), buruh (30,5%), pegawai swasta (28,3%), industri (kecil, kerajinan tangan, sedang dan besar) sebanyak 0,6%, petani dan peternak (0,4%), dan jasa (5,6%). Penduduk yang bermatapencaharian pokok di bidang jasa, antara lain dokter, bidan, perawat, guru/pegawai Negeri Sipil, ABRI, pensiunan, dukun bayi, sopir, tukang cukur, tukang jahit, tukang kayu, dan ojek.

Agama Islam dianut oleh sebagian besar penduduk (14.038 orang). Sedangkan penganut agama lain, antara lain Protestan (841 orang), Katholik (156 orang), dan Budha (125 orang). Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, toleransi antarpenganut agama cukup tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, masih dijumpai adanya keakraban di antara warga; saling menyapa, saling membantu, dan bergotong-royong/kerja bakti, terutama antarpenduduk yang bertetangga dekat atau satu kerabat.

E. Prosedur dan Metodologi

Untuk mencapai sasaran dan tujuan penelitian yaitu menjawab permasalahan pokok penelitian dan mendapatkan data yang relevan serta pelaksanaan penelitian yang terarah dan efektif, maka digunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode Survei, yang digunakan untuk mengungkapkan fakta-fakta berdasarkan fenomena-fenomena sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian, selanjutnya diformulasikan atau dideskripsikan.
2. Metode Deskriptif, yang digunakan untuk memperoleh data se-luas-luasnya dalam rangka mempelajari kondisi-kondisi sosial yang berhubungan dengan interaksi sosial antarsuku bangsa.

Dasar dari metode survei dan deskripsi di atas adalah studi kasus, dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat mengenai hakikat hubungan sosial yang terwujud di antara golongan-golongan etnik/suku bangsa yang berbeda sesuai dengan kondisi yang berlaku di lokasi penelitian (mempertahankan objek penelitian), sehingga data yang diperoleh menjadi utuh dan lengkap atau merupakan satu kesatuan yang terintegrasi.

Untuk memperoleh data dengan metode seperti terurai di atas, yang pada hakikatnya merupakan data yang bersifat kualitatif, maka digunakan teknik :

1. **Observasi**, yang dilakukan dengan maksud memperoleh data dengan cara mengamati langsung kehidupan masyarakat atau aktivitas anggota-anggota masyarakat dalam kehidupan sosial.

Data yang diperoleh, selain menunjukkan kenyataan yang sewajarnya atau apa adanya juga dapat melengkapi data yang tidak terungkap melalui wawancara.

2. Wawancara, yang dimaksudkan untuk memperoleh data secara langsung dari individu yang terlibat dalam seluruh aspek kehidupan masyarakatnya sehingga data tersebut memiliki nilai keabsahan yang cukup tinggi dan dapat dipercaya.

Selain kedua teknik pengumpulan data tersebut, dilakukan pula studi pustaka yang menunjang pengetahuan teoritis dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Studi pustaka digunakan juga untuk memperoleh data yang bersifat kuantitatif dari data sekunder yang terdapat di lembaga pemerintahan (kelurahan dan kecamatan) serta berbagai hasil penelitian mengenai kebudayaan daerah, untuk melengkapi data yang bersifat kualitatif.

Responden ditentukan secara purposif. Walaupun demikian, penilaian dan pertimbangan peneliti tidak lepas dari saran, pengetahuan, dan informasi yang diberikan tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh formal maupun tokoh nonformal. Responden adalah penduduk yang mengetahui dengan baik pola hubungan sosial antarsuku bangsa dan bertempat tinggal di lokasi penelitian. Sekurang-kurangnya dipilih 5 responden yang berasal dari golongan etnik/suku bangsa yang berbeda, yang akan diwawancarai secara intensif. Selain itu akan diwawancarai juga *key informant* (informan utama/kunci) yang terdiri atas orang-orang yang dianggap penduduk setempat atau warga suatu golongan etnik/sukubangsa tertentu memiliki pengetahuan luas mengenai kebudayaan golongan etniknyanya atau memiliki pengetahuan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik wilayah tempat tinggalnya maupun secara regional dan nasional.

Proses penelitian dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

Tahap Persiapan,

dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan September 1995 dengan membahas TOR yang diajukan oleh Proyek P2NB

Pusat (Direktorat Jenderal Kebudayaan) sehingga menghasilkan kerangka dasar penulisan. Kemudian dilakukan studi kepustakaan untuk memperoleh masukan mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan, teori yang digunakan, serta penyusunan kerangka berpikir. Selanjutnya membuat rancangan penelitian yang dimulai dengan pemilihan teori-teori, metode, serta teknik penelitian yang akan digunakan.

Tahap Penelitian Lapangan,

dilakukan pada bulan Oktober 1995 selama 1 bulan. Oleh karena lokasi penelitian terletak di kawasan kota Bandung (lihat gambaran umum lokasi penelitian dan dasar pertimbangannya) dan mudah dicapai, maka pengumpulan data dilakukan secara intensif untuk memperoleh persepsi yang utuh mengenai gejala yang ditemukan di lapangan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dengan teknik observasi dan wawancara mendalam terhadap suku bangsa/kelompok etnik yang dijadikan sampel penelitian. Sampel suku bangsa/kelompok etnik ditentukan atas dasar kuantitasnya. Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya di lokasi penelitian terdapat tujuh suku bangsa/kelompok etnik dengan satu suku bangsa asal/dominan. Kedelapan suku bangsa tersebut adalah suku bangsa Jawa (11,4%), Cina (9,2%), Batak (4,6%), Padang/Minang (3,7%), Manado (0,5%), Bugis-Makasar (0,7%), Arab (0,3%), dan Sunda (69,6%) sebagai suku bangsa asal. Atas dasar kuantitas tersebut, maka kelompok etnik yang dijadikan sampel dan di wawancarai adalah suku bangsa Jawa, Cina, Batak, Padang/Minang, dan Sunda.

Tahap Penulisan Laporan,

dilakukan pada bulan Nopember dan Desember 1995. Pengolahan data lapangan dilakukan sejak tahap penelitian lapangan. Oleh karena penelitian ini bersifat kualitatif maka mengadakan seleksi dan membandingkan data adalah kegiatan yang sangat penting dalam usaha mempertimbangkan tingkat validitas data.

Data yang terkumpul dari sumber primer maupun sumber sekunder, kemudian diintegrasikan. Selanjutnya data diorganisasikan menurut kerangka laporan, sehingga siap untuk ditulis dan disajikan ke dalam laporan hasil penelitian.

Laporan penelitian disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

Bagian Pendahuluan,

menguraikan latar belakang, masalah, ruang lingkup, serta prosedur, dan metodologi. Dari uraian tersebut akan diperoleh gambaran singkat mengenai keseluruhan isi laporan penelitian dan lokasi penelitian.

Bagian Konsep-konsep,

menjelaskan konsep-konsep dan teori mengenai suku bangsa, sistem nilai budaya nasional, kebudayaan daerah, dan integrasi nasional. Bagian ini mengantarkan pada pemahaman mengenai aspek-aspek yang diteliti dan menjadi acuan untuk mengkaji temuan di lapangan.

Bagian Tinjauan Pustaka,

berisi uraian tentang suku bangsa "asal" dan suku bangsa "pendatang". Dari uraian tersebut akan diperoleh gambaran umum mengenai masyarakat dan kebudayaan suku bangsa yang dijadikan sampel penelitian, sejarah lokasi penelitian, terbentuknya sebuah kampung/pemukiman, serta proses masuknya kaum pendatang beserta karakteristiknya. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang kemudian dikonfirmasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang paham dan mengetahui sejarah daerahnya.

Bagian Hasil Penelitian dan Analisis,

berisi data hasil penelitian dan analisis. Bagian pertama, yaitu data hasil penelitian merupakan uraian deskriptif mengenai kelompok sosial, nilai budaya, integrasi, hubungan dengan kelompok lain, dan pengetahuan tentang sistem nilai budaya nasional dari beberapa etnik atau suku bangsa yang menjadi fokus penelitian. Bagian kedua, yaitu analisis, merupakan kajian dari data yang diperoleh dengan acuan teori/konsep yang digunakan, terdiri atas uraian mengenai kaitan sistem nilai budaya suku bangsa dengan sistem nilai budaya nasional, serta potensi penunjang persatuan dan kesatuan.

Bagian akhir tulisan akan berisi uraian mengenai kesimpulan yang merupakan rangkuman keseluruhan isi laporan penelitian dan beberapa implikasi kebijakan, serta saran-saran berupa model atau format tentang strategi pembinaan dan pengembangan sistem nilai budaya nasional. Selain itu, bagian akhir tulisan akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran.

Secara umum, penelitian berjalan lancar; setiap responden dan informan yang ditemui berusaha menjawab setiap pertanyaan. Salah satu kesulitan yang dihadapi adalah "keramahan" para pejabat kelurahan ketua RT/RW yang selalu mengantar ke tempat tokoh-tokoh masyarakat, responden, atau informan, sehingga dalam wawancara yang dilakukan mempunyai kecenderungan mengeluarkan jawaban atau ucapan yang bersifat normatif dan sloganistik dalam upaya untuk selalu tampak mendukung program-program pemerintah. Untuk memperoleh data yang lebih akurat tentang hal-hal yang mungkin disembunyikan pada saat diwawancarai karena ada pejabat/petugas, adakalanya dilakukan wawancara ulang oleh peneliti tanpa disertai petugas dengan alasan "sudah saling mengenal."

Kesulitan lainnya adalah tidak adanya data di kantor kelurahan mengenai penggolongan masyarakat menurut daerah asal atau suku bangsanya. Untuk mengatasi masalah tersebut, tim peneliti membuat peta dengan komposisi golongan etnik berdasarkan tempat tinggalnya di daerah sampel.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

Penelitian mengenai integrasi dalam hubungan antarsuku bangsa dan sistem nilai budaya nasional ini, menggunakan logika induktif yang konsekuensinya adalah harus dimulai dengan pengumpulan data di lapangan untuk menemukan pola umum interaksi sosial antara berbagai golongan etnik/suku bangsa beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Uraian tersebut menyiratkan bahwa konsep dan data dianggap dua fenomena yang saling berkaitan. Dengan demikian, pemahaman terhadap hakikat dari konsep merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pengumpulan data. Dengan perumusan konsep yang tepat, peneliti akan dibimbing untuk memperoleh data yang relevan dan melakukan analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian dan pengkajiannya ini, konsep diasumsikan sebagai pendapat atau telaahan pakar mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

Di bawah ini akan diuraikan beberapa konsep utama yang akan dijadikan acuan dan rumusan untuk kepentingan operasional. Konsep-konsep tersebut adalah konsep mengenai suku bangsa, sistem nilai budaya nasional, kebudayaan daerah, dan integrasi nasional.

A. Suku Bangsa

Suku bangsa menurut Melalatoa (1995 : 2), adalah kelompok sosial atau kolektifa yang sadar memiliki suatu kebudayaan yang

sering ditandai dengan adanya kesatuan bahasa. Sejalan dengan itu, Koentjaraningrat (1985 : 264) menjelaskan bahwa konsep yang tercakup dalam istilah suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan suatu kebudayaan, sedangkan kesadaran dan identitas tadi sering kali (tetapi tidak selalu) dikuatkan oleh kesatuan bahasa juga.

Dalam penelitian ini, istilah suku bangsa diasumsikan sama dengan kelompok etnik. Parsudi Suparlan (1985 : 4) mengungkapkan bahwa penggunaan istilah etnik mengacu pada suatu kerangka dasar, di mana yang menjadi landasan bagi perwujudan adanya etnik adalah pada adanya pengorganisasian sosial, yang didapatkan oleh para pelakunya secara *skeptif*, untuk keperluan interaksi sosial. Dengan demikian, maka penekanan dari pengertian etnik terletak pada pengorganisasian sosialnya, sedangkan asal mula/asal negara/atau pun keaslian dari para pelakunya hanyalah salah satu referensi atau kerangka acuan bagi pengorganisasian identitas sosial tersebut. Secara konseptual, istilah etnik ini juga diberlakukan juga untuk golongan suku-suku bangsa asli Indonesia; sehingga proses interaksi sosial dan perwujudan pembauran (asimilasi) dapat secara konseptual dilihat sebagai suatu proses hubungan yang masing-masing mempunyai kedudukan yang sama.

Dalam buku-buku antropologi (misalnya Narroll, 1964), suku bangsa atau kelompok etnik umumnya dikenal sebagai suatu populasi yang :

1. Secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan.
2. Mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya.
3. Membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri.
4. Menentukan ciri kelompok sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain.

Definisi yang ideal memang tidak berbeda jauh dengan yang umum dikenal, yaitu bahwa kelompok etnik atau suku bangsa = budaya = bahasa; sedangkan masyarakat = suatu unit yang hidup terpisah dari unit lain. Dengan sedikit modifikasi, pola ini mendekati

kondisi etnografis empiris yang ada, sehingga dapat dipakai oleh para antropolog dalam penelitiannya. Yang paling menentukan adalah pengambilan asumsi bahwa mempertahankan batas etnik ini tidak penting, karena hal ini akan terjadi dengan sendirinya akibat adanya faktor-faktor isolasi seperti : perbedaan ras, perbedaan budaya, perbedaan sosial, dan perbedaan bahasa (Barth, 1988 : 11 - 12).

Barth menunjukkan bahwa batas-batas etnik itu tetap ada walaupun terjadi proses penetrasi kebudayaan di antara dua kelompok etnik yang berbeda, dan bahwa perbedaan etnik secara kategorikal tidak tergantung pada ada atau tidak adanya kontak secara fisik di antara kelompok-kelompok etnik. Di samping itu, Barth juga menunjukkan bahwa perbedaan-perbedaan etnik tidak bergantung pada tidak ada atau diterimanya interaksi sosial di antara kelompok-kelompok etnik; tetapi justru adanya pembedaan-pembedaan etnik ini seringkali menjadi landasan bagi terciptanya sistem-sistem sosial yang merangkum perbedaan-perbedaan tersebut. Ini menunjukkan bahwa perbedaan-perbedaan kebudayaan dapat tetap selalu ada walaupun kontak antarsuku bangsa/etnik dan saling ketergantungan di antara kelompok-kelompok itu terjadi.

Dari beberapa konsep tentang suku bangsa atau kelompok etnik yang telah dikemukakan, belum tampak adanya korelasi antara suku bangsa dengan terbentuknya sebuah negara karena kedua konsep itu hanya menjelaskan tentang suku bangsa saja. Sedangkan yang dibutuhkan dalam penelitian ini ialah korelasi antara suku bangsa dengan terbentuknya suatu negara. Untuk itu kiranya perlu diketengahkan konsep *revolusi integratif* dari Geertz. Konsep Geertz ini ditulis sebagai tanggapannya atas gejolak politik dalam tahun 50-an yang melanda bangsa-bangsa baru merdeka seperti Indonesia, Malaysia, Burma, India, Lebanon, Maroko dan Nigeria. Negara-negara itu (*nation-nation*) menghadapi masalah regionalisme, persekutuan dan pertikaian antarsuku bangsa, serta paham kedaerahan di dalam upaya mereka membangun bangsa (*national-building*). Geertz memulai studi dengan suatu pertanyaan, apakah ada suatu fenomena umum yang dapat digeneralisir bagi masyarakat-masyarakat baru itu? Ia menganggapnya, ada dan mengkonseptualisasikannya sebagai suatu revolusi integratif yang terdiri atas

dua kekuatan utama yaitu rasa primordial (*Primordial Sentiment*) dan kesadaran politik (*civil politics*).

Geertz merumuskan konsep revolusi integratif sebagai :

Berhimpunnya kelompok-kelompok primordial yang tradisional dan selama ini berdiri sendiri, ke dalam unit kemasyarakatan yang lebih besar dan tersebar, yang kerangka acuannya bukan lagi sebatas daerah lokal melainkan lingkup bangsa - dalam pengertian seluruh masyarakat di bawah pengayoman suatu pemerintahan baru (Geertz, 1973 : 106).

Kelompok primordial sebagai unsur utama proses tersebut merupakan sebuah unit sosial yang hubungan antaranggotanya didasari oleh ikatan primordial. Adapun ikatan primordial menurut Geertz ialah :

Sesuatu yang berakar pada hal-hal yang selalu ada ((givens) dalam kedirian masyarakat : rasa kesamaan dan lahirnya seseorang dalam komunitas keagamaan tertentu, berbicara dalam satu bahasa, dan menaati praktek-praktek sosial. Kesamaan pertalian darah, cara bertutur, adat kebiasaan dan sebagainya, dianggap mengandung daya paksa, yang timbul dari dalam keberadaannya sendiri, yang kuat dan tidak terperikan (Geertz, 1973 : 259)

Dengan demikian, sesuatu yang primordial merupakan realitas sosial yang terjadi secara alamiah, dan keterikatan yang bersumber darinya memiliki semacam kekuatan tenaga dalam. Kelompok primordial oleh karenanya merupakan suatu unit kehidupan bersama di mana anggotanya memiliki hubungan alami dan kewajiban timbal balik antarsesamanya baik atas dasar pertalian darah, kesamaan bahasa dan/atau adat istiadat. Ikatan primordial ini oleh Geertz diletakkan berlawanan dengan kesadaran kewarganegaraan (*civic sense*), seperti dijelaskannya :

Apa yang terkandung dalam kesadaran kewarganegaraan (civic sense) lebih dari apapun adalah adanya suatu konsep yang pasti tentang "publik" sebagai suatu badan yang terpisah

dan jelas beserta gagasan tentang kepentingan umum yang berdiri sendiri dan kadang-kadang bertolak belakang dengan kepentingan (interest) pribadi maupun dengan berbagai macam kepentingan bersama (Geertz, 1973 : 309).

Berdasarkan kesadaran kewarganegaraan (*civic sense*) ini muncullah perilaku politik yang lebih rasional dan modern yang dilandasi perhitungan kepentingan. Oleh sebab itu, revolusi integratif adalah suatu proses di mana kelompok primordial yang muncul secara alami menjadi kesatuan politik yang lebih besar dan bercabang (*diffused*) pengorganisasiannya.

B. Sistem Nilai Budaya Nasional

Usaha untuk membina persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai suku bangsa, menyangkut masalah pengembangan sistem nilai budaya nasional. Masalah tersebut muncul karena sebuah negara berkembang yang multietnik seperti Indonesia, memerlukan suatu acuan untuk mengintensifkan perasaan identitas nasional dan solidaritas nasional di antara warga negara.

Mengungkap mengenai sistem nilai budaya nasional tidak lepas dari masyarakat pendukung, yaitu masyarakat Indonesia yang majemuk. Oleh karena itu untuk menuju satu kesamaan pengertian pokok mengenai hal tersebut, akan diuraikan lebih dahulu pengertian masyarakat dan kebudayaan secara singkat.

R. Firth dalam '*Elements of Social Organization*' yang dikutip oleh Prof. Dr. Soeroso, MA. (1984 : 7) mengungkapkan masyarakat dan kebudayaan sebagai berikut : Apabila masyarakat dimengerti sebagai suatu kelompok individu yang terorganisasikan menurut suatu cara hidup, dan apabila masyarakat dimengerti sebagai suatu *agregat* hubungan-hubungan sosial, kebudayaan adalah isi dari hubungan-hubungan itu. Pengertian kebudayaan menekankan pada komponen sumber-sumber yang terakumulasikan, baik yang bersifat material maupun immaterial, yang diwarisi, dipergunakan, diubah, ditambah, dan dikembangkan oleh sekelompok manusia.

Konsep yang klasik tentang kebudayaan dari E.B. Taylor adalah "..... *complex whole which include knowledge, belief, arts, morals, laws, custom, and other capabilities and habits aquired by man as member of society* "1874 : 1). Pengertian tersebut mengemukakan keseluruhan kompleks pengetahuan manusia dan kemampuan lainnya yang diperlukan manusia sebagai warga suatu masyarakat. Pola tingkah laku dan tindakan suatu warga masyarakat juga disebut kebudayaan, seperti dikemukakan oleh Linton "..... *the configuration of learned behavior and results of behavior whose component elements are shared and transmitted by members of a particular society*" (1945 : 32). Kebudayaan juga merupakan proses sosial, atau "*learn ways of thinking, feeling, and acting*" (Radcliffe-Brown, 1965 : 5). Dalam tradisi ilmiah Amerika misalnya, konsep kebudayaan (culture) ialah " *transmitted and created content and patterns of value, ideas and other symbolic-meaningful systems as factors in the shaping of human behavior and the artifacts produced through behavior*" (Kroeber, Parsons, 1958 : 583). Dari beberapa contoh tentang makna konsep kebudayaan itu jelas bahwa akan terdapat berbagai pola tingkah laku dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu berupa pola nilai, gagasan ataupun sistem simbolik yang penuh makna.

Uraian di atas mengungkapkan bahwa *kebudayaan* atau *budaya* adalah sistem gagasan yang menjadi pedoman bertingkah laku dalam kehidupan suatu masyarakat. Sistem gagasan ini terdiri atas simbol-simbol atau unsur-unsur : sistem kepercayaan, sistem pengetahuan, sistem nilai dan norma, dan simbol perasaan, yang keseluruhannya disebut juga *sistem budaya (cultural system)*. Nilai budaya adalah konsepsi abstrak mengenai masalah dasar yang amat penting dan bernilai dalam kehidupan masyarakat manusia. Suatu sistem nilai budaya terdiri atas beberapa satuan unsur, yaitu nilai religi, nilai pengetahuan, nilai sosial, nilai ekonomi, dan nilai seni. Sistem budaya sampai pada nilai-nilai tadi ada dalam kebudayaan suku bangsa dan kebudayaan satu bangsa.

Sistem nilai budaya menurut Koentjaraningrat (1974 : 25) terdiri atas konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka

anggap amat bernilai dalam hidup. Oleh sebab itu, suatu nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Mengenai ruang lingkup sistem budaya, lebih lanjut dijelaskan oleh Koentjaraningrat dengan kerangka Kluckhohn (lihat *Variations in Value Orientation* (1961) yang disusun oleh Florence Kluckhohn dan F.L. Strodbeck). Menurut kerangka ini, semua sistem nilai budaya di dunia berisi 5 masalah pokok kehidupan manusia, yaitu :

- (1) Masalah hakekat hidup dari manusia.
- (2) Masalah hakekat dari karya manusia.
- (3) Masalah hakekat dari kedudukan manusia dalam ruang waktu.
- (4) Masalah hakekat dari kedudukan manusia dengan alam sekitar, dan
- (5) Masalah hakekat dari hubungan manusia dengan sesamanya.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem nilai budaya dapat dikatakan sebagai filsafat hidup. Bertitik tolak dari sistem nilai budaya sebagai filsafat hidup, maka dapatlah dianalogikan bahwa sistem nilai budaya nasional adalah pandangan hidup nasional, yaitu Pancasila. Sebagai pandangan hidup (*Weltanschauung*), Pancasila merupakan nilai tertinggi yang dijadikan pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, dalam GBHN (misalnya GBHN 1993) yang menjadi pedoman pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, nilai-nilai itu tampak telah dirinci. Sistem nilai budaya nasional itu biasa juga disebut "nilai-nilai luhur bangsa" yang terdiri atas nilai-nilai : taqwa, musyawarah, gotong-royong, tertib dan disiplin, tenggang rasa, harga diri, setia kawan, kerja keras, kompetisi, dan lain-lain.

Melalui proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah menentukan pilihan eksistensinya yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1995 itu tersirat dan tersurat cita-cita nasional yang menjawab secara mendasar berbagai pertanyaan tentang cita-cita negara, masyarakat, kehidupan kebang-

saan, cita-cita tentang sistem politik, sistem ekonomi, sistem hukum, dan cita-cita kebudayaan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat yang berbunyi :

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Mahaesa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dibangun di dalam haribaan nilai-nilai luhur dan sifat-sifat dasar yang mulia yang melekat di dalam eksistensi manusia. Itulah yang disebut dengan Demokrasi Pancasila, suatu demokrasi yang di dalamnya tercakup demokrasi politik, ekosistem, tata kemasyarakatan, dan demokrasi dalam pertumbuhan kultural.

Berdasarkan isi dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini maka, di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 dinyatakan politik Kebudayaan Indonesia dengan "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia". Ini berarti, Indonesia menentukan sikap dan posisinya terhadap perkembangan kultural dunia serta membuat pilihan mengenai arah perkembangan kebudayaan Indonesia seperti yang terurai dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut :

Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi-daya rakyat Indonesia seluruhnya.

Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Mengacu pada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 di atas jelas bahwa Kebudayaan Nasional Indonesia harus berakar pada kebudayaan-kebudayaan daerah, artinya bersandar pada kebudayaan yang dimiliki, didukung, dan dikembangkan oleh setiap suku bangsa yang ada di seluruh Indonesia. Meskipun begitu, kebudayaan nasional bukanlah perjumlahan dari seluruh kebudayaan yang berkembang di daerah, hanya kebudayaan daerah yang merupakan puncak-puncaknya di daerah-daerah itulah yang menjadi unsur kebudayaan nasional (Suhandi, 1988 : 25). Lebih lanjut Koentjaraningrat (1974 : 108 - 110) mengemukakan suatu konsep yang memuat tiga macam persyaratan yang harus dipunyai oleh unsur kebudayaan daerah yang akan diangkat menjadi unsur kebudayaan nasional, yaitu :

- (1) Harus memberikan identitas kepada warga negara pendukung kebudayaan itu,
- (2) Harus dapat menimbulkan perasaan bangga kepada para pendukungnya,
- (3) Harus tinggi mutunya.

Dengan demikian, sistem nilai budaya nasional mencerminkan unsur-unsur kepribadian yang bersifat umum dan dimiliki oleh setiap suku bangsa di Indonesia. Unsur-unsur kepribadian yang bersifat umum itu membentuk konfigurasi yang terintegrasi dan disebut sebagai *communal personality, basic personality structure*, atau *national character* (Suhandi, 1988 : 43).

C. Kebudayaan Daerah

Kebudayaan nasional Indonesia yang berkembang sekarang, sesungguhnya merupakan hasil proses perkembangan bertahun-tahun dari kebudayaan suku-suku bangsa (kelompok-kelompok masyarakat) yang berdiam di seluruh tanah air yang kini terhimpun membentuk bangsa (nation) Indonesia. Dari sudut ini, apa yang disebut kebudayaan nasional ialah kebudayaan yang didasarkan atas kebudayaan-kebudayaan daerah yang ada di seluruh wilayah negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 32 UUD 1945 : "*Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa*" Lebih lanjut, GBHN 1993 menegaskan : "*Dalam mengembangkan kebudayaan bangsa perlu ditumbuhkan kemampuan masyarakat untuk pemahaman nilai budaya daerah yang luhur dan beradab.*" Yang dimaksud budaya daerah di atas adalah budaya suku bangsa itu sendiri (TOR 1995/1996).

Mengacu pada uraian di atas, untuk mempermudah kajian istilah kebudayaan daerah dalam penelitian ini diberi pengertian sama dengan kebudayaan kelompok etnik atau suku bangsa. Dengan demikian, kebudayaan daerah dalam wujud nyata adalah kebudayaan Jawa, Kebudayaan Batak, Kebudayaan Sunda, dan lain-lain.

Parsudi Suparlan (1989) menyatakan bahwa perbedaan antara kebudayaan-kebudayaan suku bangsa di Indonesia pada hakikatnya disebabkan oleh perbedaan sejarah perkembangan kebudayaannya dan oleh adaptasi terhadap lingkungannya masing-masing. Akan tetapi tidak dipungkiri bahwa konfigurasi dari masing-masing kebudayaan suku bangsa tersebut memperlihatkan adanya prinsip-prinsip kesamaan. Hal itulah yang disebut dengan puncak-puncak kebudayaan dan menjadi landasan bagi terciptanya kebudayaan nasional Indonesia.

Dengan demikian, pengembangan kebudayaan nasional sesungguhnya beranjak dari arah pengembangan kebudayaan-kebudayaan daerah. Pendekatan bagi penyusunan konsepsi pengembangan kebudayaan nasional, bagaimana pun harus memperhatikan kedudukan dan peranan kebudayaan daerah. Pertimbangannya bukan saja karena kebudayaan nasional itu berakar dan berkembang

dari berbagai kebudayaan daerah, tetapi juga sebagai strategi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di seluruh daerah dalam kaitan dengan hakikat pembangunan nasional, yaitu membangun manusia seutuhnya yang berkonotasi manusia berkepribadian Indonesia. Ciri utama identitas Kepribadian Indonesia adalah kebudayaan nasional Indonesia, dan kebudayaan nasional Indonesia bersumber dari kebudayaan yang hidup subur di daerah-daerah Indonesia.

Dilihat dari fungsinya, kebudayaan daerah menjadi kerangka acuan dalam kehidupan masyarakat pendukungnya, sedangkan kebudayaan nasional menjadi kerangka acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun terdapat perbedaan, kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional tidak dapat berpisah atau dipisahkan. Keduanya saling mempengaruhi sedemikian rupa, sehingga dapat dikatakan antara keduanya terjadi/berlangsung hubungan-hubungan *sibernetik*. Hubungan itu antara lain tampak pada peran kebudayaan daerah dalam mengembangkan dan menyebarkan kebudayaan nasional. Peranan kebudayaan daerah dalam pengembangan kebudayaan, berlangsung dengan memasok kekayaan kebudayaan yang diperlukan oleh kebudayaan nasional. Memasok dalam pengertian memperkaya sekaligus menangkal pengaruh luar yang tidak menguntungkan bagi kehidupan nasional. Ada pun peranan kebudayaan daerah dalam penyebaran, adalah menciptakan iklim dan suasana (kondisi) yang menunjang penyebaran sekaligus menerjemahkan kebudayaan nasional sedemikian rupa, sehingga mudah diterima dan ditanggapi masyarakat.

D. Integrasi Nasional

Perihal integrasi nasional di Indonesia telah sering ditelaah dalam berbagai forum ilmiah. Penelaahan itu umumnya tidak lepas dari latar belakang ciri pluralisme, terutama pluralisme dalam etnisitasnya. Di satu pihak, pluralisme tersebut merupakan sumber kekuatan bangsa dan dapat menjadi sumber daya kultural dalam mengembangkan kebudayaan nasional, di pihak lain, juga merupakan sumber kelemahan bangsa karena keanekaragaman tersebut

mengandung potensi konflik yang dapat menghambat, bahkan mengancam proses integrasi nasional.

Sejak kelahirannya hingga saat ini, bangsa dan negara Republik Indonesia telah mampu dan berhasil menyelesaikan konflik berupa ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan untuk mempertahankan dan menegakkan jati diri dan integritasnya. Sebagai bangsa yang besar dan majemuk, negara Indonesia dianggap beruntung karena hubungan antara pemerintah dengan rakyat, antarsuku bangsa, dan antargolongan relatif lebih baik apabila dibandingkan dengan beberapa negara lain yang juga memiliki masyarakat majemuk.

Beberapa negara mengalami proses disintegrasi sistem politik, seperti Uni Soviet, dan negara-negara Eropa Timur. Di pihak lain, disintegritas tersebut merupakan gejala yang *paradoks*, yaitu kecenderungan kembali ke unit-unit yang kecil berdasarkan nasionalisme, etnisitas atau etnonasionalisme. Ideologi komunisme selama 70 tahun ternyata tidak mampu menghapus etnisitas dan nasionalisme.

Walaupun di Indonesia tidak sampai terjadi pergolakan akibat pluralisme masyarakatnya, bukan berarti bahwa ancaman konflik telah berakhir atau tidak akan muncul kembali, karena potensi itu akan tetap ada dan tak bisa diabaikan begitu saja. Oleh karena itu etnisitas sebagai realitas sosial perlu diberi fungsi untuk memperkaya kebudayaan nasional serta perkembangannya yang cenderung menyempit dan negatif perlu segera ditangkal dan diarahkan agar tidak menghambat integrasi nasional.

Pengertian integrasi nasional, dilihat dari aspek budaya, merupakan proses penyesuaian dalam membentuk kesatuan solidaritas kebangsaan, kesatuan itu beranggotakan antara lain suku bangsa yang berbeda budaya, yang mencapai keserasian dalam kehidupan masyarakat, dengan sejumlah peranan dan kedudukan. Anggota masyarakat itu tidak harus terlepas dari anggota nasional lama tadi (Bachtiar, 1985 dan 1994). Jika orang Minang misalnya, mengembara di berbagai tempat di Indonesia, ia tetap orang Minang manakala menjalankan kebiasaan hidup seperti halnya kebiasaan Minangkabau. Melalui relasi atau interaksi antaretnik dengan etnik

dominan di wilayah itu, kemudian masing-masing kebudayaan tersebut akan memperoleh masukan unsur-unsur berharga yang dapat diserap menjadi bagian dari budayanya. Dengan demikian, terjadi penyesuaian dan selanjutnya memunculkan penyesuaian tata nilai menuju keserasian sosial yang tertib antargolongan etnik.

Stereotip dan prasangka terhadap golongan etnik lainnya yang ada di wilayah setempat, masih tetap akan muncul dalam interaksi sosial seperti di atas walau dalam intensitas yang bervariasi. Walaupun di antara ciri-ciri penggambaran stereotip itu terdapat ciri-ciri positif, namun umumnya menggambarkan stereotip yang negatif. Hal tersebut menyebabkan gejala stereotip dapat dianggap sebagai penghambat dalam interaksi antarsuku bangsa dan integrasi nasional karena sangat sulit untuk diubah secara rasional. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang ulet dan kerja keras untuk mempersatukan potensi positifnya guna mencapai hasil optimal dalam pembangunan. Sehubungan dengan itu, ideologi negara yaitu Pancasila amat fundamental fungsinya dalam mendukung proses integrasi nasional serta menyeleksi pengaruh unsur budaya yang negatif.

Proses integrasi nasional dipengaruhi juga antara lain oleh kondisi tempat pertemuan etnik atau tempat terjadinya interaksi sosial antaretnik. Prof. Edward M. Bruner (1974) menyatakan bahwa kondisi yang dimaksud tersebut mengacu pada sebuah hipotesis yang dinamakannya teori *hipotesis dominan*, yang bunyinya: "Kondisi setempat yang terwujud sebagai kekuatan sosial, yaitu apakah ada kekuatan dominan atau tidak, mempengaruhi wujud dan corak hubungan di antarasuku-suku bangsa yang berbeda yang tinggal di tempat tersebut". Dengan kata lain, kondisi setempat turut mempengaruhi corak interaksi dalam arena-arena sosial setempat.

Dalam masyarakat yang mengenal adanya kebudayaan dominan, terdapat kecenderungan bahwa pola-pola interaksi diwarnai oleh adanya pengaruh kebudayaan dominan yang bersangkutan, sehingga pembauran atau integrasi antaretnik menuju proses integrasi nasional, mudah dilaksanakan karena relatif terasimilasi. Sedangkan dalam masyarakat yang tidak mengenal adanya kebudayaan dominan, pola interaksi antaretniknya adalah cenderung untuk memper-

tahankan identitas etniknya masing-masing. Begitu juga dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi, masing-masing mengembangkan spesialisasinya dan terdapat kecenderungan untuk tidak memerlukan golongan etnik lain. Sudah tentu, dalam kondisi masyarakat seperti itu, proses integrasi nasional sulit untuk dikembangkan.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian terdahulu telah diuraikan bahwa di lokasi penelitian terdapat delapan kelompok etnik/suku bangsa yaitu Sunda sebagai suku bangsa "asal", dan suku bangsa "pendatang" : Jawa, Cina, Batak, Padang, Menado, Bugis-Makas, dan Arab. Berdasarkan pertimbangan metodologis, maka suku bangsa Menado, Bugis, Makasar, dan Arab tidak dijadikan sampel penelitian.

Di bawah ini akan diuraikan gambaran umum mengenai suku bangsa Sunda, Jawa, Cina, Batak, dan Padang/Minang berdasarkan beberapa sumber tertulis dan kenyataan di lokasi penelitian.

A. Suku Bangsa Asal

Suku bangsa "asal" ditujukan kepada penduduk setempat yang secara umum turun temurun tinggal di lokasi penelitian, bukan sebagai pendatang yang wilayahnya berasal dari luar propinsi (Jawa Barat). Pada penelitian ini yang dikategorikan sebagai suku bangsa "asal" adalah suku bangsa Sunda dan dominan secara demografis, politis, maupun budaya.

Etnik Sunda merupakan suku bangsa yang sebagian besar mendiami wilayah Jawa Barat. Dalam menjalani hidupnya, mereka

mendasarkan diri pada "*citra sebagai insan yang ahlaqul kari-mah*", yaitu manusia yang selalu berasaskan pada keseimbangan agama, sosial, dan ekonomi. Keseimbangan itu membentuk ajaran hidup seperti : (1) Sikap adil terhadap sesama; (2) Keseimbangan antara hak dan kewajiban; (3) Menghormati hak-hak orang lain; (4) Suka memberi pertolongan agar orang yang ditolong dapat berdiri sendiri; (5) Memakai miliknya tidak untuk memeras, untuk memboroskan, untuk hidup mewah; dan (6) bekerja keras dan menghargai orang lain (Kartawinata, 1995 : 13).

Pandangan hidup itu tercermin dalam tradisi lisan dan sastra Sunda (lihat Warnaen, et al., 1987) seperti :

1. *Ulah taluk pedah jauh, tong hoream pedah anggang, najan jauh kudu dijugjug anggang kudu diteang.* (Tidak boleh menyerah hanya karena jauh, tetapi justru harus lebih giat untuk berusaha/bekerja).
2. *Ulah nguluwut, ulah ceurik balilihan, moal aya gunana ngagugulung kabingung.* (Tidak boleh cengeng, karena cengeng tidak akan memecahkan persoalan).
3. *Sing keyeng panteng pakarepan, kuat ku gogoda nu baris tumiba ka diri. Ubarna kudu daek peurih jeung peurih rejeung tawekal.* (Tahan terhadap godaan dan selalu prihatin dalam penderitaan guna mencapai suatu tujuan).
4. *Nungtut sautak-saeutik, ladang peurih bibilintik, sesa dahar masing rikrik.* (Bersikaplah hemat dan cermat agar tercapai tujuan hidup).
5. *Ulah haripeut ku teuteureuyeun kabita ku kabeungharan.* (jangan tergiur oleh barang dan makanan, tertarik oleh kekayaan).
6. *Milik teu pahili-hili, bagja teu paala-ala,* (Rejeki/milik seseorang telah diatur oleh Tuhan, sehingga tidak perlu merasa iri hati atas keberhasilan orang lain).
7. *Ari nu bakal jadi ratu baju butut, babadong batok...* (Seorang pemimpin yang memiliki harta yang melimpah harus tetap memiliki pola hidup sederhana/tidak berlebihan agar menjadi contoh yang baik bagi masyarakat).

8. *Usaha di alam lahir ditebusna teh kudu ku jujur laku.* (Untuk berusaha mencari kehidupan ekonomi hendaknya dicapai oleh usaha yang jujur).

Dari berbagai ungkapan itu tampak bahwa pandangan hidup orang Sunda menekankan pada sifat-sifat : tekun, ulet, tidak kenal menyerah, rapi, rajin, bersemangat, rasional, jujur, inovatif, mandiri, mampu memanfaatkan peluang, sederhana, dan bijaksana.

Adapun sistem kekerabatan yang berlaku pada suku bangsa Sunda sangat ditentukan oleh adat dan agama yang diturunkan secara turun menurun. Di tanah Sunda, bentuk keluarga yang terpenting adalah keluarga batih yang terdiri atas suami, isteri, dan anak-anak. Keluarga batih merupakan tempat yang paling aman bagi anggotanya di tengah-tengah hubungan kerabat yang lebih besar dan di tengah-tengah masyarakat. Di dalam keluarga batih sering juga terdapat anggota-anggota keluarga lain seperti ibu mertua atau keponakan dari pihak laki-laki atau perempuan. Hubungan sosial di antara keluarga batih sangat erat dan kompak (Harsojo, 1991 : 320).

Pada masyarakat Sunda terdapat *golongan*, yaitu kelompok kerabat yang masih dekat dengan hubungan kekerabatannya (dalam Antropologi disebut *kindred*). Selain itu, ada juga kelompok yang berupa *ambilineal*, yaitu kerabat sekitar keluarga batih seorang ego, tetapi diorientasikan ke arah nenek moyang. Kelompok ini disebut *bondoroyot* (Harsojo, 1991 : 320).

Garis keturunan yang berlaku pada suku bangsa Sunda adalah garis keturunan yang menghitung hubungan kekerabatan melalui laki-laki maupun wanita (bilateral) dan generasional. Dilihat dari sudut ego, orang Sunda mengenal istilah-istilah untuk tujuh generasi ke atas dan tujuh generasi ke bawah. Sebutan kekerabatan bagi pihak laki-laki tidak berbeda dengan sebutan kekerabatan pihak perempuan. Dua generasi ke atas dan ke bawah masih mempunyai hubungan yang fungsional, sedangkan tiga generasi ke atas dan ke bawah hanya mempunyai fungsi tradisional dalam hubungan kekerabatan (Harsojo 1991 : 321).

Perkembangan Masyarakat di Lokasi Penelitian

Wilayah RW 05, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kotamadya Bandung, dahulu dikenal dengan nama Kampung Tanjung. Sebutan tersebut muncul karena terdapat sebuah pohon tanjung, yang tepatnya berada di wilayah Gang Tanjung 4. Pohon tersebut tumbuh tinggi dan besar, serta banyak bunganya. Pada saat itu bunga tanjung sering dipakai untuk berbagai keperluan, selain bentuknya yang indah, baunya pun semerbak wangi. Tergoda akan keindahan dan keharuman bunga tersebut, penduduk setempat selalu memungut jika bunga-bunga tersebut jatuh pada saat musim bunga. Oleh karena alasan itu, maka pemilik pohon memasang pagar di sekitar pohon tanjung dengan harapan tidak ada lagi orang lain yang akan memunguti bunga-bunga yang jatuh. Pemiliknya meronce sejumlah kembang tanjung dan menjualnya kepada orang yang berminat membelinya untuk berbagai keperluan. Lama-lama karena keberadaan pohon tanjung ini cukup terkenal maka orang-orang menyebut kampung tersebut dengan nama Kampung Tanjung.

Tanpa alasan yang dapat diketahui dengan pasti, pohon yang sudah menjadi ciri khas kampung tersebut diputuskan untuk ditebang oleh pemiliknya. Di atas reruntuhan pohon tersebut kemudian dibangun sekolah. Selanjutnya sekolah tersebut dipindahkan ke lokasi RT 07 tempat Sekolah Dasar Negeri Tanjung kini berdiri. Kini pohon tanjung sudah tidak ada lagi, orang pun tidak lagi menyebut wilayah tersebut dengan nama Kampung Tanjung. Akan tetapi nama tanjung masih tetap harum dan bahkan diabadikan untuk nama setiap gang yang ada di wilayah RW 05; mulai Gang Tanjung utama hingga Tanjung 10.

Dahulu, wilayah ini merupakan hutan belantara yang ditumbuhi oleh pohon-pohon tinggi dan besar. Sekitar tahun 1918, seorang remaja yang berasal dari Kampung Pamijahan, Kabupaten Tasikmalaya datang ke Kampung Tanjung. Dia meninggalkan daerah asalnya untuk berusaha mencari sesuap nasi di tempat yang baru dengan bekerja sebagai tukang rumput untuk makanan kuda. Orang tersebut bernama Kasih. Selama berada di tempat pengembaraan, hidupnya sangat sederhana bahkan dapat dikatakan pengeluaran uang satu sen atau dua sen pun diperhitungkannya. Dengan cara hidup seperti itu dia mampu

mengumpulkan sejumlah uang yang dipakainya untuk membeli tanah di wilayah ini.

Oleh karena penghasilan yang diperolehnya tidak seberapa, pembelian tanah pun dilakukan sedikit demi sedikit secara bertahap. Namun karena keuletan dan kegigihannya, akhirnya dia mampu membeli hampir seluruh tanah yang terdapat di dalam wilayah Kampung Tanjung. Sudah tentu dengan memiliki tanah hampir di seluruh pelosok Kampung Tanjung, Kasih dikenal sebagai tuan tanah. Selain itu dia juga dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Bahkan menurut cerita, nama Mama Haji Kasih itu sendiri didapatnya setelah pulang dari Mekah. Siapa nama aslinya hingga kini tidak ada yang mengetahuinya.

Selama hidupnya dia hanya menikah dengan seorang perempuan asal Pamijahan Kabupaten Tasikmalaya yang bernama Uki. Dari pernikahan dengan Ibu Uki, lahir Yayat, Cicih, Idi, Enok, Ujang, Ipik, Yasid, Iya, dan Ata.

Mama Haji Kasih oleh penduduk Kampung Tanjung dianggap sebagai nenek moyang penduduk asli di wilayah ini. Dia yang pertama kali membuka hutan menjadi sawah produktif, yang menghasilkan padi dan membuatnya menjadi kaya. Keturunannya, yang di antaranya telah disebutkan di atas, melanjutkan jejak orang tua mereka dengan bekerja pada lahan pertanian yang diperoleh sebagai warisan dari orang tua mereka.

Anak-anak yang telah menikah, biasanya tinggal di wilayah atau lokasi yang dimiliki oleh Mama Haji Kasih. Selain itu, diberi lahan garapan cukup luas. Namun makin lama luas lahan garapan mereka semakin sempit karena terjadi pewarisan secara terus menerus kepada generasi berikutnya, terutama apabila mereka mempunyai anak dalam jumlah yang cukup banyak. Sementara itu, mereka yang mempunyai anak sedikit masih tetap memiliki tanah atau sawah yang cukup luas, bahkan masih ada yang mampu mempertahankan warisan tersebut hingga lahir tahun 1990-an. Warisan yang tersisa sekarang adalah rumah yang ditempati mereka. Besarnya rumah pun tidak terlalu luas, bahkan generasi berikutnya hanya mewarisi satu petak kamar. Sementara itu yang lebih tragis lagi, ada yang harus mengontrak rumah kepada orang lain. Dengan kata lain, jejak nenek moyang mereka yang kaya raya itu

sudah tidak tampak lagi. Seiring dengan pertum-buhan penduduk setempat, pendatang dari luar daerah pun satu per satu mulai datang dan tinggal di Kampung Tanjung. Mereka datang dari berbagai daerah di Jawa Barat seperti Banjaraan, Garut, Leles, Majalaya, dan Tasikmalaya. Tujuan mereka datang pada umumnya adalah untuk berdagang, selain karena terikat perkawinan dengan penduduk setempat. Para pendatang dari Leles, misalnya datang ke Kampung Tanjung untuk berjualan "bajigur", yakni sejenis minuman khas Sunda terbuat dari santan kelapa. Pendatang dari Tasik, berjualan sayur di pasar-pasar terdekat. Pendatang lain banyak yang menjadi buruh, pedagang kaki lima, atau pedagang keliling.

Para pendatang tersebut ada yang tinggal di Kampung Tanjung dengan cara menetap di rumah penduduk asli karena terikat tali perkawinan dan ada juga yang menyewa kamar/rumah penduduk asli untuk jangka waktu tertentu. Jika kegiatan ekonomi cukup berhasil, mereka akan membeli tanah baik tanah darat, kebun atau sawah di wilayah tersebut. Keberhasilan para pendatang ini akan tampak dari pewarisan tanah kepada anak-anaknya. Para pendatang yang secara ekonomi dianggap berhasil, anak-anaknya pun akan tinggal di sekitar tempat tinggal orang tuanya, karena mewarisi tanah dari orang tuanya.

Salah satu contoh keberhasilan tersebut, terjadi pada pendatang dari Tasikmalaya yang berada di RT 07 atau di Gang Tanjung 7. Awalnya, mereka berjualan sayur di pasar. Kemudian beralih pekerjaan dengan membuat tempe yang juga dijual di pasar-pasar. Ternyata, pekerjaan sebagai pembuat dan penjual tempe, mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit sehingga dapat dikatakan berhasil. Akhirnya, dia mampu membeli tanah yang cukup luas di wilayah tersebut, dan membawa serta famili dari daerah asalnya untuk sama-sama berusaha di Bandung, khususnya di Kampung Tanjung. Anak-anak mereka pun pada umumnya diberi tanah di sekitar mereka untuk tempat tinggal, dan sebagian besar dari anak-anaknya bahkan cucu- cucunya pun mengikuti jejak orang tuanya, yakni menjadi pembuat tempe. Oleh karena itu, di gang Tanjung 7 tampak dominasi pendatang dari Tasik yang memproduksi tempe di rumahnya.

Hingga tahun 1970-an, Kampung Tanjung masih menampilkan sosok sebagai sebuah kampung, dengan masih terdapat sawah dan masih dominannya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai

petani. Nuansa kehidupan masyarakat yang agraris tampak di mana-mana. Menjelang tahun 1980-an, halaman, sawah, dan kebun mulai dijadikan lahan pemukiman. Halaman rumah penduduk yang tadinya cukup luas, semakin menyempit karena harus berbagi lahan dengan anak-anak atau kerabatnya. Puncaknya adalah sekitar tahun 1980-an, yakni ketika akan dibuat jalan Lingkar Selatan, penduduk Kampung Tanjung harus merelakan kebun dan pesawahannya untuk digunakan oleh proyek.

Rencana pembuatan Jalan Lingkar Selatan tersebut memang menjadikan segalanya berubah. Penduduk asli yang sebagian besar hidupnya bergantung pada lahan pertanian, cukup banyak yang harus merelakan tanahnya untuk dibebaskan dan yang paling memprihatinkan adalah ketika mereka harus melepaskan pekerjaannya sebagai petani. Harga tanah di sekitar wilayah tersebut melambung tinggi. Oleh karena melihat prospek yang cukup menjanjikan, banyak orang mengincarnya. Selain itu, para pendatang etnik Sunda dari daerah lainnya di Jawa Barat pun banyak yang berusaha untuk membeli tanah di tempat tersebut, karena cukup strategis. Tak sedikit pula penduduk asli yang tinggal di Kampung Tanjung merelakan tanah dan rumahnya yang terletak di pinggir Jalan Babakan Tarogong dijual kepada orang lain. Sementara itu dia sendiri pindah ke dalam gang karena tergoda harga tanah yang cukup menggiurkan. Ada pula yang memilih untuk pindah dan membeli tanah atau rumah di kampung lain. Yang lebih tragis, setelah menjual tanah dan rumahnya, dia sendiri harus mengontrak kepada orang lain; adapun hasil penjualan rumahnya dipakai untuk membiayai kehidupannya sehari-hari, setelah kehilangan mata pencahariannya sebagai petani.

Saat ini cukup sulit untuk membedakan orang Sunda yang terdapat di Kampung Tanjung atau RW 05; mana yang merupakan penduduk asli dan mana yang merupakan pendatang. Para pendatang yang sudah begitu lama tinggal, seakan-akan sudah tidak merasa lagi sebagai pendatang. Mereka merasa telah menjadi orang Tanjung, karena di tempat itu telah menyatu dengan penduduk dan alam sekitarnya. Keberadaan tersebut semakin dikukuhkan pula dengan banyaknya pernikahan antara penduduk asli dengan pendatang. Daerah asal mereka pun semakin beragam. Apa lagi setelah industri kecil maupun pabrik banyak berdiri di sepanjang Jalan Lingkar Selatan dan Jalan Babakan Tarogong, pendatang makin membanjiri Kampung Tanjung.

Sementara itu, penduduk asli pun tidak berupaya mengklasifikan diri dari pendatang, melainkan menerima para pendatang secara terbuka. Para pendatang yang masuk ke Kampung Tanjung pada masa setelah tahun 1970-an tidak lagi didominasi oleh mereka yang berprofesi sebagai pedagang saja, melainkan juga oleh mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri di kantor-kantor pemerintahan, dan karyawan di kantor/perusahaan swasta. Beraneka ragam sumber mata pencaharian ini membuat kondisi kehidupan perekonomian mereka pun berlainan.

Kemampuan hidup tidak hanya menjadi milik para pendatang, karena ada beberapa penduduk asli yang mampu mengembangkan dirinya dalam kegiatan ekonomi sehingga sejajar dengan para pendatang yang hidup sukses. Namun demikian, penduduk asli umumnya kurang mampu mengembangkan dirinya setelah lahan pertanian yang menjadi garapan mereka semakin menyempit. Bahkan hingga sekarang masih banyak yang bekerja di sawah yang luasnya tidak seberapa. Hal itu dilakukan karena memang merasa sulit pindah ke pekerjaan baru, walaupun menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Meskipun pekerjaan baru menanti di depan mata, mereka tidak mampu menembusnya karena pengetahuan dan kemampuan mereka terbatas hanya dalam masalah pertanian saja. Kalupun ada di antaranya yang mencoba berkiprah di bidang lain, sudah tentu pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan dan pengetahuan khusus.

Pada umumnya, masalah pendidikan dalam arti pendidikan formal pada kelompok etnik Sunda di lokasi penelitian kurang mendapat perhatian secara khusus, terutama sebelum tahun 1970-an. Sampai sekarang pun hal tersebut masih terasa, terbukti dengan masih jarangnyanya penduduk yang bisa menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi. Jangankan ke perguruan tinggi, yang bisa duduk di bangku SMA pun masih jarang, terutama untuk kaum wanitanya. Kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya hal tersebut antara lain kesulitan ekonomi. Kalupun ada di antaranya yang mampu secara ekonomi, pemahaman terhadap arti pendidikan formal itu sendiri masih kurang. Khusus untuk kaum wanitanya, pada usia yang relatif masih muda biasanya akan segera dinikahkan. Dengan kata lain, kawin muda di wilayah ini masih sering terjadi.

Perubahan persepsi mengenai pendidikan formal, terjadi ketika para pendatang yang berprofesi sebagai pegawai negeri dan karyawan di kantor/perusahaan swasta, masuk ke wilayah RW 05. Pada umumnya, latar belakang pendidikan mereka adalah SMA. Dari sinilah cakrawala pemikiran masyarakat mulai lebih terbuka dan muncul keinginan untuk menyekolahkan anak-anaknya. Perubahan itu sendiri terjadi sedikit demi sedikit. Selain itu didukung pula oleh peran serta salah seorang pendatang, yang dengan sukarela bersedia memberikan pengetahuan yang dimilikinya. Pada saat itu sekitar tahun 1976-an, dia memberi les bahasa Inggris kepada pemuda-pemudi yang tinggal di wilayah tersebut. Sambutan awalnya memang cukup lumayan, hampir satu ruangan kelas di SDN Tanjung dipenuhi oleh anak-anak muda yang ingin mengikuti les tersebut. Namun mungkin karena tingkat kesulitan materi relatif tinggi atau memang ada alasan-alasan lain, makin lama jumlah peserta semakin menyusut hingga tersisa kurang lebih 10 orang saja. Meskipun demikian, sukarelawan tersebut tetap saja memberikan les bahasa Inggris di rumahnya tanpa dipungut biaya.

Lain halnya dengan pendidikan agama, hampir semua penduduk memperhatikan pendidikan ini. Para pendatang umumnya mengikuti kebiasaan penduduk asli dan pendatang yang telah lama menetap di wilayah tersebut, yaitu dengan memasukkan atau mengikutsertakan anak-anak mereka yang relatif masih kecil belajar agama di madrasah-madrasah yang biasanya dipimpin oleh seorang ustadz.

Mengenai sistem pelapisan sosial, pada dasarnya tidak ada batas-batas yang secara tegas membagi penduduk etnik Sunda ke dalam kelas-kelas atau lapisan-lapisan tertentu, yang diikuti dengan hak yang diterima serta kewajiban seseorang sehubungan penentuan pada kelas-kelas tersebut; atau disertai dengan sanksi-sanksi yang akan diterima bila terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban tersebut. Dengan kata lain pelapisan yang terjadi di dalam kelompok etnik Sunda tidak dengan sengaja disusun sedemikian rupa untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu, akan tetapi pelapisan tersebut terjadi dengan sendirinya.

Kondisi sosial ekonomi penduduk di lokasi penelitian, dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat pelapisan sosial. Harta merupakan salah satu unsur yang paling tampak jelas kontribusinya bagi seseorang untuk berada pada lapisan-lapisan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, orang kaya menempati lapisan teratas atau termasuk orang terpandang. Selain

kekayaan, seseorang yang dianggap benar-benar mendalami agama (Islam) dengan sungguh-sungguh atau dianggap lebih memahami mengenai seluk-beluk yang berkaitan dengan agama (Islam), serta mampu mengamalkannya dengan baik hingga bisa menjadi teladan bagi anggota-anggota kelompok lainnya, akan digolongkan ke dalam lapisan orang terpandang.

Sementara itu, latar belakang pendidikan anggota kelompok etnik Sunda di wilayah ini, pada umumnya hanya mampu menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar untuk generasi tuanya. Kaum generasi muda sebagian besar hanya mampu menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP dan SMA, orang yang memiliki gelar kesarjanaan akan mendapat perhatian khusus. Meskipun kelompok etnik Sunda ini berada di Kota Bandung, tetap saja gelar kesarjanaan untuk ukuran mereka masih termasuk langka. Oleh karena itu, tingkat pendidikan yang cukup tinggi pun dapat menempatkan seseorang pada kedudukan yang teratas di dalam kelompoknya.

Selain itu, para tokoh masyarakat pun menempati kedudukan teratas pada pelapisan sosial kelompok etnik Sunda. Para tokoh masyarakat adalah orang yang secara formal dipilih oleh anggota untuk memimpin wilayah, ditokohkan karena merupakan penduduk asli, atau karena sikap dan tindakannya menunjukkan kharisma yang perlu diteladani. Untuk menempatkan seseorang pada lapisan teratas adakalanya cukup hanya dengan memiliki salah satu dari beberapa unsur atau merupakan akumulasi dari berbagai unsur tadi, misalnya selain kaya orang tersebut mempunyai pendidikan yang cukup tinggi dan menjadi tokoh masyarakat pula. Namun terlepas dari unsur-unsur tersebut, sikap dan tindakan orang-orang yang menempati kedudukan tertinggi dalam pelapisan sosial, harus selalu menjaga nama baiknya. Seandainya sikap dan tindakan mereka tidak terpuji di mata anggota kelompok yang lain, maka unsur-unsur yang telah disebutkan tadi tidak akan ada artinya.

Tidaklah mudah untuk melihat pelapisan sosial yang terdapat dalam kelompok etnik Sunda di wilayah ini, selain karena memang tidak dengan sengaja disusun untuk menunjukkan perbedaan yang ada, juga perlu pengamatan khusus untuk menafsirkan adanya pelapisan sosial tersebut. Sekilas, tidak akan tampak kalau dalam kehidupan mereka terdapat suatu pelapisan sosial. Namun apabila kita menyelami kehidupannya sehari-hari, akan terbukti bahwa pelapisan sosial dalam

kehidupan mereka itu memang ada. Wujud nyata dari pelapisan tersebut dapat ditangkap melalui pembicaraan dan sikap yang ditujukan oleh seorang anggota kepada anggota kelompok etnik Sunda lainnya.

Penduduk yang berada pada lapisan atas atau terpendang, sering menjadi perbincangan anggota kelompok yang lainnya. Sudah tentu, hal yang dibicarakan adalah kekaguman terhadap apa yang mereka miliki dan pujian terhadap segala sikap dan tindakan yang dilakukan oleh mereka. Sering sekali sosok mereka diidolakan oleh anggota masyarakat lainnya. Tak heran apabila mereka salah dalam bersikap atau bertindak tidak terpuji, beritanya akan cepat menyebar kepada anggota kelompok masyarakat lainnya dari mulut ke mulut. Hal tersebut, akan menurunkan citra mereka di mata anggota kelompok lainnya.

Sikap berupa penghormatan yang diperlihatkan oleh penduduk terhadap orang terpendang (lapisan atas) merupakan ekspresi dari penghargaan yang mereka berikan terhadap orang-orang yang dianggap memang layak untuk dihormati. Meskipun begitu, bukan berarti mereka tidak menghormati orang-orang yang termasuk lapisan orang biasa (lapisan bawah).

Wujud penghargaan itu bisa berbentuk sikap menghormati dalam arti yang sebenarnya, misalnya apabila bertemu dengan orang terpendang (lapisan atas), mereka akan mengangguk terlebih dulu sebagai tanda hormat. Adakalanya orang-orang yang diberi anggukan tersebut tidak mengenalnya sama sekali. Bentuk penghargaan lainnya adalah lebih memperhatikan dan menghargai pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh penduduk yang termasuk lapisan atas; apabila mereka memerlukan bantuan berupa tenaga, akan dengan senang hati memberikan bantuan tenaga; dan selalu dilibatkan dalam segala kegiatan kemasyarakatan, baik secara langsung maupun tidak.

Jalinan hubungan yang terjadi antara individu dan individu lain dalam kelompok etnik Sunda seperti terurai di atas, memperlihatkan eratnya hubungan kekerabatan maupun hubungan-hubungan sosial lainnya. Contoh menarik yang memperlihatkan eratnya hubungan kekerabatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga besar keturunan Ibu Uki (cikal bakal Kampung Tanjung) dengan pendatang dari Tasik, yang lebih dikenal sebagai pedagang tempe. Hubungan dua keluarga besar tersebut, terjalin dengan erat. Selain karena tempat tinggal yang

saling berdekatan, terjadinya pernikahan di antara mereka pun semakin mengukuhkan rasa persaudaraan. Mereka mengadakan arisan, yang diikuti oleh kedua keluarga tersebut. Tujuannya untuk mengumpulkan modal karena terutama sebagian besar dari mereka adalah pedagang. Selain kegiatan tersebut, mereka mengadakan pengajian yang dihadiri oleh ibu-ibu. Dalam pertemuan inilah, mereka memperpanjang dan mempererat tali silaturahmi. Oleh karena kedua kegiatan tersebut terlihat menguntungkan, penduduk sekitarnya kemudian ikut bergabung dan skala serta frekuensi kegiatannya pun menjadi besar.

Pada saat ini tidak mudah untuk membedakan penduduk asli, etnik Sunda pendatang lama, maupun pendatang baru. Semuanya telah menyatu dan merasa sebagai penduduk Kampung Tanjung atau penghuni RW 05, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler. Untuk mempertahankan keutuhan dan keharmonisan hubungan di antara mereka, diperlukan pengertian dan partisipasi aktif dari setiap individu. Keharmonisan itu sendiri bisa dimulai dari hubungan dalam keluarga, hubungan antarkeluarga, dan hubungan dalam masyarakat secara keseluruhan.

Di dalam keluarga inti, keharmonisan rumah tangga merupakan hal yang paling utama untuk menjaga keutuhan keluarga. Agama merupakan fondasi utama yang dijadikan pijakan hidup, karena hampir semua keluarga suku bangsa Sunda yang berada di lokasi penelitian, beragama Islam. Sudah tentu, ajaran-ajaran Islam menganjurkan agar para penganutnya senantiasa bertaqwa kepada Allah, artinya beriman kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi apa yang dilarang-Nya. Berbakti kepada orang tua, saling menyayangi dan mencintai, merupakan cermin dari orang-orang yang bertaqwa. Begitu pula halnya dengan hubungan-hubungan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga yang lebih besar. Unsur-unsur tadi masih tetap diperlukan keberadaannya, bahkan harus lebih diperhatikan lagi, karena di dalam keluarga besar tersebut, telah masuk orang lain yang kemudian menjadi bagian di dalamnya. Penyelesaian kesalahfahaman yang terjadi, mungkin tidak semudah seperti dengan saudara kandung sendiri. Dalam hal ini, sikap saling menolong dan toleransi di antara mereka sangat diperlukan. Tolong menolong direalisasikan dengan memberi bantuan, baik materi maupun nonmateri disertai rasa ikhlas. Sikap tolong-menolong yang paling menonjol di sini, tampak sekali pada saat seseorang

sedang berduka cita, dalam kesusahan, juga pada saat mengadakan pesta atau hajatan.

Lain halnya dengan hubungan yang terjadi antartetangga. Orang Sunda di lokasi penelitian ada yang bertetangga dengan orang Sunda lagi, ada pula yang bertetangga dengan lebih dari satu suku bangsa, misalnya dengan orang Jawa, orang Batak, orang Padang, maupun dengan yang berstatus Warga Negara Indonesia keturunan Cina. Penduduk etnik Sunda yang bertetangga dengan orang Sunda lagi pada umumnya menganggap tetangga yang terletak sebelah kiri, kanan maupun di depannya sebagai saudara sendiri. Pertimbangannya adalah apabila terjadi sesuatu, maka tetangga terdekatlah yang diharapkan bisa memberi bantuan dengan segera. Hubungan sosial yang terjadi antartetangga yang agak jauh jaraknya, tidak seerat dengan tetangga yang berada di samping, kecuali masih satu kerabat. Namun demikian, mereka masih menjunjung tinggi perasaan kerukunan dan kekeluargaan.

Kesalahfahaman antartetangga bukannya tidak pernah terjadi, akan tetapi frekuensinya relatif sedikit. Kalaupun hal tersebut ada, pada umumnya tidak merebak menjadi percekocokan mulut yang sifatnya terbuka, karena sikap toleransi di antara mereka cukup tinggi.

Kehidupan bertetangga dengan suku bangsa lain di luar suku bangsa Sunda, tampak misalnya dengan yang berasal dari suku Batak. Pada umumnya, mereka tidak pernah mengenal budaya Batak secara utuh. Yang mereka kenal adalah stereotif etnik yang seringkali bermakna kurang baik, misalnya orang Batak mereka identikan dengan "tukang renten" atau rentenir. Menurut ajaran agama Islam yang dianut oleh sebagian besar penduduk etnik Sunda, "renten" dianggap haram yaitu apabila tingkat suku bunga yang mereka tetapkan cukup tinggi. Orang yang berprofesi sebagai rentenir kurang mendapat simpati dari tetangganya, terutama bila tetangganya tergolong mampu secara ekonomi. Namun lain halnya dengan mereka yang tidak mampu, yang seringkali kepepet dan memerlukan uang secara mendadak untuk keperluan hidup sehari-hari. Kehadiran orang Batak dengan profesi sebagai rentenir, bagi mereka bagaikan seorang dewa penolong yang membantu menyelesaikan masalah keuangan. Meskipun sebenarnya mereka tahu akan terjebak dalam kesulitan yang lebih jauh, karena uang tersebut biasanya bunga-berbunga.

Stereotif orang Batak seperti itu memang tidak sepenuhnya benar karena banyak di antara mereka yang tidak menjadi rentenir, misalnya mengusahakan toko yang menjual berbagai barang kebutuhan keluarga. Stereotif lainnya yang dikenal oleh etnik Sunda di wilayah ini adalah kesenangan orang Batak memakan daging anjing. Hal tersebut membuat mereka berhati-hati bila berkunjung dan disuguhi makanan yang ada dagingnya, karena bagi orang Islam makanan daging anjing itu hukumnya haram.

Meskipun ada stereotif yang kurang baik dalam anggapan penduduk etnik Sunda, bukan berarti mereka tidak menerima keberadaan para pendatang yang berasal dari suku bangsa Batak tersebut. Saling menolong pun berkembang dalam kehidupan bertetangga, misalnya turut merasakan penderitaan tetangganya apabila sedang sakit atau ditimpa kemalangan.

Hal lain yang mempererat hubungan sosial adalah munculnya keinginan etnik Batak untuk menyatu dengan penduduk setempat dengan mencoba mempelajari bahasa Sunda. Meskipun di telinga orang Sunda terdengar lucu dan juga aneh karena selain kata-kata yang dipelajarinya cukup kasar, nada bicaranya pun keras dan tinggi sebagaimana layaknya jika orang Batak sedang berbicara, namun hal tersebut menunjukkan adanya keinginan dari kelompok etnik Batak untuk menyatu dengan penduduk etnik Sunda. Mereka sangat menghargai keinginan etnik Batak tersebut, dan pada akhirnya semakin mempererat hubungan di antara keduanya.

Berkaitan dengan pendatang yang berasal dari suku bangsa Padang/Minang, berkembang pula stereotif etnik pada penduduk etnik Sunda. Mereka beranggapan bahwa orang Padang itu pandai dalam berusaha dan pelit. Untuk kasus orang Padang yang terdapat di wilayah ini, stereotif etnik tersebut ada yang tepat dan ada pula yang keliru. Dikatakan sebagai orang pandai berusaha, benar terbukti contohnya adalah berkembangnya usaha angkutan kota yang ditekuni oleh salah seorang penduduk etnik Minang. Hubungan ketetangga yang terjadi antara etnik Sunda dan etnik Padang juga cukup harmonis. Banyak sikap dan perbuatan orang Padang yang berkenan di hati penduduk setempat. Misalnya ketika salah seorang dari mereka akan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah, para tetangga diundang untuk

mengadakan syukuran sambil berpamitan kepada tetangga-tetangga terdekatnya. Tidak hanya itu, mereka pun meminta penduduk setempat yang pada umumnya berasal dari etnik Sunda untuk mengadakan pengajian secara rutin di rumahnya selama mereka berada di tanah suci. Penduduk setempat pun dengan senang hati dan tanpa pamrih memenuhi permintaan mereka.

Contoh lain yang memperlihatkan hubungan baik antara pendatang dari suku bangsa Minang dengan etnik Sunda adalah ketika salah seorang anak penduduk etnik Minang akan menikah. Tak segan-segan mereka mengundang tetangga dan para tokoh masyarakat untuk hadir menyaksikan atau mengikuti acara melamar. Kebetulan sekali calon menantunya berasal dari suku bangsa Sunda, yang sudah tentu akan datang melamar anak gadisnya dengan tata cara yang berlaku dalam tradisi Sunda. Oleh karena tidak tahu secara pasti bagaimana adat melamar dan menikah dalam tradisi Sunda, mereka minta petunjuk atau pendapat kepada orang yang dianggap mengetahui dan memahami hal tersebut dengan baik.

Menolong tetangga yang sedang dirundung duka pun seringkali dilakukan oleh orang Padang tersebut. Contohnya adalah ketika salah seorang tetangga yang rumahnya tidak jauh darinya meninggal, tanpa diminta ia meminjamkan beberapa buah angkutan kota yang kebetulan pada saat itu tidak beroperasi. Sejumlah angkutan tersebut dipakai untuk mengangkut pelayat yang ingin mengantar jenazah hingga tempat peristirahatannya yang terakhir. Dalam hal ini stereotif etnik mengenai orang Padang yang dianggap pelit, tidaklah benar. Contoh lainnya adalah apabila mereka selesai mengadakan syukuran yang hanya diikuti oleh sesama orang Padang atau pulang bepergian dari luar kota, akan selalu mengirim makanan khas Padang atau oleh-oleh dari luar kota kepada tetangganya, begitu pula sebaliknya dengan tetangga yang ada di sebelahnya.

Pada waktu Idul Fitri tiba, mereka biasanya datang lebih dulu mengunjungi para tetangga untuk bersilaturahmi dan bermaaf-maafan. Selain itu, untuk mempererat hubungan antara tetangga dan penduduk setempat, mereka berusaha sebisa mungkin berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Sunda, walau sering kali terdengar lucu karena terdapat beberapa kesalahan dalam pengucapan maupun aksennya.

Adapun bila bertetangga dengan Warga Negara Republik Indonesia keturunan Cina, hubungan yang terjalin memang tidak seperti layaknya dengan suku bangsa lain yang termasuk sebagai golongan pribumi. Orang Cina yang membuka toko di rumahnya, selalu berusaha agar harga-harga barang yang dijual relatif murah. Cara mereka melayani pembeli pun sangat akrab sekali sehingga ada keterikatan secara emosi yang didukung pula oleh bahasa komunikasi mereka yakni bahasa Sunda. Lain halnya apabila mereka membuka industri rumah tangga atau usaha di rumah mereka, sering kali tidak ada keterikatan secara emosi dengan tetangga-tetangga di sebelahnya. Meskipun demikian, mereka pada umumnya membuka kesempatan kepada penduduk setempat untuk bekerja pada mereka asal memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan usaha mereka. Hal ini terjadi di sebuah tempat yang membuka usaha konfeksi. Di konfeksi ini selain terdapat karyawan wanita yang berasal dari luar wilayah RW 05, banyak pula karyawan wanita yang berasal dari penduduk setempat.

Pada umumnya para pendatang yang berasal dari WNI keturunan Cina menempati wilayah di sepanjang pinggiran Jalan Babakan Tarogong dan Jalan Lingkar Selatan. Rumah-rumah mereka dibenteng atau diberi pagar yang cukup tinggi dan berkesan tidak ramah. Penghuniannya pun kurang bisa/jarang bergaul dengan penduduk setempat. Lain halnya dengan mereka yang tinggal/berada di dalam gang, yang apabila dilihat dari segi ekonomi tidaklah berlebihan. Mereka biasanya lebih bisa diajak bergaul oleh penduduk setempat, bahkan ada yang bergabung bersama-sama dengan ibu-ibu lainnya dalam kegiatan arisan. Sebagian dari mereka masih ada yang memperlihatkan keeksklusifannya terhadap penduduk setempat.

Pada dasarnya penduduk etnik Sunda tidak pernah memilih-milih dengan siapa harus bergaul, dan tidak menutup diri terhadap kedatangan suku bangsa-suku bangsa lain yang masuk ke dalam wilayahnya. Keterbukaan mereka terbukti dengan adanya pernikahan yang berlainan etnik. Memang dalam lubuk hati para orang tua tersirat keinginan agar anak-anaknya memilih pasangan hidup dari suku bangsanya sendiri, dengan alasan agar lebih mudah dalam penyesuaian diri masing-masing yang berlatar belakang budaya sama. Akan tetapi mereka tidak harus menolak jika ada di antara anak-anaknya yang memilih pasangan hidup bukan dari suku Sunda, karena mereka yakin bahwa jodoh seseorang itu

sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Di antara mereka ada yang menikah dengan orang Jawa, orang Padang, dan orang Cina. Pernikahan antarsuku tersebut ternyata tidak mengurangi keharmonisan dalam berumah tangga, meskipun latar belakang budaya berlainan satu sama lainnya.

Keterbukaan orang Sunda antara lain tampak pula pada saat mereka menerima dan rela untuk dipimpin oleh warga bukan orang Sunda, seperti pernah terjadi pada saat ketua RW di wilayah ini dipegang oleh orang Jawa. Penerimaan dan sikap terbuka tersebut merupakan faktor penting dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan hidup bermasyarakat. Walaupun demikian, keutuhan dan keharmonisan dalam bermasyarakat memerlukan keterlibatan atau partisipasi aktif dari seluruh warga, baik dari etnik Sunda, Jawa, Cina, Batak, maupun Padang.

Realisasi dari keterlibatan suku bangsa lain dalam upaya menjaga keharmonisan hubungan sosial tampak pada aktivitas para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna. Keterlibatan salah seorang penduduk yang berasal dari etnik Jawa, cukup terasa dalam upaya berbagai kegiatan Karang Taruna. Hal tersebut merupakan salah satu contoh keterlibatan suku bangsa lain yang dilakukan secara spontan. Sementara itu, keterlibatan yang muncul melalui ajakan-ajakan atau anjuran dari para tokoh masyarakat, tampak pada saat menjelang perayaan ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Staf RW mengundang warganya yang berasal dari keturunan Cina untuk hadir pada rapat-rapat yang berkaitan dengan pengadaan dana guna membiayai berbagai kegiatan 17 Agustus. Oleh karena kalau mengandalkan sumbangan dari warga masyarakat lainnya, sudah tentu dana yang ada sangat minim. Staf RW biasanya telah menentukan berapa besar sumbangan mereka, disesuaikan dengan penilaian para staf RW terhadap jenis-jenis usaha yang dimiliki. Pada umumnya mereka jarang menolak jumlah sumbangan yang diminta, bahkan adapula di antaranya yang memberi sumbangan melebihi jumlah yang diminta. Apabila ada di antara mereka yang menolak memberikan sumbangan dalam jumlah yang diminta atau bahkan tidak memberinya sama sekali, biasanya ketua RW akan mendatangi dan memberikan pengertian kepadanya.

Di samping memberikan sumbangan yang diminta oleh staf RW, mereka pun ada kalanya memberi perhatian tersendiri kepada

tetangga-tetangga terdekatnya. Misalnya dengan membagi-bagikan hadiah kue kaleng pada saat lebaran.

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat berbagai kegiatan yang menunjukkan adanya keharmonisan hubungan antarpenduduk yang tercermin dalam berbagai kegiatan. Salah satu diantaranya adalah kegiatan rekreasi yang secara rutin selalu diadakan. Saat-saat tertentu yang sering dipakai oleh warga masyarakat untuk melakukan piknik bersama, antara lain beberapa hari setelah Idul Fitri, pada saat musim liburan sekolah, atau saat pergantian tahun. Penyelenggara kegiatan ini biasanya adalah para pemuda atau pemudi yang tergabung dalam Karang Taruna. Pesertanya terbuka untuk siapa saja. Tempat-tempat yang sering di jadikan sebagai tujuan wisata antara lain Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Ciater, dan lain-lain.

Dalam kehidupan ekonomi mereka terdapat koperasi simpan pinjam yang dikelola oleh ibu-ibu PKK. Kegiatan lain yang mencerminkan kerukunan antarwarga, tampak pada saat memperbaiki Jalan Babakan Tarogong yang telah rusak berat. Sebagian dana perbaikan jalan ini diperoleh dari penduduk yang berada di pinggir jalan terutama dari orang Cina dan penduduk asli yang dianggap mampu. Kalau ada di antaranya yang tidak memberikan bantuan berupa uang, mereka akan mengantinya dengan cara menyediakan konsumsi atau bantuan tenaga.

B. Suku Bangsa Pendetang

Yang dianggap sebagai suku bangsa "pendatang" di lokasi penelitian ialah suku bangsa yang berasal dari luar propinsi (Jawa Barat) seperti suku bangsa Jawa, Cina, Batak, dan Padang/Minang. Berikut akan diuraikan gambaran singkat mengenai keempat suku bangsa tersebut.

Jawa

Pendukung kebudayaan Jawa meliputi seluruh bagian tengah dan timur dari Pulau Jawa. Sungguhpun demikian, ada daerah-daerah yang secara kolektif sering disebut *daerah kejawen*, yaitu Banyumas, Kedu, Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Malang, dan Kediri.

Di antara sekian banyak daerah tempat kediaman orang Jawa tersebut terdapat berbagai variasi dan perbedaan-perbedaan yang bersifat lokal dalam beberapa unsur kebudayaannya, seperti perbedaan mengenai berbagai istilah teknis, dialek bahasa, dan lain-lain. Sungguhpun demikian, variasi-variasi dan perbedaan tersebut tidaklah besar karena apabila diteliti, hal-hal itu masih menunjukkan satu pola atau satu sistem kebudayaan Jawa.

Di dalam pergaulan hidup maupun interaksi sosial sehari-hari, mereka berbahasa Jawa. Ada dua macam bahasa Jawa apabila ditinjau dari kriteria tingkatannya, yaitu bahasa Jawa ngoko dan krama. Bahasa Jawa ngoko dipakai untuk orang yang sudah dikenal akrab, atau orang yang lebih rendah derajat dan status sosialnya.

Sistem kekerabatan orang Jawa berdasarkan prinsip keturunan bilateral. Sedangkan sistem istilah kekerabatannya menunjukkan sistem klasifikasi menurut angkatan. Hubungan kekerabatannya tercermin dalam istilah keturunan yang mencapai 10 generasi. Kesepuluh istilah tersebut adalah *wong tuwo* (tiang sepuh), *embah* (eyang), *buyut*, *cangah*, *wereng*, *udheg-udheg*, *gantung siwur*, *gropok senthe*, *debog bosok*, dan *galih asem*.

Pada masyarakat Jawa berlaku adat yang menentukan bahwa dua orang tidak boleh saling kawin apabila saudara sekandung; *pancer lanang*, yaitu anak dari dua orang saudara sekandung laki-laki; misan; dan ibu pihak laki-laki lebih muda dari pada ibu pihak wanita. Perkawinan selain dengan yang tersebut dalam kriteria di atas, diperbolehkan. Perkawinan lain yang diperkenankan adalah *ngarang wulu* dan *wayuh*. Perkawinan *karang wulu* adalah suatu perkawinan seorang duda dengan seorang wanita salah seorang adik dari almarhumah isterinya. Adapun *wayuh* adalah suatu perkawinan lebih dari seorang istri (poligami).

Kesatuan terkecil dari masyarakat etnik Jawa adalah keluarga batih. Kelompok yang lebih besar dari keluarga disebut *sanak sedulur*. Kelompok kekerabatan ini, terdiri atas keturunan dari seorang nenek moyang sampai derajat ketiga yang saling membantu apabila ada peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan keluarga. Selain itu dikenal pula *alur waris*, yaitu kelompok kekerabatan yang terdiri atas semua kerabat sampai tujuh turunan sejauh masih dikenal tempat tinggalnya.

Mengenai stratifikasi sosial, dikenal *priyayi* dan *bendara* yang menempati lapisan teratas, dan *wong cilik* yang menjadi lapisan-lapisan masyarakat bawah. *Priyayi* adalah pegawai negeri dan orang terpelajar. *Bendara* adalah keluarga keraton dan keturunan bangsawan. Sedangkan *wong cilik* adalah orang kebanyakan, seperti buruh, petani, tukang, dan pekerja kasar lainnya.

Menurut kriteria kataatan dalam menjalankan ajaran agama, orang Jawa biasanya membedakan orang *santri* dengan orang *agama kejawen*. *Santri* adalah orang yang betul-betul mengikuti ajaran agama Islam. Sedangkan orang yang beragama *kejawen* adalah orang yang percaya kepada ajaran agama Islam, tetapi mereka tidak patuh menjalankan rukun Islam, misalnya tidak solat, tidak puasa, tidak bercita-cita untuk melakukan ibadah haji, dan sebagainya.

Suatu kelemahan dari mentalitet rakyat pedesaan, di Jawa, yang merupakan penghambat besar dalam pembangunan adalah sikapnya yang pasif terhadap hidup. Kesukaan orang Jawa terhadap gerakan-gerakan kebatinan, penilaian tinggi yang dinyatakan terhadap konsep *nerima*, ketabahannya yang ulet dalam hal menderita, tetapi lemah dalam berkarya, merefleksikan mentalitet tersebut di atas (Kodiran dalam Koentjaraningrat, 1993: 329-352).

Cina

Masyarakat Cina di Indonesia secara umum dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu *Cina totok* dan *peranakan*. Mely G. Tan (1981 : IX) menjelaskan sebagai berikut :

Cina totok adalah mereka yang orientasi kebudayaannya berintikan kebudayaan yang berasal dari Tiongkok (berbahasa Cina di rumah, pernah sekolah di Cina, mempunyai hubungan kerabat atau dagang dengan orang Cina lain di luar Indonesia). *Peranakan* adalah mereka yang orientasi kebudayaannya berintikan kebudayaan setempat, yang di rumahnya menggunakan bahasa setempat; pendeknya mereka telah mengalami proses akulturasi yang mendalam dengan kebudayaan di mana mereka dilahirkan dan dibesarkan.

Dari penjelasan itu tampak bahwa proses akulturasi merupakan ukuran seseorang masuk kelompok *totok* atau *peranakan*. Namun demikian, pada penelitian ini yang dimaksud dengan masyarakat Cina ialah kelompok masyarakat Cina yang bertempat tinggal di Indonesia (khususnya di lokasi penelitian) yang mewarisi baik unsur peranakan maupun totok atau termasuk golongan keturunan Cina yang secara budaya berpola lokal dan Cina.

Pada masyarakat Cina di Indonesia, terdapat perbedaan antara lapisan buruh dan lapisan majikan, golongan orang miskin dan golongan orang kaya. Perbedaan ini tidak begitu mencolok sebab golongan buruh tidak menyadari kedudukannya, demikian juga sebaliknya. Hal itu disebabkan oleh adanya ikatan kekeluargaan antara si buruh dengan majikannya (Vasanty, 1991 : 365).

Orang Cina *peranakan* kebanyakan dari Hokkien dan merasa dirinya lebih tinggi dari *Cina totok*, yang mereka anggap berasal dari kalangan kuli dan buruh. Sebaliknya, *Cina totok* memandang rendah *Cina peranakan* karena mereka dianggap mempunyai darah campuran (Vasanty, 1991 : 365).

Hal lain yang juga menyebabkan pelapisan sosial adalah adanya perbedaan orientasi pendidikan di antara mereka. Ada yang berpendidikan dengan orientasi ke Cina, ada juga yang berorientasi ke Indonesia atau Barat. Di antara mereka terdapat anggapan bahwa dirinya lebih tinggi dibanding yang lain. Umumnya, orang kaya di dalam masyarakat Cina tidak mau bekerja sama dengan orang yang miskin.

Realitas sosial yang terdapat di lokasi penelitian, umumnya masyarakat Cina memiliki status ekonomi yang tinggi dan sering kali menimbulkan kecemburuan sosial. Hal yang demikian wajar terjadi, sebab secara objektif masyarakat Cina telah memiliki "etos kerja" yang lebih tinggi dari masyarakat lainnya. Untuk memahami mengapa etos kerja masyarakat Cina lebih tinggi, kiranya dapat digunakan tesis Weber : "*Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*." Pada tesis itu Weber dapat menunjukkan korelasi positif antara ajaran agama dengan perilaku ekonomi.

Pemahaman terhadap ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Cina akan dapat menjelaskan tingkah laku ekonominya.

Menurut Adicondro, tiga ajaran **Han San Wei Yi** (tiga agama yang pada hakekatnya satu) yang merupakan penjelmaan dari ajaran Kong Hu Tstu, Taoisme, dan Budhisme relevan untuk ditelaah (Intani, 1989 : 31). Ajaran Kong Hu Tstu sebagai salah satu sumber filsafat hidup orang Cina sangat menekankan pengejaran kebajikan dan kesempurnaan manusia yang hakiki (Yen). Namun, wadah yang paling baik untuk melaksanakan dan menghayati Yen ini, adalah "hubungan antara orang tua dan anak", lebih khusus lagi "hubungan antara ayah terhadap anak laki-lakinya" (tsun-tse). Pengabdian antara anak laki-laki terhadap ayahnya (Chao) dapat dikatakan sebagai salah satu sokoguru filsafat hidup Han San Wei Yi (Intani, 1989 : 32).

Ajaran yang lain adalah materialisme dan organisme yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ajaran materialisme merupakan usaha meningkatkan standar hidup kebendaan melalui kerja keras, hidup hemat dan ulet serta selalu berusaha meningkatkan kecakapan teknis maupun kecakapan kerja sama. Sedangkan organisme dimanifestasikan dalam ikatan saling percaya di antara mereka. Dengan demikian, orang Cina akan lebih mendahulukan memperkaya kaum kerabatnya. Bagi orang Cina usaha bersama (Hui atau Kongsi) bukan semata-mata tulang punggung pencapaian suatu sasaran ekonomi, melainkan sekaligus tujuan. Oleh sebab itu, kemampuan kerja sama harus dilihat sebagai salah satu tingkat ukuran dalam menilai kewiraswastaan seorang usahawan Cina. Kerja sama dalam perdagangan merupakan hal yang teramat penting bagi orang Cina. Misalnya masalah modal dalam dagang, jika tidak dapat ditanggung sendiri biasanya dipecahkan dengan jalan berkongsi. Anggota kongsi didasarkan pada perasaan "in-group", sehingga dasarnya lebih ditekankan pada faktor etnik kultural.

Selain ajaran tentang kebajikan, materialisme, dan organisme, masyarakat Cina mempunyai pandangan bahwa individu adalah bagian dari keluarga, keluarga bagian dari clan, dan clan bagian dari seluruh bangsa. Oleh karena itu, dapat dimengerti, mengapa dalam melakukan bisnis, pengusaha Cina selalu mencari mitra dari anggota keluarganya atau dari sahabat dekatnya. Kenyataan demikian masih dilengkapi dengan sistem keluarga yang patrilineal. Dalam

sistem itu, hak waris jatuh kepada anak laki-laki dan struktur keluarga pun cukup membentengi, sehingga memungkinkan akumulasi serta mobilisasi modal tetap di masyarakat Cina.

Dari uraian di atas, Intani (1989 : 26) menyimpulkan bahwa :

"Perikehidupan yang layak" merupakan salah satu tuntutan dalam delapan jalan suci ajaran Budha. Pemeluk agama Budha seringkali menyatakan bahwa mereka akan tetap setia kepada warisan kebudayaannya. Kesejahteraan spiritual dan kekayaan materil sesungguhnya tidak saling bertentangan.

Ada suatu kesepakatan universal bahwa sumber kemakmuran yang fundamental adalah kerja manusia. Dalam pandangan umat Budha, fungsi kerja paling sedikit menyangkut 3 segi : 1. Untuk memberi kesempatan pada manusia memanfaatkan dan mengembangkan kemampuannya; 2. Memungkinkan manusia mengatasi "egosentrisnya" dengan ikut serta bersama orang-orang lain dalam suatu tugas bersama; 3. Untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan bagi suatu kehidupan.

Konsekuensi yang ditimbulkan oleh pandangan ini tidak hanya terhenti di sini. Mengorganisir kerja secara tidak bijaksana, hingga kerja itu tidak berarti, membosankan, tidak berguna akan dinilai sebagai kejahatan. Mengejar kesenangan dengan melalaikan kerja akan dinilai sebagai kurang pengertian terhadap salah satu kebenaran dasar dari eksistensi manusia. Kerja dan kesenangan adalah dua bagian yang saling melengkapi dalam proses kehidupan, yang tidak dapat dipisahkan tanpa merusak kegairahan kerja itu sendiri maupun kesenangan.

Dengan demikian, ajaran agama yang dianut sebenarnya merupakan kegiatan rohaniah, yang pengaruhnya mempunyai kekuatan-kekuatan lain. Menurut Weber, cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan harus dapat memenuhi kewajiban yang dibebankan kepada individu dalam kehidupannya di dunia ini. Ini adalah tugas dan panggilan hidup yang sudah jelas lapangannya untuk dipenuhi. Atas dasar pandangan ini, Budhisme memandang bahwa kerja adalah panggilan bukan sekadar memenuhi kebutuhan hidup namun lebih dari itu, yaitu sebagai tugas suci (*mission sacree*). Oleh sebab itu, penyucian kerja akan menjamin kepastian diri terhadap

keselamatan, sedang pengingkaran atas dunia kerja akan menimbulkan kesengsaraan hidup. Jelaslah bahwa ajaran agama menekankan nilai-nilai ketekunan, hemat, mempunyai perhitungan, rasional, memiliki pengendalian diri dan mengharuskan mencari pasangan yang tepat serta sukses dalam kehidupannya.

Batak

Masyarakat Batak memiliki sistem kekerabatan yang patrilineal, yakni setiap anggota dalam masyarakat itu, termasuk ke dalam suatu marga (pengelompokan orang-orang yang membentuk kesatuan atas dasar prinsip perhitungan menurut garis keturunan laki-laki. Dalam hal ini istri termasuk anggota suaminya). Anggota yang semarga menganggap sesamanya sebagai kerabat dari satu nenek moyang dan karena itu merupakan satu kesatuan. Perkawinan dalam lingkungan sesama marga dilarang, sehingga perkawinan terjadi dengan orang yang termasuk lingkungan marga lain (*exogami marga*).

Hubungan perkawinan dalam masyarakat Batak adalah hubungan yang disebut *asimetrikal*. Sebagai contoh untuk menjelaskan hubungan asimetrikal adalah sebagai berikut : Seorang pemuda dari marga A mengambil gadis dari marga B, sedangkan seorang pemuda dari B tidak boleh mengambil gadis dari marga A, tetapi harus mengambil gadis dari marga C, dan seterusnya.

Atas dasar garis keturunan dan hubungan perkawinan, maka semua warga masyarakat Batak dapat saling mengikat segala aktivitas hidup bersama, baik antara seorang dengan orang lain maupun antarwarga sebuah kelompok. Dalam kehidupan masyarakat Batak, aktivitas-aktivitas hidup bersama antara lain terdapat pada pesta-pesta, seperti perkawinan, mendirikan rumah dan upacara-upacara keagamaan. Di dalam setiap pesta dalam masyarakat Batak harus tampak tiga kelompok kerabat, yaitu *Dongan Salutuha*, *Hula-hula*, dan *Boru* yang mempunyai hubungan khusus dengan yang menyelenggarakan pesta. Kelompok kerabat yang disebut *Dongan Salatuha* terdiri atas orang-orang semarga di mana salah satu anggota dari kelompok itu adalah orang yang menyelenggara-

kan pesta. Kelompok yang disebut *Hula-hula* terdiri atas orang-orang yang menjadi pihak pemberi gadis dalam hubungan perkawinan terhadap pihak yang menyelenggarakan pesta. Sedangkan kelompok kerabat yang disebut *Boru* terdiri atas orang-orang yang menjadi pihak marga penerima gadis dari pihak marga yang melaksanakan pesta. Pada masyarakat ini terdapat perkawinan ideal, yakni seorang laki-laki diutamakan untuk kawin dengan anak perempuan dari saudara kandung laki-laki ibunya.

Pada masyarakat Batak terdapat tiga kategori pelapisan sosial, yaitu lapisan atas yang terdiri atas para pejabat pemerintah baik sipil maupun militer, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, dan para orang kaya atau orang-orang yang dianggap berhasil dalam usahanya, terutama yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan pendidikan. Lapisan menengah, yaitu para pedagang dan pemilik toko, para petani, dan pemilik tanah. Lapisan bawah yaitu para buruh kasar, sopir, kenek mobil, calo, dan para pedagang eceran yang pada hakikatnya sangat bergantung kepada orang lain yang kedudukannya lebih tinggi dari mereka.

Ciri-ciri orang Batak menurut Margarete Schwezer (dalam Prisma No. 4 April 1979) di antaranya berani dan kasar. Keberanian orang Batak itu terutama terlihat dalam mengajukan pendapat atau pendirian, meskipun pendapat atau pendirian itu tidak sesuai dengan pendapat orang lain. Seorang Batak tidak mengenal rasa takut apabila harus mengalami konflik dengan seseorang yang status sosialnya lebih tinggi dari dirinya, melainkan ia akan membelak posisinya dengan sungguh-sungguh. Arti ciri kasar hampir sama dengan pengertian berani yang telah disebutkan di atas. Ciri-ciri kekasaran orang Batak ini tampak dalam beberapa tingkah laku, berbicara dengan suara yang keras, dan sering berkelahi di depan orang lain. Selain itu, mereka selalu berani mengambil keputusan apa saja bila perlu dan mengemukakan pendapat sendiri walaupun akibatnya kurang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Mengenai ciri kasar selain mempunyai implikasi yang kurang baik untuk dirinya (pergaulan dengan seseorang yang kasar sering kurang enak), juga ditekankan bahwa mereka (orang Batak) kasar dalam arti tidak dibuat-buat, terus terang, dan tidak menurut norma-norma kesopanan yang berlebihan.

Padang (Minangkabau)

Mengenai pelapisan sosial, etnik Minang membagi masyarakat ke dalam tiga golongan, yaitu golongan *tinggi*, *menengah*, dan *rendah*. Pada masyarakat ini, golongan bangsawan betul-betul mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Seorang laki-laki di kalangan bangsawan jika ia kawin, tidak perlu memberi belanja kepada isterinya. Bahkan untuk mengawini seorang gadis, ia akan mendapat sejumlah uang yang besar sebagai uang jemputan. Ia dengan langsung akan dapat menaikkan status sosial dari keluarga isterinya, sebab anak dari hasil perkawinannya akan memiliki status sosial yang lebih tinggi dari status sosial isterinya. Misalnya, seorang bangsawan di Pariaman yang bergelar "Rajo" kawin dengan wanita biasa, maka anak dari hasil perkawinannya akan mendapat gelar "bagindo" (lebih rendah dari rajo). Sebaliknya, seorang wanita dari golongan bangsawan dilarang kawin dengan laki-laki biasa, apalagi dengan golongan yang paling rendah.

Perbedaan lapisan sosial dapat dihubungkan dengan perbedaan kedatangan suatu keluarga ke suatu tempat tertentu. Keluarga yang mula-mula datang dianggap sebagai keluarga bangsawan dan dalam masyarakat Minangkabau dikenal *urang asa* (orang asal). Keluarga-keluarga yang datang kemudian, tetapi tidak terikat seluruhnya pada keluarga asal, dapat menjadi orang biasa atau golongan pertengahan. Tidak demikian halnya dengan keluarga-keluarga yang datang kemudian lalu menumpang pada keluarga-keluarga yang lebih dahulu datang. Mereka inilah yang dianggap paling rendah dalam masyarakat yang bersangkutan.

Mobilitas sosial dapat saja terjadi pada masyarakat Minangkabau. Misalnya, para bangsawan yang sangat terikat pada penguasaan tanah; bertambahnya jumlah keturunan menyebabkan tanah yang mereka kuasai semakin sedikit sehingga mereka menjadi miskin. Sebaliknya, orang yang berasal dari lapisan rendah dan tidak terikat dengan tanah, akan berusaha di sektor perniagaan dan tidak sedikit yang mengalami kemajuan. Dengan kekayaannya, mereka bisa naik derajat. Selain itu, terbukanya kesempatan kerja di kantor-kantor pemerintahan menyebabkan timbulnya golongan elit baru.

Proses mobilitas sosial ini berpengaruh terhadap perubahan sistem pelapisan sosial yang tradisional.

Garis keturunan masyarakat Minang, diperhitungkan menurut garis matrilineal. Dengan demikian, seseorang termasuk keluarga ibunya dan bukan keluarga ayahnya. Seorang ayah berada di luar keluarga anak dan isterinya, sehingga pengertian keluarga batih menjadi kabur. Keluarga batih tidak merupakan kesatuan yang mutlak. Meskipun demikian keluarga batih tetap memegang peranan penting dalam pendidikan masa depan anak-anak mereka, dan tidak semata berfungsi sebagai pengembangan keturunan.

Kesatuan keluarga terkecil disebut *paruik*. Dalam sebagian masyarakat Minangkabau, ada kesatuan *kampung* yang memisahkan *paruik* dengan *suku* sebagai kesatuan kekerabatan. Dari ketiga macam kesatuan kekerabatan ini, hanya *paruik* yang betul-betul dapat dikatakan sebagai kesatuan yang benar-benar bersifat genealogis.

Kepentingan suatu keluarga diurus oleh seorang laki-laki dewasa dari keluarga itu yang bertindak sebagai *ninieki mamak* bagi keluarganya. Istilah *mamak* itu berarti saudara laki-laki ibu. Tanggung jawab untuk memperhatikan kepentingan sebuah keluarga memang terletak pada pundak seorang atau beberapa orang mamak. Hal ini tidak berarti bahwa generasi yang lebih tua dari mereka dibebaskan dari kewajiban itu. Generasi yang lebih tua tersebut disebut *ninieki mamak*, yang kadang disingkat menjadi *mamak*.

Mengenai kehidupan beragama, sebagian besar masyarakat Minangkabau beragama Islam dan mereka selalu berusaha taat dalam menjalankan ajaran agamanya.

Keadaan dan Sejarah Perkembangan Suku Bangsa "Pendatang" di Lokasi Penelitian.

Penduduk RW 05 Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler Kotamadya Bandung dapat dikatakan heterogen pada saat ini. Selain penduduk asli yang berasal dari suku bangsa Sunda, satu demi satu

masuk pula ke wilayah ini para pendatang dari berbagai suku bangsa, baik yang termasuk ke dalam golongan pribumi maupun para pendatang yang termasuk kaum nonpribumi. Mereka yang termasuk ke dalam golongan pribumi terdiri atas para pendatang yang berasal dari suku bangsa Jawa, Batak, Padang, Manado, dan Bugis Makasar. Sedangkan nonpribumi diwakili oleh warga negara keturunan Cina dan Arab. Kehadiran para pendatang tersebut mewarnai kehidupan bermasyarakat di wilayah RW 05.

Para penduduk di luar suku bangsa Sunda yang masuk ke dalam wilayah RW 05, tidak datang secara bersama-sama dalam kurun waktu yang sama pula. Tahun 1970-an merupakan masa awal masuknya para pendatang asal suku bangsa lain. Suku bangsa Jawa merupakan pendatang pertama yang menambah heterogenitas penduduk di wilayah ini. Kedatangan para pendatang asal Jawa ini terdiri atas dua periode, yang masing-masing memiliki karakteristik berlainan, terutama dilihat dari jenis mata pencaharian hidup mereka.

Periode pertama terjadi kurang lebih awal tahun 1970-an. Mereka berasal dari berbagai kota yang terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Faktor pendorong yang menyebabkan mereka datang ke Bandung pada umumnya karena motivasi ekonomi, yakni untuk berdagang. Sebagian besar pendatang asal suku bangsa Jawa tersebut adalah laki-laki, dan jenis mata pencaharian atau kegiatan usaha yang mereka lakukan adalah sebagai tukang bakso. Kalaupun ada di antaranya kaum perempuan, biasanya mereka adalah istri atau adik perempuan dari laki-laki yang telah lebih dulu datang ke wilayah ini. Kegiatan usaha yang ditekuni oleh para wanita Jawa adalah sebagai penjual jamu gendong.

Pada periode berikutnya, tepatnya sekitar tahun 1992 masuk lagi para pendatang yang berasal dari Jawa. Kedatangan mereka seiring dengan tumbuh dan berkembangnya industri dan pabrik-pabrik yang berdiri di sepanjang Jalan BKR, atau yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan Jalan Lingkar Selatan. Dengan demikian, mereka datang ke tempat tersebut tidak seperti para pendahulunya yang memang datang hanya untuk berdagang. Mereka masuk ke wilayah tersebut untuk mendekati tempat bekerja, karena pada periode ini sebagian besar dari mereka adalah karyawan dari pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang ada di sepanjang Jalan BKR tadi. Mereka umumnya masih

berusia muda, baik wanita maupun pria. Ada pula yang datang karena sengaja dibawa oleh penduduk setempat atau orang lain untuk dijadikan pembantu rumah tangga.

Ada hal yang unik dari para pendatang yang berasal dari suku bangsa Jawa tersebut, berkaitan dengan status mereka di RW 05 ini. Di antara pendatang Jawa tersebut, hanya ada beberapa orang yang statusnya sebagai penduduk tetap di wilayah ini. Sejak awal mereka datang ke Kampung Tanjung ini memang untuk tinggal dan menetap di sini. Mereka memiliki rumah pribadi yang cukup bagus dan memiliki pekerjaan yang mapan. Sementara itu, sebagian besar lainnya berstatus sebagai penduduk tamu. Status tersebut tetap saja dipertahankan, meskipun ada yang telah tinggal di tempat tersebut hampir sepuluh tahun lamanya. Hal tersebut terjadi karena pada umumnya mereka tidak ingin melepaskan ikatan mereka dengan kampung halaman.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Pada umumnya mereka merasa tak perlu menjadi penduduk tetap di wilayah tersebut, meskipun ditawarkan atau diminta oleh staf atau pengurus daerah. Selain karena datang ke kota hanya untuk sementara saja selama bekerja, mereka yang sudah berkeluarga pun pada umumnya tidak membawa anak dan isterinya. Dengan demikian, dalam interval waktu tertentu, mereka akan kembali ke kampung halaman menengok anak isteri sambil membawa uang. Lain halnya jika di antaranya ada yang menikah dengan penduduk setempat, biasanya akan mengubah status mereka. Kalaupun ada di antaranya yang membawa anggota keluarga mereka, biasanya tidak secara utuh. Ada saja yang ditinggalkan di kampungnya, apakah itu isterinya atautkah anak-anaknya.

Para pendatang yang berasal dari suku bangsa Jawa tinggal di wilayah RW 05 dengan cara menyewa satu petak kamar. Dalam satu petak kamar tersebut ada yang ditempati oleh sepasang suami isteri, ada pula yang dihuni sejumlah orang dengan biaya sewa ditanggung bersama oleh mereka. Kondisi tempat tinggal yang mereka tempati sangat sederhana. Keadaan tersebut bukan merupakan penghalang bagi mereka, yang penting di tempat tersebut ada tempat untuk tidur. Padahal menurut sejumlah informasi, kondisi kehidupan ekonomi di kampung halaman mereka jauh lebih baik bila dibandingkan dengan keadaan di tempat kerja mereka.

Mereka datang karena memperoleh informasi dari teman atau keluarganya yang telah lebih dulu tinggal di wilayah ini, atau ada pula yang sengaja mencari sendiri peluang dan kesempatan kerja yang terdapat di sekitar lokasi penelitian. Para pendatang dari Jawa ini termasuk salah satu pendatang dengan jumlah yang dapat dikatakan cukup banyak bila dibandingkan dengan suku bangsa lainnya. Akan tetapi hampir berimbang bila dibandingkan dengan etnis Cina, hanya status mereka yang berbeda. Orang Jawa tinggal di RW 05 Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler ini sebagai pendatang atau warga tamu, sedangkan Warga Negara Indonesia keturunan Cina statusnya adalah warga tetap.

Saat ini pendatang yang berasal dari etnik Cina jumlahnya cukup banyak. Sebagian besar dari mereka memilih tempat di RW 05 ini untuk menetap menjadi warga tetap dengan cara membeli tanah atau rumah untuk ditempati. Meskipun demikian, ada pula di antaranya yang hanya menyewa atau mengontrak rumah tempat tinggal. Berbeda dengan para pendatang asal Jawa yang memilih tempat tinggal di rumah yang berpetak-petak mirip "bedeng" dan berada di dalam gang, pendatang etnik Cina biasanya memilih tempat tinggal yang berada di sepanjang Jalan Babakan Tarogong dan Jalan Peta/Lingkar Selatan. Etnik Cina yang tinggal di gang-gang kecil jumlahnya dapat dihitung dengan jari.

Pada tahun 1970-an, jumlah pendatang etnik Cina dapat dihitung dengan jari, karena masih sedikit. Selain menetap di wilayah RW 05, mereka juga biasanya membuka toko yang menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga. Peningkatan terjadi karena adanya pengembangan jalan-jalan di wilayah tersebut. Kurang lebih pada tahun 1985-an di wilayah tersebut dimulai rencana pembuatan Jalan Lingkar Selatan serta Jalan Pasir Koja Buntu. Sejak itu etnik Cina yang bukan penduduk RW 05 mulai mengincar sebagian besar rumah yang berada di sepanjang Jalan Babakan Tarogong, serta tanah dan rumah yang diperkirakan nantinya berada di sepanjang Jalan Lingkar Selatan. Pada umumnya rumah atau tanah yang mereka beli dipakai untuk rumah tinggal dan kegiatan ekonomi. Misalnya untuk tempat usaha, atau dijadikan gudang penyimpanan barang.

Orang Cina yang masuk ke wilayah ini umumnya tidak mempunyai ikatan kekerabatan satu sama lain, tidak seperti halnya yang terjadi pada para pendatang yang berasal dari suku bangsa Jawa. Mereka datang karena berkeinginan untuk menetap di wilayah tersebut. Hampir setiap orang Cina yang berada di wilayah tersebut memiliki kegiatan ekonomi, seperti membuka toko atau warung, membuka usaha percetakan, sablon, pabrik, bengkel, atau usaha-usaha lainnya. Pada umumnya rumah-rumah mereka cukup bagus dengan perlengkapan rumah tangga serta mobil-mobil pribadi. Dengan kata lain kondisi kehidupan ekonomi mereka sudah mapan, walaupun ada di antaranya yang hidup dalam kondisi sangat sederhana.

Suku bangsa yang lainnya yaitu etnik Batak, mulai datang ke wilayah RW 05 kurang lebih tahun 1975-an. Tujuan mereka tinggal di daerah tersebut adalah untuk menetap. Jumlah pendatang etnik Batak memang lebih sedikit bila dibandingkan dengan pendatang yang berasal dari etnik Jawa dan Cina. Etnik Batak dikenal suka meminjamkan uang dengan menetapkan sejumlah bunga atau dikenal dengan sebutan rentenir. Namun demikian tidak semua orang Batak melakukan praktek rentenir, melainkan ada juga yang membuka warung atau menjadi karyawan swasta. Mereka datang ke wilayah ini karena keinginan sendiri, atau memanfaatkan jaringan kekerabatan. Dengan demikian, tak heran kalau ada di antara mereka yang terikat oleh hubungan kekerabatan. Sebagian besar dari mereka memiliki rumah pribadi di tempat tersebut, tidak menyewa seperti layaknya para pendatang yang berasal dari suku bangsa Jawa.

Pendatang yang berasal dari etnik Padang jumlahnya hampir berimbang dengan pendatang dari etnik Batak. Mereka termasuk ke dalam gelombang pendatang baru, karena masuknya diperkirakan dimulai sekitar tahun 1990-an ke atas. Hampir semua orang Padang yang tinggal di tempat tersebut datang ke wilayah ini dengan tujuan menetap. Meskipun pada mulanya ada yang datang dan tinggal di wilayah tersebut dengan cara menyewa untuk beberapa tahun lamanya, karena merasa cocok, rumah tersebut kemudian dibelinya. Orang tersebut kemudian menjadi penduduk tetap dan tinggal di RW 05 dengan segala hak dan kewajibannya.

Mata pencaharian mereka bervariasi, ada yang membuka rumah makan Padang; menjadi pedagang kaki lima di berbagai pusat kota; menjadi karyawan swasta di berbagai perusahaan atau menjadi pengusaha angkutan kota.

Selain keempat suku bangsa seperti terurai di atas, suku bangsa lain yang mewarnai keanekaragaman latar belakang sosial budaya warga masyarakat RW 05 adalah Manado, Bugis Makasar, dan keturunan Arab. Akan tetapi jumlah mereka jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan keempat suku bangsa yang telah disebutkan sebelumnya. Mereka pun dapat dikatakan sebagai pendatang baru, karena baru di atas tahun 1990-an memasuki wilayah RW 05.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Uraian berikut akan mencoba mengungkapkan hasil penelitian yang didapat dengan berbagai teknik pengumpulan data serta dari sumber sekunder, dan analisis berupa interpretasi dari data yang berhasil dikumpulkan melalui acuan teori seperti terurai pada bab terdahulu.

A. Hasil Penelitian

Bagian ini akan berisi uraian mengenai identitas responden, konsep mengenai kelompok sosial, nilai budaya, integrasi, pandangan tentang hubungan dengan kelompok lain, dan pengetahuan mereka tentang sistem nilai budaya nasional. Untuk memperjelas pokok masalah, hasil wawancara dengan responden dipadukan dengan informasi dari informan.

1. Identitas Responden

Yang dimaksud dengan identitas ialah keadaan atau kondisi yang melekat pada individu/responden. Tentu saja kondisi tersebut akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Identitas tersebut

ditentukan sebagai variabel pengaruh yang secara langsung maupun tidak, akan mempengaruhi responden dalam mengambil keputusan atau menjawab pertanyaan pada saat wawancara.

Atas dasar metodologis seperti tercantum pada bab I.E., empat suku bangsa "pendatang" diwakili oleh masing-masing 5 responden yang dianggap representatif untuk populasi. Sedangkan suku bangsa "asal", yaitu suku bangsa Sunda diwakili oleh 15 responden. Dengan demikian, jumlah responden menjadi 35 orang.

Gambaran identitas responden yang akan diuraikan meliputi usia, pekerjaan, latar belakang pendidikan, status sipil, dan pendaftaran penduduk.

Responden dengan jumlah terbanyak berada pada kelompok umur 33 - 50 tahun (54%), kemudian 34% berusia antara 15 - 22 tahun, dan 12% berusia di atas 50 tahun. Pertimbangan banyaknya responden yang berusia antara 33 - 50 tahun karena pada rentang usia tersebut, seseorang dianggap sudah matang dalam mengambil keputusan sesuai hukum dan telah memiliki pengalaman hidup yang relatif "lengkap". Apabila dihubungkan dengan ketentuan Biro Pusat Statistik mengenai usia tenaga kerja yang berkisar antara 10 sampai 50 tahun, maka sebagian besar responden (83%) berada pada usia kerja dan 12% lainnya termasuk bukan usia kerja. Secara umum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa responden merupakan penduduk potensial dan termasuk dalam golongan usia produktif sehingga memungkinkan untuk bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarganya serta bisa melakukan tindakan-tindakan hukum.

Sebagian besar responden menggantungkan hidupnya hanya pada pekerjaan pokok. Sedikit sekali responden yang memiliki pekerjaan sampingan, di antaranya adalah pegawai negeri, pedagang berskala sedang/besar, atau pengusaha industri kecil. Hal tersebut memberi indikasi lebih lanjut bahwa sebagian besar responden kurang memiliki waktu yang cukup untuk berusaha mencari tambahan penghasilan dari bidang lain. Mereka umumnya bekerja 8 -10 jam setiap hari, antara pukul 07.00 sampai 15.00 atau 17.00. Dengan jam kerja seperti itu, sudah tentu interaksi sosial antarwarga pun menjadi kurang intensif, apalagi apabila hari libur pun digunakan untuk berusaha. Variasi jenis pekerjaan responden (pekerjaan

pokok), terurai sebagai berikut : bidang perdagangan (toko/kios, warung, pedagang keliling, dan pedagang kaki lima) sekitar 42%, jasa (pertukangan, tukang becak, kuli, sopir, dan calo) sebesar 35%, industri (industri rumah tangga/kecil, buruh pabrik, dan industri sedang) sebanyak 18%, dan pegawai negeri sebanyak 5%. Adapun pekerjaan sampingan yang dilakukan 38% responden adalah di bidang perdagangan dan jasa.

Pendidikan mempunyai peranan penting bagi penduduk di dalam mengadopsi unsur budaya baru yang positif dan menangkal unsur budaya yang dianggap tidak sesuai atau kurang berkenan. Selain itu, latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap pekerjaan dan usaha untuk meniti hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan, pola pikirnya pun diharapkan akan semakin rasional dalam menyaring setiap masukan. Dengan demikian, kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan jaman dan dalam berinteraksi dengan warga yang lain akan semakin baik.

Sebagian besar responden mempunyai latar belakang pendidikan an yang relatif rendah (tamat SD 42%, dan tidak tamat SD 10%). Responden lainnya berpendidikan SLP (25%), SLA (18%), dan tamat Akademi/Perguruan Tinggi (5%). Ditinjau dari segi pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan tidak diimbangi dengan keikut-sertaannya dalam pendidikan luar sekolah seperti kursus. Hal ini berarti bahwa responden sebagai tenaga kerja potensial, dihadapkan pada kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan karena terbatasnya lapangan kerja yang tersedia bagi pendidikan setingkat mereka.

Di lihat dari status sipilnya, sebagian besar responden yang seluruhnya berjenis kelamin laki-laki ini, sudah menikah/berkeluarga (78%), sedangkan yang belum menikah 16% dan duda 6%. Walaupun belum berkeluarga, responden dianggap kepala keluarga karena di dalam keluarga ia merupakan satu-satunya anggota keluarga yang bekerja dan bertanggung jawab atas kehidupan keluarga/orang tua atau saudaranya.

Seluruh responden mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kotamadya Bandung, sebagian kecil di antaranya berbeda kecamatan dengan kecamatan lokasi penelitian, tercatat sebagai berikut : 60% tinggal lebih dari 5 tahun, 32% telah tinggal di antara 3 - 4

tahun, dan 8% telah tinggal di lokasi penelitian selama kurang lebih 2 tahun. Telah tinggal paling sedikit 2 tahun merupakan batasan atau kriteria responden yang dibuat oleh peneliti. Pertimbangannya adalah rentang waktu kurang dari dua tahun dianggap kurang atau belum mengetahui secara mendalam pola dan corak interaksi sosial di lingkungannya.

2. Kelompok Sosial

Untuk dapat menghadapi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik fisik maupun sosial, manusia mempergunakan pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Selain itu, manusia harus hidup berka- wan dengan manusia-manusia lain untuk bisa mempermudah proses penyesuaiannya dengan lingkungan dan melestarikan jenisnya. Naluri dari manusia untuk selalu hidup dengan orang lain, disebut *gregariousness* dan karena itu manusia juga disebut *social animal* (hewan sosial; hewan yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama). Di dalam hubungan antara manusia dengan ma- nusia lain, yang agaknya paling penting, adalah reaksi yang timbul sebagai akibat dari hubungan-hubungan tadi (Soerjono Soekanto, 1982 : 110).

Oleh karena tidak mungkin hidup sendiri, maka manusia mem- bentuk kelompok sosial atau *social group*. Kelompok sosial terse- but merupakan himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama akibat adanya hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan kesadaran untuk saling menolong. Kelompok so- sial terkecil dalam suatu masyarakat disebut keluarga. Murdock (1949) mengungkapkan bahwa keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat, yang terbentuk dari hubungan laki-laki dengan wanita, hubungan yang berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak.

Keluarga, di manapun berada, merupakan satu sistem penge- lompokan dan merupakan pranata sosial yang universal. Sifat yang universal itu disebabkan oleh adanya fungsi yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, sejak lahir sampai dewasa dan tua.

Keluarga inti atau batih (*nuclear family*) yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak yang belum kawin, tampak pada keluarga-keluarga suku bangsa Sunda dan Jawa dengan prinsip garis keturunan *parental*. Sedangkan pada suku bangsa Batak, Cina, dan Padang (Minang), yang memegang peranan dalam kelompok kerabat adalah keluarga besar (*extended family*) yang terdiri atas dua atau lebih keluarga inti dan diikat oleh garis keturunan yang unilateral; Batak dan Cina menganut garis keturunan *patrilineal* dan Padang (Minang) dengan prinsip *matrilineal*.

Responden dari etnik Sunda menuturkan bahwa hubungan sosial di dalam keluarga batih amat erat. Keluarga batih merupakan tempat paling aman bagi anggotanya di tengah-tengah hubungan kerabat yang lebih besar dan di tengah masyarakat. Oleh karena kurangnya jumlah perumahan dan alasan ekonomi, dalam rumah tangga keluarga batih juga ada kalanya terdapat keponakan atau mertua.

Di samping keluarga batih, terdapat juga sekelompok kerabat yang masih sadar akan hubungan kekerabatannya dan umumnya terbentuk akibat adanya perkawinan. Kelompok ini disebut *baraya*. Mereka biasanya diundang pada perayaan-perayaan penting seperti perkawinan, khitanan, dan perayaan/upacara sepanjang lingkaran hidup lainnya. Baraya juga dianggap sebagai sumber potensial yang dapat diminta pertolongan di kala menderita atau tertimpa musibah, seperti kematian dan kecelakaan. Baraya ini dalam antropologi, secara teknis disebut *kindred*.

Mengenai prinsip keturunan, responden mengungkapkan bahwa sistem kekerabatan orang Sunda bersifat *bilateral*, yaitu garis keturunan yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui laki-laki maupun wanita. Adapun istilah kekerabatannya menunjukkan ciri *bilateral* dan *generasional*. Dilihat dari sudut Ego, orang Sunda mengenal istilah-istilah untuk tujuh generasi ke atas dan tujuh generasi ke bawah. Walaupun demikian, setiap responden dari etnik Sunda umumnya hanya mengenal tiga generasi ke atas (*kolot*, *embah*, dan *buyut*), serta tiga generasi ke bawah (*anak*, *incu*, dan *buyut*).

Responden yang sebagian besar menganggap dirinya melarat, mengungkapkan tentang stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial atau

penggolongan sosial orang Sunda didasarkan atas status dan peranannya dalam masyarakat, serta kekayaan materi. Walaupun demikian, perbedaan-perbedaan itu tidak tampak menonjol karena hubungannya bersifat kekeluargaan dan setiap kelompok saling membutuhkan secara timbal balik.

Golongan atau kelompok yang didasarkan atas status dan peranannya dalam masyarakat adalah golongan pimpinan formal dan nonformal. Golongan ini merupakan penentu dalam pengambilan keputusan yang menyangkut segala aspek kehidupan sehari-hari. Masyarakat selalu berusaha taat terhadap semua peraturan yang dikeluarkan, baik oleh pimpinan formal maupun nonformal. Pimpinan formal merupakan pimpinan yang duduk dalam lembaga pemerintahan, seperti lurah, ketua RW, dan ketua RT. Sedangkan pimpinan nonformal merupakan pimpinan yang dipilih berdasarkan penghormatan dan penghargaan masyarakat karena usia, pengalaman, pengetahuan (ilmuwan atau ulama), dan peran di lingkungannya. Pimpinan nonformal biasa dikenal dengan sebutan tokoh masyarakat. Hubungan antara pimpinan formal dan nonformal bersifat kekeluargaan dan saling membutuhkan, terutama dalam pemecahan masalah yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Berdasarkan kekayaan materi, dikenal golongan *beunghar* (kaya), yaitu apabila mempunyai tanah yang luas, rumah besar, kendaraan bermotor, dan perabotan rumah tangga yang lengkap dan cenderung mewah. Sedangkan yang dianggap golongan melarat (miskin) biasanya bekerja sebagai buruh, rumah kumuh, perabotan rumah tangga seadanya, dan serba kekurangan. Hubungan antara *jalma beunghar* (orang kaya) dengan *jalma malarat* (orang miskin) bersifat kekeluargaan, saling mengisi, sehingga kelompok yang satu membutuhkan kelompok yang lainnya secara timbal balik.

Pada suku bangsa Jawa yang berprinsip kekerabatan sama dengan etnik Sunda, yaitu berintikan keluarga batih dengan prinsip keturunan bilateral, kelompok lebih besar dari keluarga disebut *sanak sedulur*. Kelompok kekerabatan ini terdiri atas kerabat keturunan dari seorang nenek moyang sampai derajat ketiga yang saling bantu apabila ada peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan kekerabatan. Selain itu, dikenal juga *alur waris*, yaitu kelompok ke-

kerabatan yang terdiri atas semua kerabat sampai tujuh turunan sejauh masih dikenal tempat tinggalnya. Adapun tugas terpenting dari para anggota *alur waris* adalah memelihara makam leluhur. Biasanya salah seorang dari warga *alur waris* yang tinggal di desa di mana terletak makam leluhur, ditunjuk untuk merawat secara intensif dan menghubungi anggota lain yang telah tersebar guna bersama-sama ikut merawat, atau menyumbang perawatan makam leluhur tersebut.

Menurut responden, walaupun seseorang tidak memiliki hubungan keluarga tetapi karena berasal dari daerah/kampung yang sama, maka yang bersangkutan dianggap kerabat. Adakalanya, karena sudah dekat, ia dianggap saudara sendiri dan kepadanya diberi kepercayaan penuh untuk ikut memikirkan kelangsungan hidup keluarga yang bersangkutan.

Mengenai penggolongan sosial, responden menentukan masih adanya anggapan seseorang termasuk *priyayi* atau *bendara*, yang menempati lapisan atas, dan *wong cilik* yang menjadi lapisan masyarakat bawah. *Priyayi* terdiri atas pegawai negeri dan orang terpelajar. *Bendara* adalah keluarga keraton dan keturunan bangsawan. Sedangkan *wong cilik*, adalah orang kebanyakan seperti petani, tukang, dan pekerja kasar lainnya. Menurut responden, sebagian besar orang Jawa yang ada di lokasi penelitian merupakan *wong cilik* yang merantau ke Bandung untuk mencari bekal hidup. Mereka umumnya datang berkelompok atau datang karena diajak oleh kerabat yang telah lebih dulu menetap. Di perantauan, mereka hidup berkelompok, tinggal berdekatan dengan alasan bisa saling membantu apabila mendapat kesulitan.

Para responden etnik Cina mempunyai pandangan bahwa individu adalah bagian dari keluarga, keluarga bagian dari klen, dan klen merupakan bagian dari bangsa. Uraian tersebut menyiratkan bahwa orang Cina masih terikat kuat pada nilai-nilai tradisional di mana kesetiaan primordial masih tinggi. Sebagian besar patuh pada tradisi, di mana solidaritas yang lebih kuat hanya dapat dibangun atas dasar *guan xi* (hubungan kekerabatan dekat), lalu tetap berkongsi dengan erabat dekat, orang semarga, atau sesama etnik Cina.

Orang Cina percaya bahwa *Shin yung* (hubungan saling percaya) hanya dapat dibangun di antara sesama mereka, karena itu

pula semua perusahaan yang dimiliki kelompok Cina cenderung mengangkat pegawai, khususnya pada posisi penting, dari kalangan anggota keluarga atau sahabat dekatnya. Kenyataan demikian masih dilengkapi dengan sistem keluarga yang *patrilineal*. Dalam sistem ini, hak waris jatuh pada anak laki-laki dan struktur keluarga pun cukup membentengi sehingga memungkinkan akumulasi dan mobilitasi modal tetap di masyarakat Cina. Kondisi seperti ini menyebabkan pembauran yang diharapkan terjadi antaretnik tidak seperti yang diharapkan. Kendala kultural ini memang sangat memerlukan penanganan yang saksama.

Mengenai stratifikasi sosial, responden menuturkan, bahwa pada etnik Cina di Indonesia terdapat perbedaan antara golongan buruh dan golongan majikan, golongan orang miskin dan kaya. Walaupun demikian, keduanya kurang menyadari kedudukan masing-masing karena masih sering didapati adanya ikatan kekeluargaan antara buruh dan majikan. Selain itu dikenal juga sebutan *Tionghoa peranakan* yang kebanyakan terdiri atas kuli dan buruh. Sebaliknya, *Tionghoa totok* memandang rendah *Tionghoa peranakan* karena dianggap mempunyai darah campuran.

Orang Batak, menurut responden dari etnik Batak, memperhatikan hubungan kekerabatan secara *patrilineal*, yaitu dihitung menurut garis keturunan laki-laki. Berdasarkan prinsip tersebut, seseorang dianggap satu kerabat atau satu marga apabila satu ayah, satu kakek, atau satu nenek moyang. Oleh karena itu, perkawinan dalam satu marga dilarang karena dianggap satu darah, sehingga perkawinan hanya dilakukan dengan anggota marga yang lain (*exogami*).

Hubungan perkawinan dalam masyarakat Batak adalah hubungan yang disebut *asimetrikal*, paling sedikit harus ada tiga buah kerabat atau marga. Kerabat pemberi gadis tidak boleh mengambil gadis dari kerabat penerima gadis, tetapi harus dari marga yang lain. Misalnya, seorang pemuda dari marga A mengambil gadis dari marga B. Pemuda dari marga C tidak boleh mengambil gadis dari marga A, tetapi harus mengambil gadis dari marga C. Kemudian, pemuda dari marga C boleh mengambil gadis dari marga A atau dari marga D, dan seterusnya. Perkawinan yang dianggap ideal

adalah apabila seorang pemuda menikah dengan anak perempuan dari saudara kandung laki-laki ibunya.

Sehubungan dengan prinsip perkawinan *asimetrikal*, pada sebuah pesta masyarakat Batak harus tampak tiga kelompok kerabat, yaitu *dongan saluhuta*, *hula-hula*, dan *boru*. Kelompok kerabat yang disebut *dongan saluhuta* terdiri atas orang-orang semarga, yang salah satu anggota kelompok tersebut adalah orang yang menyelenggarakan pesta. Kelompok yang disebut *hula-hula* terdiri atas orang-orang yang menjadi pihak pemberi gadis dalam hubungan perkawinan terhadap pihak orang yang menyelenggarakan pesta. Sedangkan kelompok kerabat yang disebut *boru* terdiri atas orang-orang yang menjadi pihak marga penerima gadis dari pihak marga yang melaksanakan pesta.

Menurut responden, pada masyarakat Batak terdapat tiga kategori sosial, yaitu *lapisan atas* yang terdiri atas para pejabat pemerintah, baik sipil maupun militer, para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan orang kaya atau orang-orang yang dianggap berhasil dalam usaha, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan pendidikan. Yang kedua adalah *lapisan menengah*, yaitu para pedagang dan pemilik toko, dan para petani pemilik tanah. Terakhir, *lapisan bawah/rendah*, yaitu para buruh kasar, sopir, kenek mobil, calo, dan para pedagang eceran yang pada hakikatnya sangat menggantungkan kehidupan kepada orang lain yang kedudukannya lebih tinggi.

Di lokasi penelitian, suku bangsa Minangkabau dikenal dengan sebutan orang Padang. Menurut responden dari etnik Minang, hal tersebut mungkin dihubungkan dengan salah satu kota di Sumatera yaitu Padang.

Garis keturunan dalam masyarakat Minang diperhitungkan secara matrilineal. Menurut prinsip ini, seseorang termasuk keluarga ibunya bukan keluarga ayahnya. Dengan demikian seorang ayah berada di luar keluarga anak dan istrinya. Oleh karena itu, keluarga batih menjadi kabur dalam sistem kekeluargaan Minangkabau. Keluarga batih tidak merupakan kesatuan yang mutlak, meskipun tidak dapat dibantah bahwa keluarga batih memegang peranan penting

dalam pendidikan dan masa depan anak-anak mereka, tidak hanya berfungsi untuk pengembangan keturunan.

Di lokasi penelitian, walaupun beberapa responden mencoba selalu memegang tradisi seperti di atas, kenyataannya berlaku seperti keluarga parental, yaitu yang memegang peranan dalam kelompok kerabat bukan keluarga besar atau keluarga ibu tetapi keluarga inti atau batih. Apalagi bagi responden yang telah tinggal lebih dari lima tahun di lokasi penelitian. Mereka telah menyerap prinsip-prinsip kekerabatan dari budaya dominan yang ada, yaitu budaya Sunda.

Stratifikasi sosial orang Padang/Minang menurut responden didasarkan atas kekayaan materi dan latar belakang pendidikan. Seorang yang memiliki harta relatif banyak atau telah menamatkan pendidikan di perguruan tinggi dianggap sebagai *bangsawan*. Strata kedua adalah *orang biasa*, yang hidup relatif cukup dan atau memiliki latar belakang pendidikan tidak rendah. Adapun strata ketiga adalah *orang paling rendah* yang serba kekurangan.

Selain atas dasar kekayaan materi dan pendidikan, perbedaan status sosial juga dihubungkan dengan perbedaan kedatangan sebuah keluarga ke dalam suatu tempat tertentu. Keluarga yang mula-mula datang dianggap sebagai keluarga *bangsawan*. Keluarga-keluarga yang datang kemudian, tetapi tidak terikat seluruhnya kepada keluarga terdahulu, dianggap sebagai *orang biasa*. Keluarga-keluarga yang datang kemudian dan menumpang pada keluarga yang lebih dulu datang disebut *orang paling rendah*.

3. Nilai Budaya

Nilai budaya merupakan konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga tadi (Koentjaraningrat, 1983 : 192).

Walaupun nilai-nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam bermasyarakat, tetapi sebagai konsep, suatu nilai

budaya bersifat sangat umum, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Namun, justru karena sifatnya yang umum, luas dan tidak konkrit itu, maka nilai-nilai budaya dalam sebuah kebudayaan berada dalam daerah emosional dari alam jiwa para individu yang menjadi warga dari kebudayaan bersangkutan. Kecuali itu, para individu sejak kecil telah diresapi dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya, sehingga konsep-konsep itu sejak lama telah berakar dalam alam jiwa mereka. Itulah sebabnya nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan tak dapat diganti dengan nilai-nilai budaya yang lain dalam waktu singkat.

Dalam setiap masyarakat, terdapat sejumlah nilai budaya yang saling berkaitan sehingga menjadi suatu sistem. Sistem tersebut digunakan sebagai pedoman dan memberi dorongan kuat terhadap arah kehidupan warga masyarakat yang bersangkutan.

Pada masyarakat Sunda terdapat ungkapan *gede luang legok tapak* yang berarti pengalaman itu penting untuk menambah kualitas pribadi. Oleh karena itu, pengalaman hidup dan pengetahuan bagi orang Sunda merupakan sesuatu yang utama dalam mencapai kemajuan lahir dan kepuasan batin. Hal ini tersimpul dalam ungkapan *duit mah keuna ku beak, pangalaman mah moal* (artinya, uang itu bisa habis, tetapi pengalaman dan pengetahuan tak akan pernah habis).

Responden menuturkan bahwa dalam kebudayaan Sunda terdapat beberapa ungkapan yang apabila disimpulkan tersirat adanya keharusan untuk membentuk keseimbangan perilaku ekonomi, sosial dan agama. Unsur-unsur yang dimunculkan untuk mencapai keseimbangan itu antara lain : sikap adil terhadap sesama, keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan dengan tujuan agar yang ditolong dapat berdiri sendiri, tidak suka memeras, tidak boros dan hidup mewah, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain.

Responden etnik Jawa mengungkapkan, bagi masyarakat Jawa, hidup berkumpul dengan sanak keluarga dan berdampingan dengan tetangga dirasakan tentram dan menyenangkan. Mereka berpendapat tidak mungkin hidup sendiri karena tata hidup yang baik adalah dengan cara *sambat sinambat* dan gotong-royong. Ungkapan

"*mangan ora mangan kumpul* " memberi pengertian secara jelas bahwa apapun yang terjadi, orang Jawa selalu menghadapinya secara bersama, tersirat di dalamnya rasa setia kawan, bersama-sama dalam suka maupun duka.

Nilai-nilai Jawa yang menonjol, menurut responden, adalah ikhtiar menjaga harmoni dan menghindari konflik, baik dalam dimensi hierarkis maupun dalam dimensi komunal. Cara utama untuk mencapai keadaan itu adalah dengan toleransi terhadap orang lain, tetangga, rekan sedesa, atau kerabat lainnya. Persatuan yang damai dan harmonis dalam kelompok, lazimnya dianggap tercermin dalam keberhasilan sistem gotong royong. Secara sadar, sistem ini dianggap sangat baik bagi hidup bertetangga/bermasyarakat karena gotong royong-mengungkapkan kehendak yang harmonis, kesadaran bermasyarakat, dan kesediaan untuk saling memperingan beban.

Dari hasil wawancara dengan responden etnik Cina, terungkap bahwa filsafat hidup orang Cina sangat mementingkan kehidupan duniawi. Selain itu, terdapat juga ajaran hidup yang mengutamakan atau menganjurkan agar setiap manusia berusaha keras demi mencapai keberhasilan. Inti ajaran tersebut bersumber pada filsafat *Kung Fu-Tse* yang tidak dipandang sebagai agama oleh setiap orang Cina. Ahli filsafat itu umumnya hanya dihargai sebagai seorang guru besar yang mengajarkan filsafat sosial dalam hubungannya dengan moral, kekeluargaan, dan secara lebih luas mengatur masalah-masalah ketatanegaraan.

Filsafat *Kung Fu-Tse* antara lain bertalian dengan hubungan antara anak dan orang tua mengenai kewajiban kebaktian anak terhadap orang tuanya. Tentang kewajiban ini Kung Fu-Tse mengatakan, "*Put hao* (tidak berbakti) ada tiga dan salah satu di antaranya yang terpenting adalah tidak mempunyai anak." Karena menganut paham patrilineal, anak laki-laki Cina dibutuhkan bukan saja untuk melanjutkan *She*-nya (nama keluarganya), melainkan yang terutama adalah menggantikan ayahnya kelak merawat abu jenazah leluhur. Dalam kondisi ini, berbakti kepada orang tua memang sesuatu hal yang wajar, tetapi pada orang Cina berbakti itu mempunyai atau mendapatkan arti keramat.

Realitas sosial yang terdapat di lokasi penelitian menunjukkan bahwa umumnya masyarakat Cina memiliki status ekonomi yang

tinggi. Keadaan tersebut timbul karena mereka memiliki sifat ulet dan penuh perhitungan, atau secara objektif masyarakat Cina memiliki "etos kerja" yang tinggi.

Responden etnik Batak mengungkapkan bahwa orang Batak sangat setia kawan dan akan berusaha membela sahabatnya dalam suka dan duka. Etnik Batak menyebut diri mereka sendiri "pemberani." Keberanian orang Batak itu terutama kelihatan dari sikapnya untuk selalu bersedia mengungkapkan pendapat atau pendiriannya, meskipun adakalanya tidak sesuai dengan kehendak orang lain atau orang yang memerintahnya (atasan atau pejabat pemerintah). Mereka tidak takut untuk berurusan dengan seseorang yang berstatus lebih tinggi, dan selalu berusaha membela posisinya dengan sungguh-sungguh.

Di lokasi penelitian, responden mengungkapkan terdapatnya keterikatan sosial antara warga Batak yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan sosial antara lain STM dan arisan. STM atau Serikat Tolong menolong merupakan lembaga yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial, beranggotakan warga Batak yang berada dalam suatu wilayah tanpa membedakan asal marga. Keegiatannya antara lain membantu anggota yang mendapat kesulitan, meninggal dunia, atau sakit dengan cara memberikan santunan berupa uang hasil iuran para anggota. Pertemuan rutin antaranggota dan pengurus, dilakukan secara rutin tiap bulan, kecuali jika keadaan mende-sak, dapat dilakukan setiap saat diperlukan.

Serikat Tolong Menolong terbentuk secara spontan, tidak memiliki pusat (induk) maupun cabang. Adapun satuan pengurusannya terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Para pengurus tersebut bertugas merumuskan tata kerja dan cara pengumpulan serta pengalokasian dana yang ada di kas organisasi. Pemilihan para pengurus ditentukan melalui rapat anggota. Mengingat organisasi ini erat sekali kaitannya dengan masalah uang, maka kriteria utama calon pengurus adalah orang yang dianggap benar-benar jujur.

Lembaga lain yang sifatnya menjunjung tinggi kebersamaan, gotong royong, dan kerukunan, adalah arisan berupa uang. Lembaga ini bertujuan untuk menggalang rasa persatuan sesama warga,

baik warga pihak suami maupun warga pihak istri. Kegiatan dilakukan satu bulan sekali, bertempat di rumah salah seorang anggota secara bergantian.

Prinsip gotong royong pada etnik Minangkabau atau yang umum dikenal dengan sebutan orang Padang, tampak misalnya pada kerelaan mengumpulkan sumbangan untuk pembangunan di daerah asal. Di mana pun mereka merantau dan berdagang, selalu berusaha menyisihkan pendapatan untuk kemajuan tempat kelahirannya.

Suku bangsa Minang dikenal sebagai masyarakat perantau. Dengan prinsip "di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung," mereka mudah beradaptasi dengan situasi dan kondisi tempat yang ditinggalinya tanpa kehilangan atau melupakan kebudayaannya. Seorang responden menuturkan pengalamannya; seperti umumnya para perantau Minang, dia dulu merantau tanpa bekal materi maupun pendidikan yang memadai. Bekalnya hanya keinginan kuat untuk bisa menaikan taraf hidup di tempat tujuan. Dia mendatangi kerabat atau temannya yang telah lebih dulu menetap dan berusaha/bekerja, untuk sekedar bisa menumpang dan kalau mungkin bisa mencarikan pekerjaan untuknya. Oleh karena keterampilan dan pendidikannya kurang memadai, akhirnya terdampar di sektor informal kota. Ketertarikan pada usaha dagang, dirintisnya dengan bekerja membantu seorang kerabatnya yang menjadi pedagang kaki lima. Dengan tekad yang kuat untuk bisa *survive*, secara tekun dia belajar memahami seluk beluk pekerjaan tersebut. Setelah dirasakan menguasai dan tabungannya relatif cukup, dicobanya untuk mandiri. Pada akhirnya, karena ulet dan tidak mengenal putus asa, dia berhasil sedikit demi sedikit menaikan taraf hidupnya. Sekarang, dia memiliki sebuah kios/toko yang menjual pakaian di kawasan Pasar Baru Bandung.

Menyimak pengalaman responden di atas, tampak terdapatnya beberapa nilai budaya pada orang Minang yang dapat menjadi faktor penentu keberhasilannya dalam menaikan taraf hidup. Nilai-nilai tersebut antara lain setia kawan dan mau menolong orang lain, tekun, ulet, rukun, mau bekerja keras, berani mandiri, dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan daerah di mana pun mereka berada.

Di lokasi penelitian, etnik Padang/Minang umumnya bermata pencaharian sebagai pengusaha rumah makan, pedagang kaki lima, karyawan perusahaan swasta, dan pengusaha angkutan kota. Etnik Cina bergerak dalam bidang perdagangan dengan membuka toko, perusahaan sedang dan besar, grosir, atau agen. Etnik Batak umumnya menjadi sopir, kernet, dan meminjamkan uang dengan bunga tertentu. Etnik Jawa umumnya berusaha di bidang penjualan makanan dan minuman, seperti tukang bakso dan penjual jamu gendong, di samping banyak juga yang menjadi buruh pabrik. Adapun etnik Sunda yang merupakan suku bangsa dominan dan berjumlah besar, mempunyai mata pencaharian yang bervariasi, antara lain pegawai negeri, karyawan swasta, pejabat pemerintah, pedagang, pengusaha, dan lain-lain.

4. Integrasi

Integrasi masyarakat dapat diartikan adanya kerjasama dari seluruh anggota masyarakat, mulai individu, keluarga, lembaga, dan masyarakat secara keseluruhan sehingga menghasilkan persenyawaan-persenyawaan berupa adanya konsensus nilai-nilai yang sama-sama dijunjung tinggi. Dalam hal ini terjadi akomodasi, asimilasi, dan berkurangnya prasangka-prasangka di antara anggota masyarakat secara keseluruhan (Munandar S., 1993 : 240).

Beberapa konsep yang artinya sama dengan integrasi atau konsep-konsep yang terkait dengan integrasi pada masing-masing suku bangsa yang dijadikan fokus perhatian penelitian, tampak pada uraian berikut.

Di dalam keluarga inti suku bangsa Sunda, keharmonisan rumah tangga dipengaruhi oleh agama (Islam) yang merupakan fondasi utama dan dijadikan pijakan hidup. Ajaran agama menganjurkan penganutnya untuk senantiasa bertaqwa kepada Allah. Artinya beriman kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Berbakti kepada orang tua, saling menyayangi dan mencintai, merupakan cerminan orang-orang yang bertaqwa.

Prinsip tersebut dikembangkan lagi dalam lingkup yang lebih luas, yaitu di lingkungan sekitar tempat tinggalnya atau dalam kehidupan bermasyarakat, berupa sikap menolong orang yang memerlukan bantuan, baik pada saat berduka cita maupun pada saat bersuka cita (mengadakan pesta atau hajatan).

Hubungan antartetangga tampak erat karena orang Sunda kadang-kadang menganggap tetangganya sebagai saudara sendiri. Hal tersebut dimungkinkan terjadi, dengan anggapan hanya tetangga terdekat yang bisa dimintai bantuannya dengan segera apabila terjadi sesuatu. Namun demikian, pada beberapa kasus, hubungan sosial antartetangga dapat merenggang karena kondisi sosial-ekonomi yang terpaut jauh. Orang yang status ekonominya lebih rendah, kadang-kadang merasa malu atau tidak pantas untuk bergaul secara rapat dengan tetangga yang kaya.

Hubungan sosial yang erat tidak hanya terjadi antartetangga sesama etnik Sunda saja, dengan suku bangsa lain pun tercipta suasana hubungan yang harmonis apalagi apabila menganut agama yang sama. Pada dasarnya, Penduduk etnik Sunda tidak pernah memilih dengan siapa harus bergaul. Keterbukaan ini terbukti dengan adanya pernikahan yang berlainan etnik dan menerima untuk dipimpin oleh warga yang bukan orang Sunda, seperti yang terjadi tahun lalu pada saat ketua RW di wilayah ini dipegang oleh penduduk pendatang dari Jawa.

Realisasi dari keterlibatan suku bangsa pendatang dalam masalah kebersamaan dan pembauran, tampak misalnya pada aktivitas para pemudanya yang tergabung dalam Karang Taruna. Salah seorang dari etnik Jawa menjadi penggerak organisasi tersebut dan aktif dalam memotivasi pemuda dan pemudi yang ada di lokasi penelitian untuk selalu berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Karang Taruna.

Sementara itu, kebersamaan dan kerukunan yang mendukung rasa persatuan antaretnik antara lain tampak ketika para tokoh masyarakat mengajak dan mengundang seluruh warga tanpa membedakan asal etniknya untuk beramai-ramai memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan antusias, seluruh warga menyambutnya dan masing-masing berusaha untuk bisa memberi-

kan sumbangan demi kesuksesan acara tersebut. Sumbangan yang diberikan warga tidak hanya berwujud materi, tetapi juga tenaga dan pikiran; etnik Cina umumnya menyumbang dana pembiayaan kegiatan; dan etnik Jawa, seperti juga etnik Batak dan Padang, menyumbang tenaga.

Dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, kerukunan antaretnik juga tampak misalnya saat hari raya agama atau tradisi etnik. Etnik tertentu yang merayakannya, berusaha berbagi kebahagiaan dengan membagikan hadiah berupa kue kaleng, kain, atau barang lain, kepada tetangga sekelilingnya.

Terdapat juga kegiatan yang menunjukkan keharmonisan hubungan antaretnik. Salah satu di antaranya adalah kegiatan rekreasi yang secara rutin selalu diadakan pada hari-hari tertentu, misalnya beberapa hari setelah Idul Fitri, saat musim liburan sekolah, atau saat pergantian tahun. Penyelenggara kegiatan ini biasanya para pemuda dan pemudi yang tergabung dalam Karang Taruna. Pesertanya terbuka untuk siapa pun yang ingin mengikutinya.

Dalam kehidupan ekonomi, terdapat suatu kegiatan yang memajukan prinsip kebersamaan, yaitu koperasi simpan pinjam yang dikelola oleh ibu-ibu PKK. Kegiatan lain yang mendukung proses integrasi adalah kerja bakti membangun atau memperbaiki sarana-sarana umum, seperti memperbaiki jalan yang rusak berat. Sebagian dana perbaikan jalan ini diperoleh dari mereka yang berada di pinggir jalan terutama dari etnik Cina dan penduduk yang mampu. Kalau ada di antaranya yang tidak memberikan bantuan berupa uang, mereka akan menggantikannya dengan cara menyediakan konsumsi atau berupa bantuan tenaga.

Menyimak uraian di atas, proses integrasi di lokasi penelitian tercermin pada prinsip gotong royong. Gotong royong atau tolong menolong dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Sukaasih pada prinsipnya berakar pada perasaan saling membutuhkan. Kerelaan membantu sesama masyarakat merupakan sikap yang menyiratkan saling pengertian, dan berfungsi mempererat hubungan serta memupuk solidaritas kebersamaan dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis.

5. Pandangan tentang Hubungan dengan Kelompok Lain

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap golongan etnik mempunyai pandangan atau penilaian terhadap suku bangsa atau kelompok etnik lain. Pandangan tersebut dapat bersifat positif, maupun negatif, bergantung situasi dan kondisi saat membentuk pandangan. Pandangan atau persepsi dari masing-masing kelompok etnik tadi, pada gilirannya akan berubah menjadi stereotipe atau prasangka.

Stereotipe menurut Munandar (1993 : 236), adalah tanggapan atau gambaran tertentu mengenai sifat-sifat dan watak pribadi orang / golongan lain yang bercorak negatif akibat tidak lengkapnya informasi dan sifatnya yang individu ke dalam dua kutub, seperti kaya-miskin, rajin-malas, dan pandai-bodoh.

Kecenderungan menyederhanakan secara maksimal ini (*maximum simplicity*) disebabkan individu lebih mudah melakukannya dari pada melakukan penilaian secara majemuk; mudah dalam membedakan individu satu dengan yang lainnya, serta mudah dalam menyesuaikan diri. Dengan demikian, stereotipe mengandung penyederhanaan dan pemukulrataan secara berlebihan (*oversimplicity* dan *overgeneralization*).

Dalam bagian ini akan diungkapkan data lapangan mengenai hubungan prasangka sosial dengan efektivitas komunikasi melalui salah satu perspektif antropologi, yaitu *perspektif etnosentrisme*. Perspektif ini berasal dari *perspektif evolusi*, menjelaskan pertumbuhan suatu masyarakat dari yang homogen menjadi masyarakat yang heterogen. Menurut William Graham Summer, perkembangan itu terjadi karena masyarakat terbentuk atas dasar interaksi pelbagai kepentingan pribadi dan golongan yang sifatnya *antagonistik*. Dalam interaksi tersebut muncul sikap *etnosentrisme* yaitu sikap setiap etnik yang sangat ketat mempertahankan nilai kelompoknya sebagai yang terbaik dari kelompok lainnya. Keterikatan itu memperkuat *rasa kita (in group)* dan selalu berprasangka negatif terhadap *rasa mereka (out group)*.

Ciri-ciri yang paling sering diungkapkan responden dari etnik Sunda mengenai *in group*-nya mencerminkan sifat yang baik misalnya ramah, taat beribadah, dan kukuh memegang tradisinya. Akan

tetapi etnik lain menganggap orang Sunda "penakut" untuk mengungkapkan pendapat dan perasaannya secara terus terang karena tingkah laku yang "halus" dan selalu "bersopan santun". Pengungkapan perasaan etnik Sunda biasanya dilakukan tidak secara langsung, tetapi melalui kode atau perilaku tertentu. Lawan bicara diharapkan "surti" (mengerti dan paham) maksud dari kode yang dilakukan.

Ciri etnik Sunda hampir sama dengan ciri etnik Jawa yang juga dianggap oleh etnik lain : "halus" dan "sederhana". Orang Jawa dianggap menurut peraturan atau norma yang berlaku pada kebudayaan yang sangat kompleks, dan tetap mengakui adat istiadatnya sebagai determinan untuk kehidupan sosial dalam masyarakat mereka. "Bersopan santun" adalah ciri etnik Jawa yang sama dengan ciri etnik Sunda, selain "halus pembawaannya." Yang dimaksud sopan santun adalah sikap dalam pergaulan yang didasarkan atas aturan kesopanan Jawa, yang menentukan tingkah laku untuk situasi tertentu, dan antara orang dengan posisi tertentu. Orang Jawa selalu "ramah" walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan keadaan atau pendapat dia yang sebenarnya.

Etnik Cina menganggap diri mereka sebagai suku bangsa yang terampil berdagang dan oleh karenanya kurang menyukai etnik lain yang mampu di bidang perdagangan, seperti orang Minang. Mereka menganggap orang Minang sebagai saingannya karena sangat ulet dan tekun dalam perniagaan. Responden dari etnik Cina menuturkan sulitnya bekerja sama dengan orang Minang. Hal tersebut dapat dimengerti karena menyangkut masalah perebutan sumber daya ekonomi yang tentu saja masing-masing akan mempertahankan apa yang telah menjadi miliknya.

Pada prinsipnya, golongan Cina berusaha beradaptasi dengan lingkungannya demi kelangsungan hidup dan usahanya. Mereka senantiasa rela untuk berperilaku "low profile", terutama terhadap suku bangsa yang dominan di wilayah tempat tinggalnya. Selama masih menguntungkan, mereka mau dan rela untuk memberikan "pengorbanan", biasanya dalam bentuk materi, kepada lingkungan sosialnya. Hal yang sangat diharapkan ialah berupa "rasa aman" bagi dirinya untuk berusaha, selama rasa aman dalam berusaha itu

terjamin, mereka umumnya tidak mau peduli dengan berbagai persoalan lain.

Mengenai pandangan etnik Cina terhadap etnik Sunda, Jawa, dan Batak, berdasarkan hasil penelitian pada umumnya tidak memberi suatu tanggapan atau pandangan yang negatif. Mungkin mereka menganggap bahwa etnik-etnik tersebut bukan merupakan saingan dalam bidang ekonomi. Etnik Sunda malah sangat membantu mereka, berupa bantuan moral seperti pemecahan dan penanganan masalah-masalah yang berkenaan dengan masyarakat sekeliling. Dengan pengetahuan tersebut, mereka dapat mengekang diri sehingga tidak menimbulkan adanya ketegangan dalam hubungan dengan warga masyarakat lainnya.

Seperti pandangan etnik Cina terhadap orang Minang, maka orang Minang pun berpandangan demikian terhadap orang Cina. Mereka menganggap orang Cina merupakan saingan berat bagi kehidupan perekonomian orang Minang. Tanggapan lainnya tentang etnik Cina, antara lain orang Cina enggan untuk berpartisipasi dalam siskamling. Mereka hanya bersedia membayar sejumlah uang untuk menyewa orang yang mau menggantikan kedudukannya dalam regu siskamling. Dalam hal KB, etnik Minang menuturkan bahwa orang-orang Cina enggan untuk menjadi akseptor walaupun hal tersebut merupakan program pemerintah.

Pandangan yang dikemukakan seperti di atas merupakan sesuatu yang sebenarnya tidak tepat, karena etnik Cina mempunyai toleransi yang tinggi. Oleh karena kesibukannya dalam berusaha, etnik Cina pada umumnya kurang bisa bergaul secara intensif dengan tetangga sekelilingnya. Walaupun demikian, mereka selalu berusaha ikut berpartisipasi pada setiap kegiatan yang dilakukan di lingkungannya meskipun tidak secara langsung, antara lain berusaha memberi sumbangan dana penyelenggaraan.

Beberapa responden memandang orang-orang Minang sebagai orang materialis, segala sesuatunya harus diperhitungkan dengan uang. Walaupun demikian, terdapat juga pandangan yang positif mengenai orang Minang, antara lain tekun, suka bekerja keras, mandiri, dan hubungan dengan daerah asalnya sangat kuat.

Mengenai etnik lain, orang Minang menganggap etnik Jawa "lamban" dalam melakukan suatu kegiatan. Segala hal selalu diperhitungkan untung rugi bagi harga dirinya. Senada dengan hal tersebut, etnik Batak memandang orang Jawa sebagai orang yang mengagungkan status. Apabila etnik Jawa tersebut berdarah biru, yang misalnya tampak pada penggunaan kata "Raden" di depan namanya, maka orang harus bersikap merendah di depannya walaupun orang Jawa berstatus "Raden" tersebut orang yang miskin.

Etnik Sunda dipandang oleh orang Minang sebagai orang yang "peka" terhadap segala hal. Apabila tersinggung, orang Sunda selalu menutup diri dan untuk membuatnya bersikap netral kembali, memerlukan waktu yang cukup lama kecuali orang yang membuatnya tersinggung memohon maaf. Pada bagian ini, menurut orang Minang, ada sisi positifnya yaitu orang Sunda "pemaaf".

Mengenai orang Sunda, etnik Batak juga memandangnya sebagai orang yang "peka", relatif mudah tersinggung. Orang Sunda kadang-kadang menunjukkan reaksi yang sangat agresif atas stimulasi yang bagi orang Batak belum cukup kuat untuk mengakibatkan reaksi seperti itu.

Etnik Batak menganggap dirinya sendiri "berani" menghadapi segala hal, dan berusaha untuk selalu bisa menaklukkan setiap sendi kehidupan. Responden etnik Batak mengungkapkan bahwa orang Batak selalu berani untuk mengambil keputusan apa saja bila perlu, dan pada setiap saat akan mengemukakan pendapat sendiri walaupun berakibat kurang menguntungkan bagi dirinya sendiri.

Ciri "berani" dan "kasar" bagi etnik Batak, hampir selalu diungkapkan oleh setiap responden, baik dari etnik Sunda, etnik Jawa, maupun etnik Minang dan Cina. "Keberanian" orang Batak terutama kelihatan pada saat mengungkapkan pendirian atau pendapatnya walaupun mungkin tidak sesuai dengan keinginan orang lain. "Berani" mencoba, juga menjadi prinsip orang Batak. Tidak ada istilah "tidak bisa" bagi orang Batak. Walaupun memang sebenarnya tidak bisa atau tidak menguasai sesuatu hal, orang Batak tidak akan mengungkapkannya. Dia akan mencoba dahulu, setelah memang terbukti tidak bisa, baru dia mundur.

Sikap "berani" juga tampak apabila terjadi konflik dengan orang lain. Seorang Batak tidak akan takut menghadapi seseorang dalam sebuah pertikaian, walaupun status lawan lebih tinggi. Dia akan membela posisinya dengan sungguh-sungguh. Protes yang terbuka, yang oleh etnik lain dianggap kurang sopan atau termasuk kasar, bagi etnik Batak dianggap sebagai hal yang wajar.

Ciri "kasar" pada orang Batak nampak dalam pola tingkah laku yang dianggap tidak cocok dengan sopan santun etnik yang menilai, misalnya berbicara dengan suara keras atau berkelahi dengan orang lain. Menurut responden Batak sendiri, sikap yang dinilai "kasar" sebetulnya karena orang Batak tidak ingin bersikap "dibuat-buat", ingin selalu "berterus terang", dan "tidak menurut norma-norma kesopanan yang berlebihan."

Sisi positif orang Batak menurut hampir setiap responden adalah perasaan "setia kawan" dan "bersedia membantu" orang yang sedang membutuhkan. Walaupun terkesan angkuh terhadap orang lain, tetapi apabila hatinya sudah "ditaklukkan", orang Batak akan menganggapnya sahabat yang kalau perlu dibela dengan taruhan darah dan nyawa.

6. Pengetahuan tentang Sistem Nilai Budaya Nasional

Jika diamati dengan saksama, maka sebagian warga masyarakat Indonesia dalam kehidupannya hanya mengenal kebudayaan suku bangsanya sebagai satu-satunya pengetahuan yang dimiliki dan dijadikan acuan hidupnya. Sebagai pengetahuan, kebudayaan adalah suatu kesatuan ide yang ada dalam kepala manusia dan bukannya suatu gejala (Parsudi Suparlan, 1995). Oleh karena itu, maka kebudayaan yang dimiliki oleh setiap kelompok etnik adalah juga kesatuan ide pada kelompok yang bersangkutan.

Dalam rangka membina dan mengembangkan sistem nilai budaya nasional, proses integrasi nasional menuntut warga negara untuk tidak hanya mengenal kebudayaannya sendiri tetapi berusaha mengerti dan memahami kebudayaan di luar etniknya agar terjalin saling pengertian dan saling menghormati. Dengan demikian, cita-

cita lahirnya manusia Indonesia yang mempunyai wawasan luas akan menjadi kenyataan, karena tidak lagi mempertentangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan suku, ras, agama, keturunan, dan antargolongan.

Heterogenitas warga di lokasi penelitian, yang memiliki latar belakang budaya dan berbagai kepentingan, ternyata tidak memicu pertentangan antaretnik. Walaupun kurang mengerti dan tidak paham benar kebudayaan di luar etniknya, mereka (masing-masing) berusaha selalu untuk menghormati, menghargai dan mengerti atau memaklumi, kegiatan-kegiatan sosial dan budaya yang dilakukan oleh pendukung kebudayaan yang berbeda. Landasan pijak mereka hanya mengacu pada keinginan untuk hidup tenang dan tentram. Mereka berusaha untuk tidak "usil" atau tidak suka mencampuri orang, dengan harapan orang lain juga tidak ikut campur atau usil terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukannya.

Pengetahuan penduduk mengenai sistem nilai budaya Nasional pada umumnya cukup menggembirakan, walaupun sebagian besar tidak mengerti arti dari istilahnya. Seorang responden menuturkan,

"Saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan sistem nilai budaya nasional atau kebudayaan nasional. Mungkin, itu pedoman untuk hidup bermasyarakat. Yang saya tahu, kalau ingin hidup aman dan tenteram, perilaku kita harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang penting, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat yang lain."

Kenyataan di lokasi penelitian mengungkapkan adanya unsur-unsur perilaku yang merupakan manifestasi dari sistem budaya nasional. Tampak misalnya suasana kekeluargaan yang menjunjung tinggi kerukunan dan kebersamaan, saling menolong dan saling membantu, baik dalam keadaan duka maupun suka. Setiap orang merasa menjadi bagian dari lingkungannya, oleh karena itu selalu berusaha terlibat dalam segala kegiatan yang bertujuan mengembangkan kehidupan dan penghidupan di lingkungannya.

Suasana gotong royong pada saat membangun sarana kepentingan umum, mengungkapkan tingginya keinginan masyarakat untuk mempererat hubungan dan memupuk solidaritas kebersamaan

dalam mewujudkan kehidupan harmonis. Sumbangan partisipasi setiap warga relatif bervariasi, ada yang menyumbang dana, tenaga, maupun konsumsi pada saat pelaksanaan. Apabila dilihat secara umum, partisipasi setiap kelompok etnik, cukup beragam. Karena etnik Sunda merupakan mayoritas dalam jumlah, maka dominasinya tampak pada saat kerja bakti. Etnik lain tampak sedikit, karena umumnya bekerja di sektor informal yang menuntut kerja keras dan curahan waktu relatif banyak. Walaupun demikian, mereka ikut berpartisipasi dengan menyumbang dana atau konsumsi.

Pada etnik Cina, orientasi pada bidang ekonomi merupakan hal yang utama sehingga orientasinya di bidang lain tidak dilakukan. Hal ini terjadi disebabkan golongan Cina jarang diberi kesempatan leluasa untuk berkiperah selain di bidang perekonomian. Misalnya, di bidang politik peranannya relatif kecil dan biasanya mereka pun menghindari hal-hal yang berbau politik. Dapat dimengerti apabila pengetahuan mereka mengenai sistem nilai budaya nasional yang cenderung menyangkut konsep-konsep politik kurang dikuasainya. Masyarakat Cina sebagai warga negara, hanya berusaha memenuhi kewajiban-kewajiban yang dikenakan kepadanya.

Responden dari etnik Batak mengungkapkan, walaupun secara harfiah kurang memahami arti sistem hukum nasional tetapi dalam kehidupan sehari-hari selalu berusaha mematuhi peraturan pemerintah, seperti membayar pajak, memenuhi peraturan lalu lintas, tidak mengganggu ketenteraman lingkungan dan sebagainya. Menurut mereka warga yang baik adalah warga yang selalu patuh pada peraturan, baik yang datang dari pemerintah (formal) maupun atas konsensus masyarakat yang tak tertulis (non formal) yang umumnya berupa hukum adat.

Secara umum masyarakat yang tinggal di lokasi penelitian mengenal UUD 1945 sebagai landasan hukum, tetapi rincian isi, pasal-pasal, dan isi dari pembukaannya, banyak yang tidak mengetahuinya. Demikian juga dengan Pancasila, mereka pada umumnya mengenal Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah hidup, tetapi esensi yang terkandung di dalamnya kurang dikenal. Yang mereka kenal misalnya, sebagai warga negara harus beragama karena di dalam Pancasila terdapat sila Ketuhanan Yang Mahaesa. Adapun

butir-butir penjabaran dari sila tersebut, tidak dikenalnya. Menurut mereka yang penting bukan "teorinya" tetapi "prakteknya".

Mengenai pembangunan terencana yang dikenal dengan program Pelita, hampir seluruh responden mengenalnya karena penerangan atau informasi mengenai pembangunan tersebut sangat gencar dilakukan pemerintah. Adapun rincian sasaran setiap Pelita, kurang diketahui dan dikenalnya.

B. Analisis

Bagian ini akan menguraikan pokok kajian mengenai hubungan sistem nilai budaya suku bangsa dengan sistem nilai budaya nasional, serta potensi yang menunjang persatuan dan kesatuan.

1. Hubungan Sistem Nilai Budaya Suku Bangsa dengan Sistem Nilai Budaya Nasional

Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan seorang warga masyarakat, diperoleh melalui proses belajar dari lingkungannya. Dengan demikian, luasnya cakrawala berpikir seseorang tidak terlepas dari pengaruh pengalaman-pengalamannya sebagai warga masyarakat. Hal itu pun relatif tidak akan berbeda jauh dari kebudayaan yang dimiliki masyarakatnya, manakala pengalaman-pengalaman yang diperolehnya semata-mata berasal dari interaksi sosial dengan warga masyarakat lain tempat ia hidup.

Pada masyarakat majemuk, seperti halnya apabila melihat Indonesia secara nasional, kebiasaan-kebiasaan berlainan yang menjadi ciri khas dari golongan-golongan etnik, tampak menonjol. Selain karakteristik itu, terdapat juga ciri-ciri yang secara umum terdapat di seluruh bagian Indonesia, seperti bahasa Indonesia, dan ideologi negara Pancasila.

Namun demikian, adanya sifat-sifat budaya yang berbeda menampakkannya dengan jelas (T.O. Ihromi, 1980 X). Keanekaragaman budaya bangsa tersebut di satu pihak menjadi kebanggaan,

tetapi di lain pihak bisa menimbulkan masalah. Terutama apabila dikaitkan dengan usaha-usaha pembangunan, akan sukar sekali mencapai pemerataan di segala bidang secara menyeluruh karena perbedaan persepsi, misalnya. Demikian pula, keanekaragaman budaya dapat menyebabkan perbedaan sifat dan karakter dari suku bangsa yang satu dengan yang lainnya. Masalah tersebut bukan hanya menyangkut cita-cita bangsa Indonesia mengenai satu kebudayaan kesatuan, melainkan juga menyangkut masalah kepribadian nasional tentang soal tujuan bersama hidup sebagai bangsa (Koentjaraningrat, 1974 : 12).

Menyimak hal tersebut di atas, alangkah baiknya apabila sekarang ini tidak ada lagi yang masih mempertentangkan masalah suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik secara perorangan maupun golongan. Pikiran atau pendapat seperti itu, sebaiknya justru dihilangkan. Dengan demikian, cita-cita lahirnya manusia Indonesia baru yang mempunyai wawasan luas, diharapkan akan menjadi kenyataan. Upaya ke arah itu antara lain dikembangkan melalui proses pembauran bangsa. Pada hakikatnya, usaha pembauran bangsa adalah proses penyatupaduan nilai kehidupan individu ataupun golongan masyarakat di dalam sistem nilai kehidupan masyarakat yang luhur, yaitu sistem nilai budaya nasional sebagaimana terangkum dalam Pancasila. Proses integrasi nasional atau penyatupaduan untuk menjadi satu kesatuan bangsa itu, dilakukan melalui usaha mewujudkan kesamaan pengertian tentang nilai-nilai kehidupan yang sangat diperlukan bagi pembinaan kesatuan bangsa.

Kesamaan pengertian, tentunya hanya akan tercapai apabila terdapat kontak budaya antarindividu atau antaretnik melalui berbagai bentuk, pola dan sarana pergaulan sosial yang berlangsung secara terbuka dan terpadu. Harapan dari usaha tersebut adalah berkembangnya masyarakat yang senantiasa memelihara semangat kebersamaan atau kerukunan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Hasil penelitian di Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, mengungkapkan gambaran mendalam mengenai interaksi

sosial antargolongan etnik yang terjadi relatif intensif dan kompleks. Sesuai dengan data hasil penelitian, pokok kajian akan bertumpu pada interaksi antaretnik Sunda sebagai masyarakat dan kebudayaan dominan dengan etnik Batak, Cina, Jawa dan Padang. Etnik lain yang ada di lokasi penelitian, yaitu Menado, Bugis-Makasar, dan Arab, tidak disertakan dalam pembahasan dan kajian karena diasumsikan kurang mempengaruhi interaksi antaretnik sehubungan jumlahnya yang sangat sedikit.

Pembahasan dan kajian mengenai hubungan sistem nilai budaya suku bangsa dengan sistem nilai budaya nasional ini, akan diawali dengan mengkaji berbagai corak interaksi antaretnik dan sesama golongan etnik, yang wujudnya dapat berbentuk kerja sama, persaingan, atau konflik. Interaksi tersebut, dipengaruhi oleh sistem nilai budaya masing-masing kelompok etnik, peranan orang-orang tertentu atau tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh, adakalanya disebabkan perebutan sumber daya yang terbatas dan berharga, dan ada atau tidaknya stereotipe-etnik. Setelah terurai interaksi antaretnik dan sesama golongan etnik yang antara lain dilatarbelakangi oleh sistem nilai budaya masing-masing suku bangsa atau kelompok etnik, kemudian akan dikaji hubungannya dengan sistem nilai budaya nasional.

Data hasil pengamatan di lokasi penelitian mengungkapkan adanya kerja sama antarwarga dari berbagai kelompok etnik, misalnya gotong royong membersihkan selokan, memperbaiki jalan, mengatur pembuangan sampah, atau memperbaiki sarana-sarana milik umum. Kesadaran suku bangsa pendatang dalam kerja sama ini dipengaruhi oleh intensifnya penyuluhan dan bimbingan dari aparat pemerintah, baik tingkat kelurahan maupun tingkat RT/RW. Di samping itu, dalam sistem nilai budaya setiap etnik pun terdapat unsur yang menunjang/mendorong keharusan anggotanya untuk selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan di lingkungannya. Motivasi lainnya adalah karena mereka ingin hidup tenang dan tentram. Dengan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial, mereka terlepas dari gunjingan atau cemoohan warga yang lain. Kesadaran akan jumlah yang sedikit dan karenanya harus menyesuaikan diri dengan lingkungan tempatnya bermukim, juga merupakan motivasi mereka

untuk berusaha terlibat dalam kegiatan yang diadakan masyarakat di lingkungannya.

Apabila disimak, dasar dari adanya kerja sama seperti terurai di atas, adalah munculnya prinsip gotong royong yang berakar pada perasaan saling membutuhkan. Koentjaraningrat mengemukakan bahwa sistem tolong menolong itu rupa-rupanya suatu teknik pengerahan tenaga mengenai pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian (1964 : 358). Dengan demikian, jiwa gotong royong dan tolong menolong itu dapat diartikan sebagai perasaan rela membantu terhadap kebutuhan sesama warga masyarakat. Dalam gotong royong, terkandung prinsip timbal balik yang berfungsi mempererat hubungan dan memupuk solidaritas kebersamaan dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis.

Prinsip tolong menolong, juga tampak pada saat seorang warga berduka cita maupun bersuka cita. Pada saat seseorang meninggal misalnya, tetangga terdekat dengan segera membantu dan menolong mengurus segala hal yang berhubungan dengan pengurusan jenazah. Yang lainnya ikut terlibat dan berusaha mencoba membantu walau dengan bantuan yang kecil sekalipun. Bahkan ada yang hanya datang sekadar diam di tempat kejadian, hanya ikut belasungkawa, karena banyaknya yang membantu. Demikian juga pada saat seseorang mengadakan pesta; dengan rela, tetangga sekelilingnya akan membantu. Berlainan dengan peristiwa duka, pada peristiwa yang menggembirakan seperti pesta, pihak penyelenggara akan berkeliling ke tetangga sekelilingnya untuk meminta bantuan. Kecuali tetangga terdekat yang merasa punya kewajiban untuk membantu tanpa diminta, tetangga lainnya merasa sungkan untuk langsung terlibat walaupun dengan rela akan langsung menyatakan bersedia apabila diminta, terutama sumbangan tenaga.

Aktivitas tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari, tampak pada persepsi antartetangga yang menganggap tetangga terdekatnya adalah saudara atau kerabat. Saking dekatnya, apabila kehabisan bumbu dapur pun, mereka biasa saling "meminjam". Tetangga terdekat adalah pihak yang pertama kali diminta pertolongan pada hal-hal yang dirasa sangat mendesak.

Dari uraian di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa di lokasi penelitian terdapat tiga bentuk aktivitas tolong menolong yang tampak dalam kehidupan bermasyarakat (1) tolong menolong yang dilakukan dengan rela, tanpa harus diminta, tanpa pamrih, dan secara spontan. Bentuk aktivitas ini biasanya terjadi apabila terdapat warga desa yang tertimpa bencana, kemalangan, atau kematian; (2) tolong menolong yang walaupun dilakukan secara sukarela, tetapi harus ada permintaan dari yang berkepentingan, karena kadangkadangkang timbul perasaan sungkan. Bentuk aktivitas ini antara lain terjadi pada saat pesta pernikahan, sunatan, dan upacara adat lain sekitar lingkaran hidup individu; dan (3) tolong menolong antartetangga berdekatan. Adakalanya timbul persepsi yang menganggap tetangga terdekat adalah saudara atau kerabat sehingga kerja sama di antara mereka sangat erat, layaknya saudara kandung.

Di antara ketiga bentuk aktivitas tolong menolong tersebut di atas, terdapat perbedaan sifat yang menjiwoinya. Walaupun suasana spontan dan sikap kebersamaan/persaudaraan antartetangga dekat tampak terjalin erat, bentuk aktivitas ke-2 dan ke-3 cenderung memunculkan sikap dan suasana yang memperhitungkan jasa dan kompensasi. Pada bentuk yang pertama, aktivitas tolong menolong tampak berlangsung dalam suasana spontan tanpa pamrih.

Nilai budaya yang terkandung dalam aktivitas tolong menolong yang dijiwai sikap gotong royong, pada hakikatnya merupakan cerminan konsep pemikiran yang sangat mendasar. Pada dasarnya manusia tidak hidup sendiri di dunia ini, tetapi dikelilingi oleh sistem sosial dari komunitas dan masyarakat sekitarnya, serta merasa dirinya hanya merupakan unsur yang ikut terbawa dalam proses peredarannya. Pemikiran dan pertimbangan seperti itu, tentunya menimbulkan rasa keamanan nurani yang amat dalam dan mantap. Oleh karena itu apabila bencana dan malapetaka datang, dengan yakin merasa pasti ada yang berusaha membantu dan tidak perlu hidup dalam ketakutan, seolah sebatang kara atau terisolasi.

Di lokasi penelitian, hubungan kerja sama di bidang ekonomi memperlihatkan adanya persaingan terselubung. Apabila dilihat secara sepintas, persaingan tersebut tidak tampak. Tetapi, apabila diamati secara saksama, tampak adanya sikap yang mendahulukan kepentingan sendiri atau kelompok etniknya. Kerja sama tersebut

meliputi penggunaan tenaga kerja di rumah makan, kedai kopi, kantor, toko, di rumah, dalam menentukan calon isteri/suami, dan dalam menarik calon pembeli di tempat usahanya.

Apabila akan menentukan calon isteri/suami, etnik Jawa biasanya akan memilih dari etnik Jawa lagi dengan alasan di samping mempunyai latar belakang budaya yang sama, juga disebabkan agar dapat pulang ke tempat kelahirannya secara bersama-sama. Pertimbangan lainnya adalah karena sebagian besar etnik Jawa yang menempati kelurahan ini bekerja sebagai tukang bakso, maka isteri sebaiknya dari etnik yang sama dan diharapkan "manut" pada suami, dapat membantu di rumah dalam membuat bakso atau membantu di warung untuk melayani pembeli.

Demikian juga dengan etnik Batak, memilih calon isteri/suami dari etnik Batak lagi. Orang Batak dikotakan sebagai orang kasar dan berjiwa keras, apabila berbicara selalu menggunakan intonasi atau nada yang keras. Dengan karakter seperti itu, tentu saja mereka akan memilih calon isteri/suami yang memiliki karakter sama dan orang demikian jarang terdapat pada etnik lain. Oleh karena itu mereka akan memilih jodohnya dengan orang Batak lagi.

Begitu pula dengan etnik Cina, mereka akan memilih calon isteri/suami dari sesamanya. Apalagi bila dihubungkan dengan kebiasaan mereka, pemilihan jodoh umumnya dibarengi dengan usaha pengembangan bisnis.

Bagi etnik Padang/Minang, terdapat dua cara untuk memilih jodoh, yaitu :

- a. Etnik Padang yang masih kuat memegang tradisi akan memilih jodohnya ke etnik Padang lagi. Istilah "dijodohkan" masih berlaku dalam etnik Padang; dan
- b. Etnik Padang yang sudah longgar pada tradisinya akan memilih jodoh dengan bebas, dalam arti bisa dari etnik mana saja. Cara kedua ini muncul akibat terdapatnya kecenderungan bahwa laki-laki tidak mendapat warisan keluarga karena akan jatuh pada anak perempuan. Anak laki-laki tersebut umumnya akan pergi dari tempat kelahirannya, merantau mencari penghidupan dan jodoh.

Etnik Padang di lokasi penelitian umumnya menikah dengan seseorang dari etnik Sunda atau Jawa. Belum atau tidak tampak terdapatnya etnik Padang yang menikah dengan etnik Cina atau Batak. Yang menjadi alasannya adalah unsur agama. Mayoritas etnik Cina beragama Kristen dan etnik Batak memeluk agama Kristen Protestan, sedangkan mayoritas etnik Padang beragama Islam.

Walaupun terdapat kecenderungan untuk menikah dengan sesama, etnik Sunda relatif menganut prinsip bebas memilih jodoh. Di lokasi penelitian terdapat pasangan yang berasal dari etnik Sunda menikah dengan orang dari etnik Padang, Jawa, Batak, maupun Cina. Hal tersebut dimungkinkan karena etnik Sunda merupakan etnik dominan.

Dalam memilih pembantu rumah tangga, etnik Cina maupun Padang, beranggapan bahwa pembantu harus yang rajin dan jujur. Oleh karena itu, mereka memilih pembantu yang berasal dari etnik Jawa dan Sunda. Pertimbangan lainnya adalah karena orang yang berasal dari suku Sunda maupun Jawa, terkenal rapi dan teliti dalam bekerja. Sebaliknya, etnik Sunda dan Jawa, akan memilih pembantu dari sesama karena kurang percaya dengan etnik lain yang dianggapnya kurang rapi, kurang teliti, dan umumnya kurang menyukai pekerjaan-pekerjaan kecil. Adapun etnik Batak umumnya mempunyai pembantu rumah tangga dari etnik Batak lagi. Pembantu yang berasal dari etnik lain seringkali kurang kerasan atau tidak betah, sehubungan dengan karakter orang Batak yang cenderung berbicara dengan aksen keras sehingga dianggap selalu marah.

Di bidang pekerjaan, perlakuan dan penghargaan antaretnik menurut beberapa informasi yang diperoleh, menunjukkan adanya hasrat untuk membaur dan menyatu. Namun ada beberapa pendapat yang mengungkapkan bahwa kebaikan etnik Cina (yang dianggap *nonpri*) terhadap etnik lain (yang dianggap *pri*), dilakukan hanya untuk mencari atau menjamin keamanan saja.

Walaupun terdapat kecenderungan menempatkan orang dari sesama etnik Cina untuk menduduki jabatan-jabatan penting, sikap mereka umumnya cukup sopan dan baik. Berdasarkan pengamatan pada beberapa perusahaan sedang yang terdapat di lokasi pene-

litian, perlakuan dan tindakan pemilik/direktur suatu perusahaan cukup baik dan sopan. Tentu saja, tindakan tersebut disesuaikan dengan jabatan orang yang bersangkutan. Misalnya pada waktu makan siang, seluruh staf pada suatu perusahaan swasta, bersama-sama makan dalam suatu ruangan semacam aula. Tampaknya sukar menentukan jabatan seseorang pada saat seperti itu, karena tidak adanya perbedaan baik dalam jenis makanan maupun tempat duduknya.

Apabila mengamati keadaan pada sebuah toko atau warung, akan tampak beberapa perbedaan dalam penggunaan tenaga kerja maupun harga barang pada toko/warung milik etnik Cina, Padang, Jawa, atau Sunda. Etnik Batak, tidak ada yang membuka toko/warung. Walaupun pada setiap toko/warung cenderung digunakan tenaga kerja/pelayan yang berasal dari kelompok etnik yang sama dengan pemiliknya, tetapi pada beberapa toko/warung dijumpai kondisi sebagai berikut : toko orang Cina mempekerjakan pelayan orang Cina, Jawa, atau Sunda; warung orang Jawa mempekerjakan orang Jawa atau Sunda; dan warung orang Sunda mempekerjakan orang Jawa atau Sunda. Adapun toko/warung orang Padang/Minang umumnya hanya mempekerjakan pelayan dari sesama etnik-nya. Jarang sekali yang memakai tenaga kerja dari suku bangsa Batak.

Keadaan di atas tentunya menyiratkan beberapa makna, baik dilihat dari segi kepentingan golongannya maupun dalam pengaruhnya terhadap interaksi. Dalam hal interaksi, cara atau kebiasaan di antara sesama kelompok etnik memungkinkan konflik dapat dielakkan. Tidak seperti apabila berlainan etnik yang membawa serta kebiasaan masing-masing, dapat memungkinkan timbulnya kesalahan pengertian pada hal-hal tertentu. Etnik Cina menganggap etnik Padang/Minang sebagai saingan di bidang perekonomian, sehingga tidak memakai tenaga kerja dari etnik Padang melainkan dari Sunda atau Jawa yang dianggap kurang pengetahuannya dalam usaha berdagang. Dengan anggapan seperti itu, etnik Cina tidak khawatir usahanya akan bangkrut karena adanya 'makar' atau keinginan para pekerja untuk menguasai usahanya. Penggunaan tenaga kerja dari etnik Cina sendiri dimungkinkan, karena walaupun berbeda *she*

(marga) misalnya, masih terdapat asumsi bahwa *shin yung* (hubungan saling percaya) hanya dapat dibangun di antara sesama mereka.

Etnik Sunda atau Jawa hanya mempekerjakan para pelayan atau tenaga kerja dari etnik Sunda atau Jawa lagi. Mereka tidak memakai tenaga kerja dari etnik Cina atau Padang yang dianggapnya mempunyai pengetahuan lebih baik di bidang perdagangan.

Adapun etnik Padang/Minang, hanya memakai tenaga kerja dari etnik Padang lagi karena menganggap etnik Cina sebagai saingan, etnik Sunda dan Jawa dianggap kurang terampil, dan etnik Batak dianggap kurang "ramah" untuk menjadi pelayan toko/warung sesuai dengan karakternya yang keras dan cenderung kasar.

Uraian di atas mengungkapkan terdapatnya persaingan yang meskipun tidak secara fisik tetapi tetap ada dan berjalan sepanjang waktu. Hal tersebut tidak bisa diingkari, karena dalam kehidupan bermasyarakat selalu ada hubungan yang terjadi akibat adanya kepentingan tertentu misalnya menyangkut tenaga kerja, sumber daya alam, politik, pendidikan, ataupun ekonomi.

Persaingan lain di bidang ekonomi yang tampak di lokasi penelitian adalah dalam menarik konsumen untuk membeli barang-barang di toko/warung miliknya. Toko/warung milik etnik Cina umumnya menjual barang di bawah harga yang ada di toko/warung etnik lain, walaupun kualitas atau jenis barangnya sama. Kadang-kadang, perbedaan harganya cukup mencolok. Dari hasil wawancara dengan etnik Cina, didapat keterangan bahwa mereka membeli barang langsung dari rekan sendiri yang menjadi penyalur/grosir. Oleh karena itu, harga barang di toko mereka tidak terlalu tinggi karena hanya menjual sedikit di atas harga pokok dengan tidak mengambil keuntungan yang besar. Secara jujur mereka mengungkapkan bahwa mereka berani menjual dengan harga murah namun tidak merugikan karena sudah diperhitungkan dengan harga pembelianya. Dengan harga seperti itu, sudah tentu etnik Cina relatif dominan dalam penguasaan di bidang ekonomi/perdagangan.

Di bidang politik, persaingan tidak terlalu tampak karena hampir semua pejabat pemerintahan dan tokoh politik diduduki oleh orang-orang yang berasal dari etnik Sunda. Walaupun terdapat be-

berapa orang dari etnik lain (terutama dari etnik Jawa) yang duduk dalam posisi tertentu pada elite pemerintahan, namun etnik di luar Sunda tersebut umumnya kurang berminat untuk berkecimpung pada dunia politik praktis.

Persaingan di bidang pendidikan relatif muncul walaupun bukan merupakan masalah yang prinsip. Orang kaya, pejabat/pegawai pemerintah, dan sebagian besar keluarga dari etnik Cina, umumnya menyekolahkan anak-anak mereka pada sekolah yang top dan dianggap bermutu tinggi.

Persaingan di bidang sosial antara lain masalah yang menyangkut kebutuhan sekunder. Beberapa penduduk yang tergolong kaya memiliki kendaraan pribadi yang harganya relatif tinggi. Sebagian besar penduduk kaya tersebut berasal dari etnik Cina, yang memang memiliki tingkat kehidupan lebih baik dibanding etnik lainnya.

Persaingan pada kedua bidang terakhir, yaitu pendidikan dan sosial, bagaikan *api dalam sekam*, kadang-kadang menimbulkan kecemburuan sosial dan membuat situasi menjadi sedikit rawan. Bukan tidak mungkin, apabila suatu saat akan menjadi konflik yang membahayakan proses integrasi nasional.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, masalah konflik antaretnik yang cukup mencuat atau berpengaruh terhadap proses integrasi nasional, dapat dikatakan tidak ada. Perselisihan kecil pernah terjadi, tetapi itu pun dapat diselesaikan secara musyawarah. Perselisihan yang cukup sering terjadi, umumnya antarremaja pada saat kompetisi olah raga atau dalam pergaulan sehari-hari, tetapi tidak sampai meluas menjadi konflik antarsuku bangsa atau agama maupun golongan.

Gejala yang umum terjadi di kota-kota di Indonesia adalah masalah siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) yang diadakan di setiap RT. Seseorang yang mampu (kaya), pada saat mendapat giliran ronda siskamling umumnya memilih lebih baik memberikan uang atau mengupah seseorang sebagai penggantinya. Yang melakukan kebiasaan tersebut umumnya berasal dari etnik Cina, karena sebagian besar etnik Cina di lokasi penelitian tergolong orang mampu dan berhasil dalam bidang ekonomi. Bagi mereka, uang

yang diberikan sebagai pengganti gilirannya memang belum ada harganya dibanding apabila mereka harus jaga dan tidak tidur semalaman sehingga keesokan harinya tidak bisa berdagang atau ke kantor. Sebaliknya, di pihak aparat RT atau seseorang yang bersedia menggantikan (orang upahan), mau juga menerima pemberian uang dari mereka. Hal tersebut tentunya berhubungan dengan keadaan ekonomi penerima uang tersebut, yang relatif kekurangan atau membutuhkan adanya uluran materi. Jadi, memang masalahnya saling mengait. Di satu pihak, terdapat orang yang dapat memberi karena hidupnya berkecukupan, di pihak lain terdapat orang yang memerlukan dan kekurangan materi.

Berdasarkan uraian mengenai pola dan corak interaksi sosial di atas, dapat diungkapkan bahwa ada 2 pola/corak interaksi. Pertama adalah kerja sama yang terjalin antaretnik yang didasarkan atas tenggang rasa antara satu sama lainnya agar tidak sampai terjadi persengketaan sosial (konflik sosial). Bentuk yang kedua adalah kompetisi atau persaingan yang muncul akibat adanya interaksi tersebut, pada dasarnya merupakan bagian dalam kehidupan masyarakat yang acapkali berhubungan dengan perebutan sumber daya yang terbatas dan berharga.

Dalam kondisi semacam itu, berbagai prasangka terhadap kelompok etnik lain dapat muncul dan berkembang, dan pada "titik" tertentu dapat menimbulkan kerawanan sosial serta menggoyahkan integrasi nasional. Prasangka berupa gejala pembubuhan sejumlah ciri subjektif yang diberikan oleh warga sebuah kelompok etnik kepada warga kelompok etnik lain, disebut *stereotipe*. Apabila dilakukan secara khusus terhadap kelompok etnik tertentu, disebut *stereotipe etnik*.

Walaupun di antara ciri-ciri penggambaran stereotipe etnik seperti terurai pada data penelitian, terdapat ciri-ciri positif seperti orang Sunda itu ramah dan sopan, etnik Jawa sopan dan kukuh pada tradisinya, orang Cina berhasil dalam ekonomi, orang Batak tidak kenal menyerah, dan etnik Padang/Minang bersikap ulet dan tekun, namun umumnya menggambarkan stereotipe yang negatif seperti orang Sunda peka dan cepat tersinggung, orang Jawa lamban, orang Batak kasar dan tak tahu aturan, etnik Cina kuper

(kurang bisa bergaul), dan etnik Padang/Minang pelit dan selalu memperhitungkan segala sesuatu dengan uang. Hal tersebut menyebabkan gejala stereotipe etnik dapat dianggap sebagai penghambat dalam interaksi antarsuku bangsa dan integrasi nasional karena sangat sulit untuk diubah secara rasional.

Di lokasi penelitian, walaupun warga masing-masing etnik itu mempunyai stereotipe mengenai etnik lainnya, hubungan kerjasama dan hubungan-hubungan sosial yang baik di antara warga kelompok etnik yang berbeda, tetap berlangsung. Prasangka pada umumnya, timbul akibat persaingan atau ketidakpuasan mengenai sesuatu hal dari satu etnik terhadap etnik lain. Persaingan umumnya terjadi akibat perebutan sumber-sumber daya ekonomi yang melibatkan pengorganisasian orang-orang asal etnik yang sama dengan orang-orang asal etnik lainnya yang dianggap saingan. Dengan demikian, prasangka yang ada dapat dilihat sebagai hasil sejarah hubungan di antara dua etnik berbeda yang bersaing dalam arena perebutan sumber daya ekonomi.

Dalam pergaulan sehari-hari, prasangka atau stereotipe etnik yang ada seringkali tertekan atau menjadi berkurang peranannya --sebagai batas sosial yang menghambat hubungan baik-- karena adanya berbagai arena interaksi yang dapat mengakomodasi sikap-sikap yang tidak bersahabat tersebut. Arena-arena tersebut antara lain berbagai kegiatan sosial yang melibatkan semua kelompok etnik seperti pada saat perayaan *Indonesia Emas (50 tahun Indonesia Merdeka)*, kerja bakti memperbaiki sarana-sarana umum, atau rekreasi bersama yang biasanya dikoordinir oleh Karang Taruna setempat.

Sebuah gejala yang patut diperhatikan, khususnya bagi usaha-usaha untuk menunjang integrasi nasional, adalah adanya kenyataan bahwa walaupun etnik Cina telah berusaha berbicara, bertindak, dan berpikir seperti penduduk setempat (etnik Sunda), mereka tetap menjadi sasaran prasangka. Hubungan etnik Cina dengan para pendatang menghasilkan hubungan persaingan yang kemudian menimbulkan berbagai prasangka dan sikap-sikap yang saling menjauh. Untunglah, kebudayaan dominan (Sunda) dapat meredakan gejolak yang tidak diharapkan. Bahkan hubungan etnik Cina dengan

penduduk setempat yang mayoritas etnik Sunda, pada umumnya berupa hubungan yang saling melengkapi dan menguntungkan.

Menyimak uraian di atas dan data hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa kebudayaan dominan dalam hal ini kebudayaan Sunda sangat berpengaruh terhadap pola dan corak interaksi sosial. Kondisi tersebut menimbulkan kecenderungan mudahnya melaksanakan usaha integrasi masyarakat ke dalam tatanan persatuan dan kesatuan bangsa karena kebudayaan para pendatang terbaur (terasimilasi). Kecenderungan masing-masing etnik untuk mempertahankan identitas etniknya, relatif memudar dan tidak mencuat. Begitu juga berbagai kegiatan sosial dan ekonomi di antara spesialisasi-spesialisasi yang dikembangkan oleh masing-masing kelompok etnik, relatif tidak kentara.

Pengaruh kebudayaan dominan, secara nyata tampak dari bahasa pergaulan sehari-hari yang digunakan penduduk, yaitu bahasa Sunda. Setiap etnik pendatang berusaha untuk dapat berbicara dalam bahasa Sunda, walaupun dalam berbicara antarsesama etnik tetap menggunakan bahasa masing-masing. Misalnya, antaretnik Batak selalu menggunakan bahasa Batak, Cina dengan bahasa Cina, Jawa dengan bahasa Jawa, dan Padang dengan bahasa Padang/Minang. Dalam pertemuan atau forum resmi pun, seringkali digunakan bahasa Sunda di samping bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama.

Walaupun di lokasi penelitian terdapat kebudayaan dominan yang seolah-olah berfungsi sebagai penyelaras arah interaksi antar-etnik, tetapi masih tetap diperlukan adanya sebuah kerangka acuan yang dapat digunakan oleh sekalian kelompok etnik yang ada. Kerangka acuan yang dimaksud adalah sistem nilai budaya nasional Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pada dasarnya, sistem nilai budaya nasional tersebut tidak terlalu sulit untuk diterapkan karena merupakan intisari dan puncak-puncak kebudayaan daerah. Strategi yang patut dipikirkan dan dikaji dalam mengenalkan dan mengembangkan sistem nilai budaya nasional kepada seluruh etnik yang ada, adalah pemantapan ideologi

Pancasila bagi setiap warga masyarakat dan khususnya para pejabat yang ada pada sistem pemerintahan, yang menjadi "panutan" warga masyarakat. Dengan demikian, sistem nilai budaya nasional tidak sekadar dipahami sebagai cita-cita, melainkan diamalkan dalam sikap dan perbuatan, dengan cara penanaman pengetahuan, serta penguatan sistem sanksi dan hadiah sehingga tindakan-tindakan sekalian warga menjadi tertib dan berusaha di-siplin. Hal tersebut mungkin terjadi karena setiap individu akan menyadari hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan sosial mereka dalam struktur masyarakatnya secara utuh.

Adanya sistem nilai budaya nasional, bukan berarti harus menghilangkan berbagai sistem nilai budaya suku bangsa yang sudah ada. Akan tetapi, secara eksplisit menghilangkan peranan kelompok etnik tersebut sebagai kekuatan politik dalam sistem nasional atau dalam sistem yang lebih luas dari pada kelompok etniknya. Hal tersebut berarti bahwa aspirasi kelompok etnik tersebut yang secara sadar maupun tidak, dapat muncul dalam kehidupan nasional, sudah tertampung dalam sistem nilai budaya nasional tersebut, yaitu melalui berbagai pranata yang ada dalam sistem nasional.

Proses untuk mengembangkan hubungan yang selaras antara suku bangsa dan golongan yang berbeda, memang tidak mudah, makan waktu banyak. Untunglah, bahwa hubungan antaretnik di Indonesia tidak seburuk seperti di beberapa negara lain yang memiliki masyarakat majemuk. Walaupun demikian, potensi terpendam untuk konflik karena masalah ketegangan antarsuku bangsa tidak bisa diabaikan begitu saja.

Sudah jelas bahwa negara dengan masyarakat majemuk, jauh lebih sukar diurus daripada suatu negara yang kecil dan seragam; hal itu tidak ada yang menyangkal. Tetapi kenyataan mengungkapkan bahwa tidak jarang orang yang mengabaikan bahkan menyangkal adanya masalah potensi konflik akibat hubungan antaretnik, dengan cara membiarkannya. Masalah tersebut hanya bisa dihindari, justru apabila mau menerima aneka warna suku bangsa sebagai suatu fakta yang harus dipelajari secara mendalam. Pengetahuan tersebut diperlukan agar pengertian dan toleransi terhadap etnik lain serta kebutuhan untuk bekerja sama, dapat dikembangkan.

2. Potensi Penunjang Persatuan dan Kesatuan

Dua pemikiran yang muncul sebelum bangsa Indonesia merdeka ialah gagasan *post figuratif* dan *co-figurative*. Gagasan *post figuratif* (mewakili generasi tua) cenderung memuja-muja kejayaan masa lalu dan berusaha mempertahankan kebudayaan "lama dan asli". Sedangkan gagasan *co-figurative* (mewakili generasi muda), mengutamakan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mengacu pada sistem budaya apapun yang dapat diandalkan. Gagasan *co-figurative* ini tidak mempedulikan dari manapun unsur-unsur kebudayaan yang diperlukan sebagai acuan dalam menghadapi tantangan, selama hal itu dianggap efektif.

Kedua pola pikir itu sangat diperlukan dalam pengembangan kebudayaan bangsa. Sesungguhnya, betapapun lambannya, setiap kebudayaan akan mengalami perkembangan. Akan tetapi, apabila perkembangan itu berlangsung sangat lambat, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam menghadapi tantangan dan bersaing dengan pendukung kebudayaan yang lebih tanggap. Sebaliknya, kalau kebudayaan itu dibiarkan tanpa kendali, ia dapat tercerabut dari akar budaya atau kehilangan karakter yang membedakan dari kebudayaan lainnya.

Selain dikotomi *co-figurative - post figuratif*, hal lain yang dipertentangkan ialah kebudayaan nasional dengan kebudayaan daerah. Ada anggapan dengan berkembangnya kebudayaan nasional, maka kebudayaan "daerah" tidak diperlukan lagi dan dengan sendirinya akan tersisihkan. Sementara itu, ada pendapat bahwa pelestarian kebudayaan "daerah" itu hanya akan membangkitkan perpecahan di kalangan penduduk, sehingga dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Ada pula kekhawatiran akan adanya dominasi satu kebudayaan daerah terhadap kebudayaan daerah lainnya.

Tampaknya, berbagai permasalahan itu disadari sepenuhnya oleh para pendiri bangsa sebagaimana tercermin dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945 yang mengamanatkan :

"Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama

dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia".

Politik kebudayaan di atas merupakan landasan yang menunjang persatuan dan kesatuan bangsa, sebab memberikan jaminan bagi perkembangan kebudayaan-kebudayaan daerah untuk memberikan kontribusinya bagi kebudayaan nasional.

Tentu saja tidak semua kebudayaan daerah secara otomatis menjadi kebudayaan nasional, hanya kebudayaan daerah yang dapat memberikan identitas bagi bangsa Indonesia, dapat menimbulkan perasaan bangga bagi bangsa Indonesia, dan bermutu tinggi, yang dapat dikatakan sebagai kebudayaan nasional.

Dari kebudayaan nasional ini terbentuklah "kepribadian bangsa". Kepribadian bangsa Indonesia tercermin dalam Pancasila, dimana Pancasila itu merupakan manifestasi dari adat istiadat, tradisi, atau kebudayaan Indonesia. Pancasila membentuk konfigurasi yang memberikan kepada bangsa Indonesia persamaan-persamaan pengertian dan nilai-nilai serta respon emosional yang sama.

Dengan demikian, keanekaragaman kebudayaan suku-suku bangsa di Indonesia tidak menjadi halangan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak berorientasi pada perbedaan yang ada, tetapi menekankan pada unsur-unsur yang dimiliki secara bersama-sama. Unsur-unsur kepribadian yang sama dipupuk dan dikembangkan menjadi pola yang cukup diintegrasikan. Dari pola itulah terbentuk *communal personality*, *basic personality structure* atau *national character*. seperti ramah tamah, gotong royong, musyawarah mufakat, religius, dan lain-lain.

Konsep lain yang merupakan potensi penunjang persatuan dan kesatuan bangsa ialah "kesadaran sejarah" yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Formulasi itu bentuknya berupa "pengalaman-pengalaman yang sama di masa lampau menghadapi persoalan-persoalan yang sama di masa kini, dan memiliki cita-cita atau harapan-harap-

an yang sama di masa depan." Pengalaman dijajah pada masa lalu, menyadari ketinggalan dari bangsa lain pada masa kini, dan cita-cita terwujudnya masyarakat adil makmur di masa datang, dapat membuat bangsa Indonesia meletakkan persatuan dan kesatuan di atas segalanya.

Di lokasi penelitian, interaksi sosial antaretnik (hubungan antaretnik) selalu dalam kerangka *basic personality structure*. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari tetap mengacu pada kebudayaan etniknya, tetapi tidak mengganggu komunikasi antaretnik. Hal itu dimungkinkan karena pada setiap etnik terdapat mekanisme yang mengatur hubungan sosial yang meliputi hubungan antarindividu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dalam mekanisme itulah terdapat seperangkat nilai yang sama dalam setiap etnik. Nilai-nilai itu antara lain sikap hormat-menghormati, ramah tamah, gotong royong, tenggang rasa, musyawarah untuk mufakat, rasa setia kawan, toleransi, saling memperhatikan, jujur, adil, dan bijaksana. Unsur-unsur yang sama inilah yang membentuk *basic personality structure*.

Selain nilai-nilai di atas, masih banyak nilai-nilai yang dapat dikatakan sebagai potensi penunjang persatuan dan kesatuan bangsa, antara lain nilai yang berorientasi terhadap *achievement* dari karya, nilai yang mementingkan eksplorasi, sifat hemat, dan jiwa bersaing. Nilai budaya seperti selalu berorientasi vertikal ke arah atasan, mempunyai pengaruh positif dan negatif dalam pembangunan nasional. Dikatakan negatif karena seolah-olah tidak percaya diri, selalu bergantung perintah atau anjuran pimpinan sehingga tidak tampak adanya pengembangan diri. Dikatakan positif, karena kondisi tersebut dapat memudahkan taktik untuk mengajak rakyat berpartisipasi dalam pembangunan dengan cara memberi contoh atau teladan. Apabila banyak pembesar dan pemimpin mau hidup sederhana dan hemat, maka rakyat akan turut hidup sederhana dan hemat. Demikian juga, apabila banyak pembesar dan pemimpin mau hidup berdisiplin, menaati hukum dan aturan-aturan, maka rakyat akan turut hidup berdisiplin, menaati hukum, dan aturan-aturan.

Nilai-nilai positif lainnya yang terdapat pada sistem nilai budaya suku bangsa yang dapat dijadikan unsur sistem nilai budaya nasional adalah sikap toleran terhadap pendirian-pendirian lain; tentunya selama pendirian itu tidak mengganggu sendi-sendi kehidupan. Nilai lainnya adalah sifat "tahan penderitaan". Nilai budaya tersebut rupanya bersumber pada beberapa nilai dan konsep lain, misalnya konsep yang beranggapan bahwa hidup itu sudah sejak awalnya harus kita terima sebagai suatu hal yang pada hakikatnya penuh penderitaan, dan bukan suatu karunia yang penuh kenikmatan. Koentjaraningrat (1987 : 70) mengungkapkan : di satu pihak nilai ini ada aspek negatifnya karena dalam bentuk yang ekstremnya akan memberi kesempatan pada berkembangnya aliran-aliran kebatinan yang memfokus pada fungsi menderita untuk kenikmatan rasa mendieritanya itu sendiri. Sebaliknya, justru keuletan untuk hidup menderita sekian lama, tetapi tetap menunjukkan suatu kemampuan untuk mengikuti proses gerak hidup masyarakat, merupakan suatu sifat positif yang menguntungkan untuk pembangunan, yang secara tidak sadar telah dieksploitasi selama ini. Misalnya, upah dan gaji rendah yang mengkompensasi jasa yang disumbangkan kepada masyarakat oleh rakyat dan pegawai negeri, sebenarnya suatu pengganti bagi sifat hemat.

Nilai-nilai positif yang merupakan potensi penunjang persatuan dan kesatuan bangsa juga tampak pada sikap selalu tabah, ulet, dan rajin, sambil tetap berusaha dan berikhtiar. Hal tersebut merupakan sisi positif dalam rangka mengembangkan sikap mental : kemauan untuk berusaha atas kemampuan sendiri, rasa tanggung jawab sendiri, dan nilai yang berorientasi terhadap *achievement* dalam karya.

Akhirnya, perlu dikemukakan pula bahwa di kalangan penduduk terdapat sikap yang menonjolkan kebersamaan atas prinsip kekeluargaan, yang disebut gotong royong. Pada dasarnya gotong royong adalah aktivitas pengerahan tenaga tanpa bayaran untuk suatu proyek yang bermanfaat untuk umum atau yang berguna bagi pemerintah.

Di samping nilai-nilai positif seperti terurai di atas, ikatan primordialisme yang relatif "masih sangat kuat" dari berbagai

kelompok etnik tetap saja menjadi sumber konflik yang cukup potensial. Misalnya, orientasi etnik Cina di dalam menjalankan perkongsiannya selalu mengutamakan keluarga dan kerabatnya sendiri. Dalam perusahaan yang dimiliki etnik Cina, tidak ada dari etnik lain yang menduduki jabatan atau posisi penting. Keadaan ini kian memperbesar kesenjangan sosial-ekonomi antara etnik Cina dengan etnik-etnik lainnya, sehingga "kecemburuan sosial" senantiasa hadir dalam interaksi sosial di antara mereka. Akan tetapi, pola sikap itu tidak hanya dimiliki oleh etnik Cina. Tampaknya sudah menjadi rahasia umum, dalam pelaksanaan *rekrutmen* pegawai, unsur-unsur etnik dan kekerabatan sedikit banyak menjadi bahan pertimbangan. Hal lain yang masih potensial menimbulkan konflik ialah "stereotif negatif" antaretnik. Stereotif itu menimbulkan *prejudice group* sehingga menghambat hubungan yang bersifat *empati* dan *simpati* antaretnik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini akan menguraikan pokok-pokok kajian yang telah dibahas pada bab terdahulu dan beberapa saran yang diharapkan dapat menunjang proses integrasi nasional.

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan : *Pertama*, pola dan corak interaksi antaretnik pada masyarakat kota yang majemuk dipengaruhi oleh ada atau tidaknya kebudayaan dominan. Di lokasi penelitian, kebudayaan Sunda merupakan kebudayaan dominan dan berfungsi sebagai pengendali serta penyelaras interaksi antaretnik. Walaupun demikian, masih tetap diperlukan adanya kerangka acuan yang dapat dipakai oleh setiap kelompok etnik untuk dapat berinteraksi antaretnik maupun intraetnik. Kerangka acuan tersebut adalah sistem nilai budaya nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pada dasarnya, sistem nilai budaya nasional mencerminkan unsur-unsur kepribadian yang bersifat umum dan dimiliki oleh setiap suku bangsa di Indonesia, karena proses pembentukannya pun

berawal dari proses penyatupaduan nilai kehidupan masyarakat yang luhur dan berasal dari sistem nilai budaya suku-suku bangsa yang ada di Indonesia.

Kedua, corak interaksi antaretnik dan intraetnik di lokasi penelitian berbentuk kerja sama, persaingan, dan konflik. Interaksi tersebut dipengaruhi oleh sistem nilai budaya masing-masing kelompok etnik, peranan orang tertentu atau tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh, perebutan sumber daya yang terbatas dan berharga, dan ada atau tidaknya stereotif etnik.

Dasar dari adanya kerja sama adalah munculnya prinsip gotong royong yang berakar pada perasaan saling membutuhkan. Gotong royong dalam hal ini, diartikan sebagai suatu teknik pengerahan tenaga dalam pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.

Bentuk hubungan persaingan antara lain tampak pada penggunaan tenaga kerja di toko/warung, di rumah, dalam menentukan calon isteri/suami, atau dalam menarik konsumen agar membeli di tempat usahanya. Dasar dari adanya hubungan seperti itu adalah adanya sikap mendahulukan kepentingan sendiri atau kelompok etniknya, dan perebutan lahan atau sumber daya yang langka/terbatas dan berharga.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, masalah konflik antaretnik yang cukup mencuat atau berpengaruh terhadap proses integrasi nasional, dapat dikatakan tidak ada. Perselisihan kecil pernah terjadi, tetapi itu pun dapat diselesaikan secara musyawarah, dan tidak sampai meluas menjadi konflik antarsuku bangsa atau agama maupun golongan.

Ketiga, konflik antarsuku bangsa pada umumnya timbul dari prasangka atau stereotif etnik yang cenderung negatif. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa prasangka atau stereotif etnik yang negatif itu merupakan penghambat yang mendasar bagi hubungan-hubungan sosial yang baik. Lebih jauh lagi, menghambat proses integrasi nasional. Dalam hal ini, persaingan berupa perebutan sumber daya ekonomi yang melibatkan *rekrutmen* orang-orang etnik seasal adalah penghambat yang membesarkan dan melestarikan prasangka.

Keempat, potensi yang menunjang persatuan dan kesatuan dalam mekanisme yang mengatur hubungan sosial berupa sepe-rangkat nilai yang dapat dijumpai pada setiap kelompok etnik, antara lain sikap hormat menghormati, saling menghargai, ramah tamah, gotong royong, tenggang rasa, musyawarah untuk mufakat, rasa setia kawan, toleransi, jujur, adil, dan bijaksana. Di samping nilai-nilai positif tersebut, ikatan primordial yang relatif masih sangat kuat pada berbagai etnik tetap menjadi sumber konflik yang cukup potensial. Misalnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam *rekrutmen* pegawai, unsur-unsur etnik dan kekerabatan sedikit banyak menjadi bahan pertimbangan. Kondisi tersebut kian memperbesar kesenjangan sosial antaretnik, sehingga "kecemburuan sosial" senantiasa hadir dan merupakan kendala yang harus secepatnya diatasi.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil temuan, saran-saran yang dapat dikemukakan adalah : *Pertama*, untuk mengetahui lebih banyak mengenai kenyataan dari variasi sistem nilai budaya yang hidup dalam sifat dan sikap dari berbagai suku bangsa, golongan, dan lapisan masyarakat, perlu dilakukan penelitian secara intensif dan lintas sektoral.

Kedua, untuk mengantisipasi masalah SARA yang diasumsikan sebagai salah satu bentuk *bahaya laten*, perlu dikembangkan berbagai media komunikasi antaretnik. Dengan berkembangnya komunikasi, setiap etnik diharapkan bersikap lebih terbuka, merasa empati, berpikir positif, memberikan dukungan, dan memelihara keseimbangan suasana kebatinan intraetnik dan antaretnik sebagai syarat efektivitas komunikasi antaretnik. Dengan demikian, diharapkan pula dapat mengubah persepsi stereotif menjadi lebih positif terhadap etnik lain.

Ketiga, menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya interaksi sosial yang intensif, mulai yang bersifat *afeksi* sampai ke *konasi* dengan etnik lain. Selain itu, perlu juga dihindari tindakan diskriminasi terhadap etnik lain.

Keempat, menghadirkan isi kebudayaan setiap etnik melalui media massa atau forum-forum terbuka agar semua etnik bisa saling mengenal. Perkenalan tersebut dapat juga dengan mengadakan kontak antaretnik melalui pertukaran misi-misi pendidikan, perdagangan, kesenian, dan olah raga dalam frekuensi yang relatif sering dan berkesinambungan. Juga, sebaiknya diadakan dialog antaretnik yang bertemakan masalah publik.

Kelima, memelopori penerapan sistem perekrutan pimpinan dan anggota lembaga sesuai dengan tatanan umum dan khusus lembaga, tanpa memandang asal-usul etnik.

Keenam, menata kembali penataan ruang untuk pemukiman, terutama mencegah *segregasi* dan konsentrasi pemukiman berdasarkan kelompok etnik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agraha Suhandi, *Pola Hidup Masyarakat Indonesia*, Bandung : Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, 1988.
- Alo Liliwari, "*Praksangka Sosial dan Komunikasi Antaretnik*" dalam Prisma No. 12 bulan Desember, Jakarta : LP3ES, 1994.
- Amri Marzali, *Kesenjangan Sosial -Ekonomi Antar Golongan Etnik : Kasus Cina-Pribumi di Indonesia* dalam Prisma No. 12 Bulan Desember, Jakarta : LP3S, 1994.
- Azhar Djohan, *Beberapa Faktor Kesejarahan sebagai Penyebab "Mobilitas Ekonomi" Masyarakat Cina dan Pengaruhnya Bagi Orang Melayu : Suatu Studi Kasus di Sumatra Timur pada Pertengahan Abad ke-19 sampai Perempat Awal Abad ke-20* dalam Kumpulan Makalah Seminar Sejarah Nasional IV Sub tema Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Bangsa Indonesia, Jakarta : Depdikud, 1991.
- BP-7 Pusat, *Bahan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara*, Jakarta : Percetakan Negara RI, 1991.

Bruner, E.M., *The Expression of Ethnicity in Indonesia dalam Urban Ethnicity* (editor : Abner Cohen), London : Tavistock, 1974.

E. Sedyawati, *Sistem Kesenian Nasional Indonesia : Sebuah Renungan*, Depok : FSUI, 1992.

Geertz, Clifford, "*The Integrative Revolution : Primordial Sentiments and Civil Politics in the New State*" dalam Clifford Geertz (ed), *The Interpretation of cultures*, New York : Basic Books, 1973.

H.W. Bachtiar, *Integrasi Nasional dan Permasalahannya*, dalam Kumpulan Makalah, Tugu : Depdikbud, 1985.

----- *Integrasi Nasional Indonesia*, dalam Wawasan Kebangsaan Indonesia, Jakarta : BAKOM PKB PUSAT 1994.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Jakarta : PT. Gramedia, 1974.

----- *Lima Masalah Integrasi Nasional*, dalam Masalah-masalah Pembangunan : Bunga Rampai Antropologi Terapan, Jakarta LP3ES, 1984.

----- *Pengantar Ilmu Antrpologi*, Jakarta : Aksara Baru, 1985.

----- *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1993

----- *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*, Jakarta : UI Press, 1993

Kroeber, A.L., and Talcott Parsons, *The Concept of Culture and of Social System*, dalam *American Sociological Review*, 23 : 582-582, 1958.

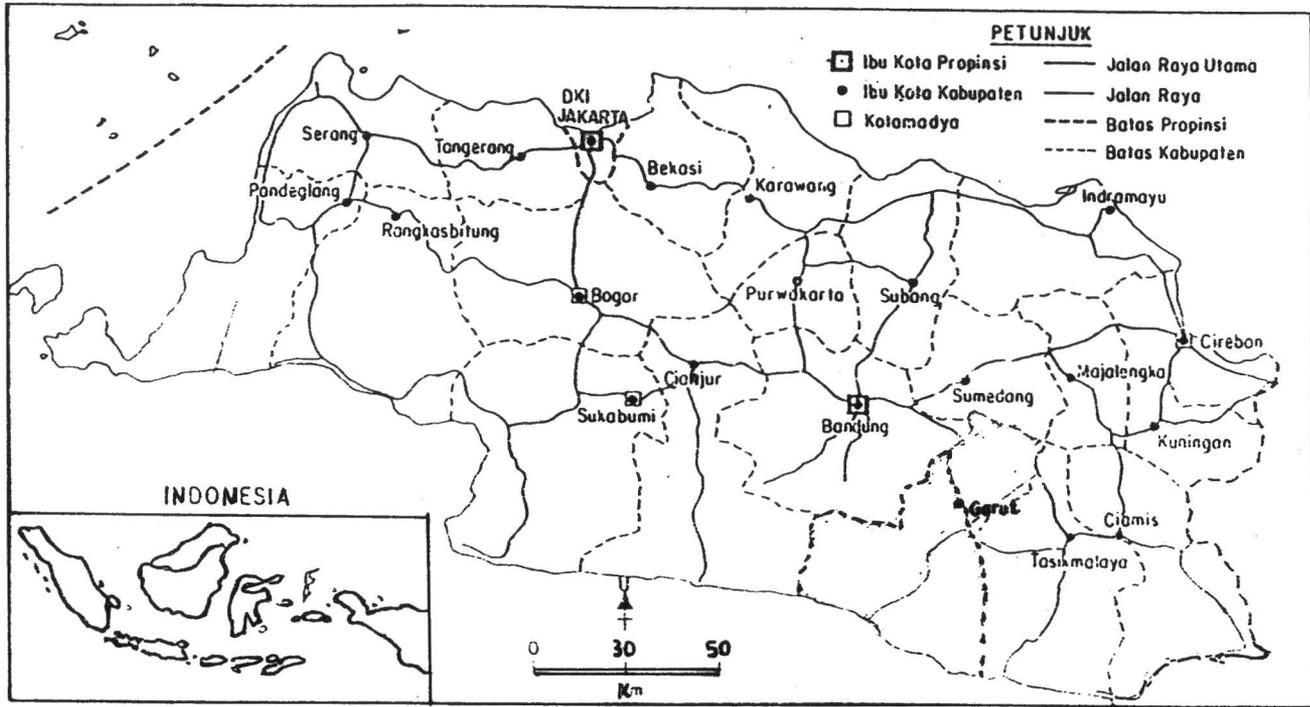
M. Junus Melaltoa, *Integrasi Nasional suatu Pendekatan Budaya*, Jakarta : Ditjen Kebudayaan Depdikbud 1995.

- M. Munandar Soelaeman, Ir., MS., Ilmu Sosial Dasar, Bandung : PT. Eresco, 1993.
- Mely G. Tan, Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia, Jakrta : PT. Gramedia, 1981.
- P.J. Suwarno, Negara dan Nasionalisme Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia, 1995.
- P. Suparlan, Interaksi Antar Etnik di Beberapa Propinsi di Indonesia, Jakarta : Depdikbud, 1989.
- Radcliffe - Brown, Structure and Function in Primitive Society, New York : Appleton Century, 1965.
- Ria Intani, Budaya Dagang Masyarakat Keturunan Cina; Studi Kasus tentang Pedagang Jalan Tamim Kelurahan Kebonjati Kotamadya Bandung, Bandung : Skripsi Jurusan Antropologi FISIP Universitas Padjadjaran, 1989.
- Schweizer, Margarete, *Pendapat-pendapat Antaretnis pada Mahasiswa UGM Yogyakarta*, dalam Prisma No. 4 bulan April, Jakarta : LP3ES, 1979.
- Soeroso, MA., Prof. Dr., Pokok-pokok Pikiran yang Menjadi Latar Belakang Pembentukannya, Yogyakarta : Yayasan Penanggulangan dan Lembaga Javanologi, 1984.
- T. O. Ihromi, Pokok-pokok Antropologi Budaya, Jakarta : PT. Gramedia, 1980.
- Tri M. Irsyam Wahyuning, *Golongan Etnis Cina sebagai Pedagang Perantara di Indonesia (1870 - 1930)* dalam Kumpulan Makalah Seminar Sejarah Nasional IV Subtema Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Bangsa Indonesia, Jakarta : Depdikbud, 1991.
- Tylor, E.B. Primitive Culture, 2 vols., Boston : Estes & Lauriat, 1874.

U. Pelly, Hubungan Antar Kelompok Etnis, Beberapa Kerangka Teoritis dalam Kasus Kota Medan, Interaksi Antar Suku Bangsa Dalam Masyarakat Majemuk, Jakarta : Depdikbud, 1989.

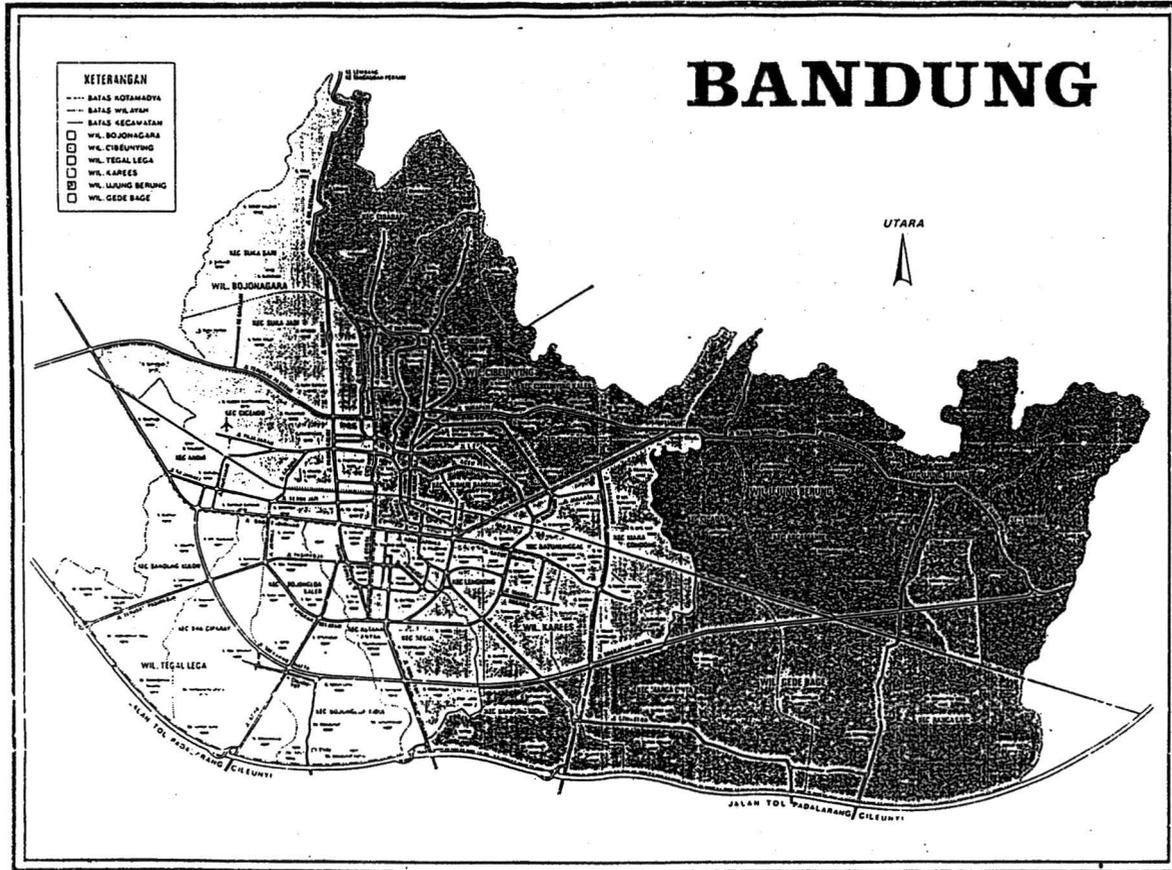
----- Urbanisasi dan Adaptasi, Jakarta : LP3ES, 1994.

1. Peta Propinsi DT. I Jawa Barat



2. Peta Kotamadya DT. II Bandung

112



5. Peta RW. 05 Kelurahan Sukaasih

